MENJADI INDONESIA

Pikiran-Pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perubahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

MENJADI INDONESIA

Pikiran-Pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia

Dr. Ujang Komarudin, M.Si

PT Pencerah Generasi Antarbangsa

Untuk Rakyat Indonesia
Semoga Makin Bahagia dan Sejahtera

MENJADI INDONESIA:
Pikirian-pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia
Copyrights @2018 oleh Dr. Ujang Komarudin, M.Si

Editor: M.R. Muchlis
Desain Sampul: M.R. Muchlis

x + 238 hlm; 14,8 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-51062-5-5

ENLIGHTS
PT Pencerah Generasi Antarbangsa
Eightyeight@Kasablanka Lantai 35
Jalan Casablanka Raya Kav.88, Jakarta 12870
Telepon 021.80640526
Email: info@enlights.co
www.enlights.co

Indonesia Political Review (IPR)
De Salim Town House
Jalan H. Salim No.132 Cimanggis, Depok, Jawa Barat
Email: ipoliticalreview@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Daftar Isi

Daftar Isi **vii**
Kata Pengantar **x**

BAB 1 DINAMIKA PARTAI POLITIK DI TAHUN POLITIK
1. Panik di Tahun Politik 3
2. Wajah Baru Senayan 9
3. Golkar Now 15
4. Airlangga Sang Nahkoda Baru Partai Beringin 21
5. Jangan Tinggalkan Novanto 27
6. Jalan Tengah Selamatkan Golkar 33

BAB 2 SPIRIT NASIONALISME DAN KETELADANAN
7. Selamat Milad Akurat.co 41
8. Golkar Pasca Novanto 47
9. Mencintai Pahlawan 53
10. Plus Minus 3 Tahun Jokowi-JK 59
11. Meneladani Hari Sumpah Pemuda 65
12. Spirit Hari Santri Nasional 71

BAB 3 KORUPSI YANG MERAJALELA DAN MENGEJALA
13. Lagi-lagi OTT 79
14. Gundah Gulana Kader Beringin 85
15. Tahun Baru dan Tahun Politik 91
16. Pilih Golkar atau Novanto..... 97
17. Apa Kabar Pansus KPK? 103
18. Meneladani Para Pahlawan 109

BAB 4 PILKADA DAN MASIFNYA MAHAR POLITIK
19. Spirit Hari Sumpah Pemuda 117
20. Menagih Janji Anies - Sandi 123
21. Jurus Sakit Para Koruptor 129
22. Partai Golkar bukan Toko Kelontong 133
23. Pilkada dan Kemaslahatan Bangsa 139
24. Pilkada dan Mahar Politik 145

BAB 5 PILKADA DAN MARAKNYA MONEY POLITIK
25. Tahun Politik Tahun Penuh Intrik 151
26. Eks TNI/Polri Masuk Gelanggang Politik 157
27. Mungkinkah Pilkada Tanpa Money Politics 163
28. Menjaga Netralitas dalam Pilkada 169
29. Kursi Panas Pilkada 2018 175
30. Menjadikan Pilkada Penuh Makna 181

BAB 6 PILKADA DAN MOMENTUM PERUBAHAN BANGSA
31. Pilkada Zaman Now 189
32. Pilkada dan Pertaruhan Masa Depan Bangsa 195
33. Kartu Kuning Untuk Jokowi 201
34. Demokrasi Kaum Penjahat 207

35. Wakil Rakyat Yang Terhormat **213**
36. Tanggapan untuk Rektor Baru UAI, Terkait Opini, Pendidikan adalah Kemanusiaan **219**

BAB 7 PENUTUP
37. Penutup **227**

Daftar Pustaka **230**
Tentang Penulis **237**

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Yang Maha Mulia, yang atas anugerah, karunia, dan hidayah-Nya buku ke-7 saya dapat terselesaikan dalam waktu singkat. Semoga buku referensi ini, bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Amiin.

Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah, Nabi Besar Muhammad Saw. Manusia terhebat dalam sejarah peradaban manusia di muka bumi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amiin.

Buku yang ada di tangan pembaca ini merupakan buku referensi ilmiah, hasil pemikiran dan pengalaman lapangan saya, terkait persoalan-persoalan politik terkini.

Tak ada yang sempurna. Termasuk isi tulisan dalam buku ini. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Koreksi, masukan, dan kritikan dari para pembaca sangat saya tunggu. Semoga buku ini menjadi amal jariah penulis yang pahalanya terus mengalir tanpa henti hingga di akhirat nanti. Amiin.

Depok, 19 Januari 2018

Ujang Komarudin

BAB 1

DINAMIKA PARTAI POLITIK DI TAHUN POLITIK

1

Panik di Tahun Politik

Tahun 2018 sedang dan akan kita jalani. Di tahun ini pula akan dilaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak putaran terakhir menjelang Pileg dan Pilpres 2019. Tahun 2018 menjadi tahun yang penuh harapan, tantangan, dan peluang. Bagi petualang politik, tahun politik menjadi momen yang baik untuk menaikan karir politiknya (Rajab, 2018: 2-6). Kesempatan untuk menjadi kepala daerah, anggota legislatif, bahkan menjadi presiden sangat terbuka. Tahun politik akan menjadi golden moment bagi para aktor politik di pusat maupun di daerah (Muchtar dkk, 2018).

Memburu kekuasaan tidak dilarang. Asalkan dilakukan dengan cara-cara yang baik dan beradab. Etika politik harus dikedepankan dan dijunjung tinggi. Tanpa etika politik kita ada dalam bayang-bayang politik yang cenderung menghalalkan segala cara. Cara apapun akan ditempuh yang penting bisa berkuasa. Ini sangat berbahaya dan tidak sesuai dengan tuntunan agama dan melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Sejatinya manusia memang ingin berkuasa, karena dengan kekuasaan orang akan dihargai dan bergelimang dengan harta.

Namun tahun politik juga bisa membawa dampak negatif jika tidak bisa diantisipasi. Seperti akan muncul dan membesarnya isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Oleh karena itu, kita jangan panik ditahun politik dan kita juga jangan menghembuskan isu SARA yang dapat memecah belah bangsa. Mari kita jaga kondisifitas ditahun politik yang penuh intrik ini. Menjaga persatuan dan kesatuan lebih penting dari pada merebut kekuasaan. Kekuasaan yang tidak mampu mempersatukan sama halnya dengan menebar perpecahan.

Tahun politik juga bisa menjadi tahun kepanikan bagi calon kepala daerah. Karena untuk menjadi calon kepala daerah tidak sedikit modal yang harus dikeluarkan. Bahkan untuk daerah tertentu calon kepala daerah bisa menghabiskan dana 40 Milyar untuk maju menjadi kepala daerah dan belum tentu terpilih. Jika terpilih calon kepala daerah tersebut paling tidak bisa tersenyum dan berfikir untuk mengembalikan modal politik tersebut. Namun resikonya bisa berurusan dengan penegak hukum, jika cara mendapatkannya dengan cara-cara haram dengan cara mengobral ijin tambang atau menggunakan APBD untuk kepentingan politik.

Yang lebih panik lagi jika calon kepala daerah kalah. Sudah keluar dana banyak kalah pula. Tentu hal ini menyakitkan. Tetapi itulah demokrasi di kita masih berbiaya tinggi dan rentan dengan korupsi. Calon kepala daerah yang kalah juga bisa terlilit hutang, karena biaya yang dikeluarkan untuk kampanye ternyata dari hasil pinjaman kepada orang lain. Dan tidak sedikit calon kepala daerah yang kalah berurusan dengan hukum. Bahkan yang lebih tragis lagi, calon kepala daerah yang gagal bisa menjadi gila. Hal ini juga banyak terjadi di daerah-daerah.

Sejatinya tahun politik harus menjadi tahun yang menyenangkan dan membahagiakan. Pesta demokrasi Pilkada lima tahunan harus menjadi pesta rakyat yang dapat menjadikan rakyat tersenyum dengan kegembiraan. Rakyat harus disuguhkan dengan Pilkada yang berkualitas. Pilkada yang menampilkan calon-calon kepala daerah terbaik. Memiliki visi-misi dan program terbaik yang terukur dan bisa diimplementasikan untuk kesejahteran masyarakat. Masyarakat juga harus disuguhkan dengan ide-ide segar calon kepala daerah yang mampu membawa perubahan bagi daerah dan mampu mengangkat harkat dan martabat rakyat yang dipimpinnya.

Tahun politik bukan tahun untuk menebar kebencian dan caci maki. Dan bukan juga tahun kepanikan. Jadikan tahun politik menjadi momentum perbaikan daerah. Jika 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2018 menghasilkan kepala daerah yang bersih dan berkualitas, maka otomatis daerah-daerah tersebut akan mengalami pertumbuhan dan kemajuan. Dan jika daerah-daerahnya maju, maka Indonesia pun akan maju dan jaya. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya, jika Pilkada menghasilkan pemimpin yang korup, maka pembangunan daerah pun tidak

akan terjadi. Keinginan rakyat untuk menikmati kehidupan yang layak dan sejahtera hanya tinggal angan-angan belaka.

Di tangan pemimpin yang baik, daerah akan baik. Dan ditangan kepala daerah yang korup, daerah akan hancur. Tidak ada daerah di negeri ini yang daerahnya maju karena kepala daerahnya korup. Oleh karena itu, demi untuk kebaikan rakyat Indonesia memilih pemimpin ditahun politik harus berdasarkan rasionalitas dan pilih yang terbaik diantara yang terbaik. Bangsa ini tidak akan kekurangan stok calon pemimpin daerah dan pusat yang bersih dan visioner. Dan orang-orang bersih dan visioner tersebut harus dimunculkan agar menjadi pemimpin-pemimpin daerah dan Indonesia saat ini dan yang akan datang (Andriansyah, 2015: 74).

Jangan sampai politik dan kekuasaan dikuasai oleh orang-orang yang tidak jelas konsep dan asal-usulnya. Politik di daerah dan pusat harus dikuasai oleh orang-orang baik yang memiliki ide dan gagasan orisinil pembangunan daerah dan nasional. Jika politik diisi dan dikuasai oleh orang-orang baik, maka kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan baik dan untuk kepentingan rakyat. Begitu juga sebaliknya, jika politik diserahkan kepada orang-orang yang tidak baik, maka tinggal tunggu saja kehancuran bangsa ini. Karena politisi yang berkarakter dan bermental buruk hanya akan berjuang untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan partainya, bukan untuk kepentingan rakyat dan juga bangsa dan negara.

Pilkada sejatinya harus melahirkan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Bukan pemimpin yang merasa berkuasa dan mengabaikan yang dipimpinnya. Rakyat lah yang menentukan akan memilih siapa yang dikehendakinya. Momentum terbaik untuk merubah daerah dan bangsa ini ada ditahun politik saat ini. Oleh karena itu, pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar tidak menyesal di kemudian hari.

Tahun politik juga menjadi ajang menjaga dan mempertahankan eksistensi partai politik dan elit-elitnya. Saling jegal, hancur, dan bunuh menjadi bagian yang tak terelakan dalam pertarungan di tahun politik. Namun mari kita nikmati tahun politik dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jangan jadikan tahun politik sebagai tahun penuh kepanikan dan penderitaan. Nikmati dan syukuri tahun baru dan tahun politik sebagai bagian dari pendewasaan bangsa Indonesia menuju kejayaan dan kemakmuran.

Selamat tahun baru 2018 dan menikmati tahun politik.

2

Wajah Baru Senayan

Seiring dengan akan berakhirnya tutup tahun 2017, hiruk-pikuk dan drama politik tahun 2017 pun akan berakhir. Tahun 2017 merupakan tahun atau masa kegelapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Di tahun ini, banyak nama-nama politisi Senayan yang diduga kuat terlibat atau menerima aliran dana haram E-KTP. Dan bahkan Ketua DPR RI non-aktif, Setya Novanto menjadi terdakwa dan sedang diadili dalam kasus dugaan mega korupsi E-KTP (Kinanti, 2018: 8).

Senayan sejatinya menjadi tempat rakyat untuk mengadu, menyampaikan aspirasi, dan berkeluh- kesah atas penderitaan hidup yang semakin hari semakin sulit dan terjepit. Senayan harus menjadi tempat penyalur aspirasi rakyat. Senayan harus menjadi institusi yang berwibawa, sehingga jika berhadap-hadapan dengan pemerintah setara dan tidak tersandera. Senayan sejatinya juga merupakan tempat berkumpulnya pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

DPR RI kumpulan orang-orang terhormat, bukan perkumpulan para penjahat. Oleh karena itu, wajah korupsi yang selama ini melekat pada lembaga legislatif tersebut harus ditutupi dan dihilangkan. Citra anggota DPR RI yang koruptif menjadikan lembaga pengawas pemerintah tersebut mandul dalam melakukan pengawasan, bahkan sibuk dengan dirinya sendiri dalam mengamankan kasus-kasus yang dihadapi oleh sebagian anggota DPR RI.

Memang tidak semua anggota DPR RI dicitrakan buruk. Ada dan akan selalu ada anggota DPR RI yang bersih, lurus, dan bejuang untuk kepentingan rakyat. Nah anggota DPR RI yang bercitra baik tersebut harus dimunculkan dan harus diberi peran menjadi pimpinan, baik di fraksi, komisi, bahkan pimpinan DPR RI. Jika saja para anggota DPR RI yang memiliki citra baik terus berjuang dan dapat bersaing bahkan bisa mengalahkan anggota-anggota DPR RI yang busuk, maka paling tidak citra DPR RI yang buruk akan tertutupi.

Institusi DPR RI merupakan salah satu lembaga terkorup di Indonesia. Ini tentu tidak boleh dibiarkan. Harkat dan martabat DPR RI harus segera dipulihkan. Rakyat sedang menunggu DPR RI untuk berbenah. Dan sedang menunggu karya-karya besar

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. DPR RI ada dan hadir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, harusnya para anggota DPR RI menyadari bahwa mereka dipilih oleh rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat, tidak terjebak pada kepentingan diri sendiri, kelompok, atau partainya.

Rakyat ingin melihat DPR RI yang bersih. Bersih dari skandal korupsi. Bersih dari kongkalingkong dan patgulipat permainan kotor dan haram. Rakyat ingin melihat DPR RI yang gagah berani mengkritisi dan mengingatkan pemerintah, jika pemerintah lalai dan tidak berbuat untuk rakyat. Rakyat ingin DPR RI bermetamorfosa menjadi DPR RI yang dicintai dan disayangi rakyatnya.

Yang terjadi akhir-akhir ini adalah rakyat telah memvonis DPR RI sebagai institusi yang korup dan berjuang untuk kepentingan dan ambisi masing-masing anggotanya. Dan vonis sosial dari rakyat memang beralasan dan berdasar. Karena selama ini memang DPR RI bekerja sekehendak hatinya dan tidak mengikuti keinginan dan aspirasi rakyat. Wajah bopeng DPR RI harus secepatnya dipoles dan diperbaiki, jika tidak, maka yang akan rugi bukan hanya anggota DPR RI yang terhormat, tetapi seluruh rakyat Indonesia.

Kepada siapa lagi rakyat berharap selain kepada DPR RI. Karena memang DPR RI dibentuk untuk mengangkat penderitaan rakyat. Jika DPR RI nya saja ugal-ugalan dan tidak memihak rakyat, maka kepada siapa rakyat hendak mengadu. Sejatinya DPR RI dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena anggota DPR RI adalah wakil rakyat. Jangan sampai rakyat tidak terwakili karena anggota DPR RI sibuk dengan urusannya masing-masing.

Tahun 2017 akan segera berakhir. Dan kita akan memasuki tahun 2018. Tanggal 9 Januari 2018 DPR RI akan memasuki dan memulai masa sidang. Pada awal tahun baru 2018 ini pula kita akan memiliki Ketua DPR RI yang baru pengganti Setya Novanto yang sudah mengundurkan diri. Partai Golkar dibawah kepemimpinan Airlangga sedang mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan Ketua DPR RI. Ketua DPR RI yang baru akan menentukan wajah senayan kedepan. Apakah Senayan masih berwajah bopeng dan buruk ataukah berwajah bersih dan berseri-seri.

Partai Golkar tentu tidak akan sembarangan mengusulkan kadernya untuk menjadi Ketua DPR RI. Pastikan kader yang diusulkan adalah kader yang bersih, muda, profesional, progresif, kreatif, inovatif, berwawasan luas, tidak elitis, mampu bekerja dengan baik di internal ataupun ekstenal DPR RI. Dan yang paling penting adalah harus mampu mengangkat citra DPR RI yang sedang terpuruk menjadi baik dan dicintai rakyat Indonesia.

Tugas Ketua DPR RI yang baru memang tidak mudah. Namun juga bukan sesuatu yang sulit. Ketua DPR RI yang baru harus menampilkan wajah baru senayan yang bersih, produktif, dan berbuat dan berkarya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kurangi dan jika bisa hilangkan kesombongan dan ego pribadi sebagai pejabat negara. Jabatan merupakan amanah. Rakyat akan menagih amanah tersebut. Pimpinan dan anggota DPR RI jangan sampai tidak amanah dan mengkhianati amanah yang sudah diberikan.

Tahun baru 2018 wajah Senayan harus berubah. Berubah dari kegelapan menjadi terang-benderang, berubah dari ugal-ugalan menjadi lebih soft berjuang untuk kepentingan rakyat.

Selamat menunggu Ketua DPR RI yang baru, harapan baru, dan citra baru yang lebih baik. Buktikan bahwa DPR RI adalah tempat bersemainya orang-orang hebat yang berjuang untuk rakyat.

Selamat Tahun Baru 2018.

3

GOLKAR Now

Airlangga Hartarto sang komandan baru Partai Golkar telah dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) kemarin. Perjalanan Airlangga untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar sangat mulus dan nyaris tanpa perlawanan. Riak-riak Prio Budi Santoso yang akan maju dan menantang Airlangga dalam perebutan ketua umum hanya menjadi pemanis semata.

Airlangga menjadi harapan dan tumpuan Partai Golkar menuju kebangkitan. Bangkit setelah lama berkonflik dan bangkit

dari keterpurukan, karena eks ketua umumnya tersandung kasus E-KTP. Apakah Airlangga akan mampu memenuhi harapan kader agar Partai Golkar menang dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres, hanya waktu yang akan menjawabnya. Waktu pula yang akan menjadi saksi apakah Airlangga dan Partai Golkar akan menjadi pemenang atau pecundang.

Airlangga harus mampu menciptakan New Golkar yang kekinian. Golkar yang diisi oleh orang-orang yang tidak berkasus. Golkar yang diisi oleh kader-kader muda potensial. Golkar yang bebas dari kepentingan para pemilik modal. Golkar yang mampu mengawal aspirasi rakyat. Golkar yang bisa bersinergi dengan pemerintah. Golkar yang bermartabat. Golkar yang anti korupsi. Dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Airlangga menjadi Ketua Umum Partai Golkar sebagai antitesa dari ketua umum sebelumnya Setya Novanto yang dianggap memiliki banyak masalah hukum, Airlangga dianggap tidak memiliki atau belum pernah terlibat masalah hukum. Dan tidak pernah berhadapan dengan penegak hukum. Karena Airlangga dianggap bersih inilah kader-kader Golkar rame-rame mendukungnya menjadi ketua umum.

Namun harus dicacat dan diingat. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada pejabat yang tidak berkasus. Begitu juga dengan Airlangga. Jadi, jika dicari kesalahannya pasti ada dan akan ketemu. Airlangga memang pejabat yang beruntung, karena belum ada orang yang membuka kasus-kasusnya. Dan perlu diingat juga Airlangga namanya pernah masuk dalam Panama Papers. Airlangga yang dianggap bersih harus membuktikan bahwa memang dirinya bersih. Karena jika tidak Golkar yang akan jadi taruhannya.

Golkar now memang harus menciptakan brand baru. Brand untuk menjaga kesolidan dan kebangkitan Partai Golkar. Brand

untuk meraih simpati rakyat. Golkar baru yang tanpa harus kehilangan jati diri dan karakter lama yang elegan. Ciptakan dan bangun ketokohan yang kuat dan berkarakter. Ciptakan tokoh muda Golkar yang anti korupsi, cerdas, progresif, kreatif, inovatif, gaul, bisa menjadi teladan bagi internal dan eksternal partai.

Memang Golkar tidak pernah kekurangan stok tokoh. Hampir semua individu di Golkar merupakan tokoh. Ketokohan di Golkar merata dan tidak ada yang dominan. Ciptakan tokoh-tokoh baru yang mampu menjadi magnet dan daya tarik masyarakat. Karena ketokohan masih menjadi faktor penentu masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Jangan memunculkan tokoh lama yang status quo dan terlibat dalam kasus hokum (Ghafur, 2017: 585).

Yang jelas Airlangga sedang melakukan kompromi dengan kekuatan lama. Dan tidak mungkin juga Airlangga meninggalkan tokoh-tokoh lama. Deal-deal politik tak akan terhindarkan. Karena tak mungkin Airlangga menjadi ketua umum Partai Golkar tanpa kompromi dengan kekuatan-kekuatan di internal Golkar. Wajar jika terjadi bagi-bagi jabatan bagi orang-orang lama dan baru di era kepemimpinan Airlangga.

Politik sejatinya menurut Lasswell yaitu who gets what, when, and how. Politik itu soal siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Dan jika sudah terjadi deal-deal politik dan kekuatan lama dan baru sudah diposisikan dalam jabatan-jabatan strategis, maka selesai pula urusan politik tersebut. Politik akan bergejolak jika ada orang yang tidak mendapatkan jabatan, padahal sudah berjuang mati-matian membela Airlangga.

Airlangga memang sedang beruntung. Munaslub Partai Golkar bukan hanya mentahbiskan dirinya menjadi ketua

umum, tetapi juga menjadi formatur tunggal untuk merevitalisasi kepengurusan yang akan dipimpinnya. Ketua umumnya baru, harusnya kepengurusan di bawahnya juga baru. Jika kepalanya berganti, maka leher, badan, kaki, dan ekornya juga harus ganti. Jika kepalanya dianggap bersih, maka dari leher hingga buntut pun harus diisi oleh orang-orang bersih. Jangan lagi diisi oleh orang-orang bermasalah dan busuk.

Airlangga memang bukan Setya Novanto. Airlangga harus hati-hati jangan sampai terpeleset atau terjatuh seperti Setya Novanto. Jangan pertaruhkan Golkar untuk kepentingan pribadi dan golongan. Jadikan Golkar sebagai partai yang bermartabat dan disegani oleh kawan dan lawan. Juga berjuang untuk kesejahteran rakyat. Rakyat sedang menunggu kerja nyata Golkar. Raih simpati rakyat dengan kerja nyata dan pengabdian. Kembalikan kepercayaan rakyat pada Golkar. Dan kemenangan akan menjadi keniscayaan.

Jangan pernah sekali-kali mengecewakan rakyat. Buktikan bahwa "Suara Golkar adalah Suara Rakyat". Rakyat jangan hanya dijadikan objek semata, tetapi harus dijadikan subjek pembangunan. Rakyat jangan hanya didekati dan disapa menjelang Pemilu saja, tetapi dinafikan dan dicampakkan pasca Pemilu. Rakyat bukan orang-orang bodoh yang mudah ditipu dan dibohongi, rakyat Indonesia sudah melek politik dan cerdas, sehingga apabila ada partai politik yang ingkar janji bahkan mengecewakannya, maka sudah dipastikan partai tersebut akan mendapat hukuman dari rakyat.

Kita tunggu langkah-langkah dan kinerja Airlangga dalam membawa dan menahkodai Partai Golkar. Partai Golkar bukan partai *ecek-ecek* dan baru kemarin. Partai Golkar adalah partai yang

sudah matang dan dewasa. Bersikaplah sebagai kesatria. Ciptakan Golkar yang bersih dan berkarakter pemenang. Sulit memang. Tetapi bukan sesuatu yang mustahil menciptakan Golkar baru yang berwibawa dan dicintai rakyat.

Airlangga tidak sendirian. Airlangga akan dibantu oleh pengurus Golkar lainnya. Ciptakan kekompakan antar kader. Berikan hak-hak kepada kader yang sudah berjuang berdarah-darah di Partai Golkar. Ciptakan kebersamaan pasti Golkar akan kembali jaya.

4

Airlangga Sang Nahkoda Baru Partai Beringin

Pleno DPP Partai Golkar dini hari tadi telah menghasilkan nahkoda baru partai beringin. Airlangga, ya Airlanggalah yang memenangkan pertarungan tersebut.

Pertarungan tanpa lawan dan pertarungan tanpa keringat. Karena penetapan Airlangga begitu cepat dan tanpa rivalitas. Dan Airlangga akan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tanggal 18 Desember 2017, lalu akan dikukuhkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada tanggal 19-20 Desember 2017.

Pleno, Rapimnas, dan Munaslub Partai Golkar memang harus dilakukan dan menjadi jalan terbaik untuk menyelesaikan semua permasalahan di tubuh partai beringin.

Konflik yang berkepanjangan dan ditahannya Setya Novanto oleh KPK karena diduga terlibat korupsi e-KTP menjadikan Partai Golkar oleng (Nirmati, 2018: 60).

Momentum Pleno, Rapimnas, dan Munaslub pada Desember 2017 ini harus menjadi momen terbaik bagi Partai Golkar untuk bangkit. Bangkit untuk memenangkan pertarungan politik nasional dan lokal.

Dengan ditetapkannya Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar, maka tugas berat sudah menanti di depan mata. Akankah Partai Golkar menjadi pemenang dalam Pilkada dan Pemilu ataukah sebaliknya akan menjadi pecundang.

Partai yang bermental pemenang akan tenang dan kokoh dalam menghadapi badai dan permasalahan yang menerpa. Dan mampu bangkit dari keterpurukan. Partai yang bermental kalah, dia akan tenggelam dengan ulahnya sendiri karena tidak mau berubah.

Airlangga mungkin saja menjadi orang yang cocok untuk memimpin Partai Golkar jaman now. Namun belum tentu cocok untuk masa yang akan datang.

Airlangga memang sosok muda, kaya, berperawakan atletis, ganteng, didukung istana, senior, pimpinan, dan kader Partai Golkar. Airlangga juga dicitrakan sebagai orang yang bersih dan belum pernah terlibat masalah hukum dengan para penegak hukum. Namun Airlangga juga manusia, dia perlu diingatkan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jika dicari kesalahan-kesalahannya pasti akan ketemu.

Menjadi ketua umum Partai Golkar saat ini memang tidak mudah. Namun juga tidak sulit. Dengan seabrek kader yang mumpuni dan berpengalaman. Juga sudah terbiasa mengelola dan menyelesaikan konflik dengan cara-cara elegan. Partai Golkar bisa saja akan dengan cepat melakukan *recovery*.

Sang nahkoda baru Partai Golkar Airlangga harus mengakomodasi seluruh kepentingan di internal Partai Golkar. Menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Bahkan harus mampu meraih simpati masyarakat Indonesia yang selama ini sudah mulai kecewa dengan partai beringin.

Masih banyak cukup waktu untuk bangkit. Bangkit atau mati terkubur oleh perpolitikan Indonesia. Kebangkitan Partai Golkar harus digelorakan ke semua kader. Kebangkitan adalah keniscayaan. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Dan jika bukan kader Partai Golkar siapa lagi yang akan mengusung kebangkitan tersebut.

Saatnya membangun soliditas internal. Tak mungkin Partai Golkar bisa bangkit, jika di internal partai masih cakar-cakaran dan menyimpan dendam antar sesama kader. Oleh karena itu, Airlangga harus mempu menyatukan faksi-faksi yang ada di internal partai. Jangan ada lagi gontok-gontokan antar kader. Dan konflik harus diselesaikan di internal tidak dibawa keluar.

Harapan kader Partai Golkar terhadap Airlangga sangat besar. Jangan sampai harapan yang besar tersebut menjadi kekecewaan. Kecewa karena tidak diakomodir. Kecewa karena tidak mendapat tempat. Kecewa karena disingkirkan. Kecewa karena sudah berjuang memenangkan Airlangga, tapi terbuang. Kecewa karena ketua umum yang baru tidak memegang komitmen. Kecewa karena pribadi dan kelompoknya yang mendapat prioritas. Kecewa

karena kader yang sudah susah payah berjuang untuk partai, tapi terlempar dari pencalonan kepala daerah atau calon legislatif. Kekecewaan-kekecewaan tersebut harus diantisipasi agar Partai Golkar tetap solid dan mampu bangkit dari senjakala kegelapan.

Tahun politik sudah di depan mata. Pertarungan politik akan semakin keras. Partai-partai akan saling sikut dan bunuh. Kader-kader partai akan bergerak mengamankan posisi masing-masing. Airlangga jangan membuat blunder politik yang tidak perlu. Jika Airlangga sang nahkoda baru Partai Golkar melakukan blunder politik, maka Partai Golkar yang akan menjadi taruhannya.

Jangan kecewakan kader-kader yang sudah mendukung anda, sekali saja mereka kecewa, maka akan sulit untuk menyembuhkannya. Partai Golkar harus berdamai dengan kebersamaan dan persatuan. Seluruh kader harus berpikir untuk menyelamatkan dan memenangkan pertarungan politik.

Melorotnya suara Partai Golkar dalam sebuah survei harus menjadi tantangan bagi Airlangga dan seluruh kader Partai Golkar untuk bersama-sama merebut kemenangan. Karena kemenangan harus diperjuangkan dan direbut. Tak ada kemenangan tanpa perjuangan dan kerja keras. Kerja keras seluruh kader akan menjadikan Partai Golkar bertahan bahkan dapat memenangkan pertarungan politik yang liar dan ganas.

Jika Airlangga tidak mampu membawa perubahan dan kemenangan bagi Partai Golkar, Airlangga bisa saja mundur atau dimundurkan.

Soal Airlangga yang merangkap jabatan menjadi Menteri juga harus menjadi perhatian. Airlangga baiknya harus mundur dari jabatan Menteri Perindustrian RI. Dalam kabinet kerja di bawah Jokowi-JK, tidak ada satu pun menteri yang merangkap

jabatan sebagai ketua umum partai. Berikan saja jabatan menteri perindustrian kepada kader terbaik Partai Golkar. Partai Golkar tidak pernah kekurangan stok calon pemimpin. Banyak kader Partai Golkar yang mumpuni dan mampu untuk mengemban amanah sebagai menteri perindustrian.

Satu hal yang penting dan harus menjadi perhatian nahkoda baru partai beringin yaitu pengisian jabatan Ketua DPR RI yang kosong, karena Setya Novanto sudah mengundurkan diri. Berikan jabatan Ketua DPR RI kepada kader yang sudah berpengalaman. Tentu saja harus didukung oleh istana.

Dari nama-nama yang beredar, Bambang Soesatyo menjadi salah satu pilihan, karena selain sudah bertemu dengan Jokowi juga banyak media dan koleganya yang menyebutnya sangat pantas dan layak untuk menjadi Ketua DPR RI.

5

Jangan Tinggalkan Novanto

Nasib Setya Novanto diujung tanduk. Jabatan sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar tidak mampu menolong dirinya dari jeratan KPK. Kasus E-KTP yang menyeret Setya Novanto menjadikan dia jadi bulan-bulanan, ledekan, cacian, dan cibiran masyarakat (Hidayati, 2018: 1-6).

Walaupun kasusnya baru saja dilimpahkan ke pengadilan oleh KPK karena sudah P-21, namun Setya Novanto sudah "dianggap" habis. Yang dulu Setya Novanto dengan jabatannya selalu lolos dari jerat hukum, sekarang tidak berdaya, ditahan penegak hukum.

Bukan hanya jadi bulan-bulanan masyarakat, Setya Novanto juga rame-rame ditinggalkan oleh para loyalis dan teman-temannya di Partai Golkar. Ridwan Bae, Adies Kadir dan Roem Kono yang menjadi loyalis Setya Novanto pun meninggalkannya, bahkan menyebrang ke Airlangga calon Ketua Umum Partai Golkar.

Mungkin trio loyalis Setya Novanto tersebut ingin mencari aman. Jika masih loyal dan patuh pada Setya Novanto, maka masa depan trio loyalis Setya Novanto tersebut di Partai Golkar akan tergusur.

Tidak hanya trio tersebut yang meninggalkan Setya Novanto yang hampir dan dipastikan akan karam. Namun senior, pimpinan, Ketua DPD I, dan kader Partai Golkar juga meminta secepatnya untuk dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Bahkan para Ketua DPD I bergerak cepat bertemu dengan Jokowi dan JK untuk meminta restu agar secepatnya Partai Golkar melakukan Munaslub. Munaslub merupakan jalan terbaik bagi partai beringin jika masih ingin bertahan dalam percaturan politik Indonesia.

Setya Novanto yang awalnya tidak mau mundur pun, saat ini sudah mulai melunak, melalui Ketua DPD I NTT Melki Lakalena, Setya Novanto bahkan berencana akan mengundurkan diri disaat yang tepat. Jadi atau tidaknya Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI, kita tunggu saja.

Namun yang pasti gerakan meninggalkan Setya Novanto berjalan semakin masif. Setya Novanto yang begitu digdaya tak bergutik ditinggalkan oleh loyalis dan kader-kadernya.

Memang tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Partai Golkar selain Munaslub. Munaslublah cara efektif dan terbaik

untuk mencari pemimpin baru Partai Golkar yang mempu me-*recovery* Partai Golkar dari keterpurukan menjadi kebangkitan. Dari kelemahan menjadi kekuatan. Dari kehancuran menjadi kemenangan. Dari kegalauan dan kegundahan menjadi kedahsyatan. Dari perlambatan menjadi percepatan. Dari pecundang menjadi pemenang. Dan dari kebencian menjadi kecintaan sehingga Partai Golkar terselamatkan.

Membaca politik Indonesia memang menggemaskan. Betapa tidak. Partai Golkar yang begitu digdaya tak berdaya dan takluk ditangan penguasa. Bukan tidak boleh meminta restu kepada penguasa. Namun sebagai partai besar, sikap meminta restu mencerminkan bahwa kader-kader Partai Golkar kurang percaya diri. Sebagai partai besar, Golkar harus percaya diri dan mampu membangun optimisme. Tidak tunduk pada penguasa. Yang bisa dilakukan adalah bersinergi dengan penguasa. Mendukung yang baik apa yang dilakukan pemerintah dan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

Politik sejatinya bukanlah hanya untuk mengamankan diri dan berlindung kepada penguasa. Dan bukan juga hanya mengamankan diri dan kelompok dari tekanan penguasa. Politik sejatinya mendukung dan menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran harus ditegakkan (Nugroho: 2017). Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: "Kullil Haqqo Walau Kaana Murron", katakanlah yang hak walaupun pahit. Jadi jangan takut tersandra lalu kita menjilat. Jangan takut dipenjara karena berkasus. Jangan takut berhadap-hadapan dengan penguasa jika kita benar. Jangan takut dan malu meminta maaf jika kita salah. Dan jangan pernah takut jika kita benar.

Ada istilah tidak baik dalam kosa kata politik kita, "tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan", istilah

ini harus kita tinggalkan. Walaupun memang kenyataannya istilah tersebut nyata dan terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Contoh nyata terjadi di partai beringin. Loyalis, pimpinan, senior, dan kader-kader Partai Golkar rame-rame meninggalkan Setya Novanto dalam keadaan terjerat kasus hukum. Bahkan ketika Setya Novanto ditahan tidak ada loyalis dan kader-kader Partai Golkar yang menemani dan mendampinginya dari rumah sakit menuju tahanan KPK. Ketika senang bersama, namun ketika susah berbeda bahkan menjauh dan meninggalkannya.

Baiknya Setya Novanto tidak ditinggal sendirian. Partai Golkar harus memberi bantuan hukum kepada Setya Novanto. Siapapun nanti yang terpilih menjadi ketua umum dalam Munaslub yang akan datang harus memberi perhatian kepada Setya Novanto. Bagaimana pun jasa Setya Novanto besar terhadap Partai Golkar. Salah satunya adalah pembangunan gedung baru kantor DPP Partai Golkar di Slipi. Setya Novantolah yang bisa membangun kantor tersebut.

Kasus hukum yang membelit Setya Novanto jangan sampai memunculkan masalah baru. Kita tidak tahu apakah aliran dana E-KTP masuk ke Partai Golkar atau tidak. Yang tahu hanya Tuhan dan Setya Novanto. Masalah baru akan muncul jika Setya Novanto berbicara dan bisa membuktikan bahwa aliran dana e-ktp masuk ke Partai Golkar. Partai Golkar bisa dibubarkan.

Oleh karena itu, Setya Novanto harus ditemani dan diberi bantuan hukum oleh DPP Partai Golkar. Jangan sampai dibiarkan sendirian. Karena bisa saja dia akan membuka aliran dana E-KTP.

Saatnya Partai Golkar bangkit. Jika tidak sekarang kapan lagi. Dan jika bukan kader Golkar siapa lagi yang akan membawa kebangkitan. Apakah Airlangga yang digadang-gadang oleh istana

dan senior, pimpinan, dan kader Partai Golkar akan membawa kebangkitan Partai Golkar. Hanya waktu yang akan menjawabnya. Airlangga yang dianggap bersih dan belum pernah terlibat kasus hukum apakah akan mampu membawa Partai Golkar menang di Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019 ataukah Airlangga akan mengalami nasib yang sama dengan Setya Novanto. Karena seperti yang kita tahu. Tak ada pejabat yang betul-betul bersih. Jika kita cari-cari bolongnya pasti akan ketemu. Begitu juga dengan Airlangga, jika dicari kasusnya pasti akan ketemu. Dan nama Airlangga pernah disebut-sebut masuk dalam Panama Papers.

Semoga Munaslub menjadi jalan terindah dan terbaik untuk kebangkitan Partai Golkar. Partai Golkar hanya akan bangkit jika senior, pimpinan dan kadernya bersatu. Bersatu demi masa depan partai yang lebih baik. Bersatu demi Partai Golkar yang jaya dan bermartabat. Bersatu dalam menciptakan kader-kader terbaik untuk mengisi jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif. Bersatu dalam menjaga bangsa Indonesia. Dan bersatu demi menjaga keutuhan partai yang sempat terkoyak.

6

Jalan Tengah Selamatkan Golkar

Setya Novanto sang ketua umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI sudah resmi ditahan KPK.

Setya Novanto dan Partai Golkar pun habis-habisan dibully oleh masyarakat melalui media sosial. Karena sebelum ditahan KPK Setya Novanto diduga melakukan drama untuk menghindar dari proses hukum dengan cara mobil yang ditumpanginya menabrak tiang lampu.

Tanpa menunggu waktu lama, setelah Setya Novanto dianggap cukup sehat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), KPK bergerak cepat menahan Setya Novanto.

Jabatan Setya Novanto pun dipertaruhkan. Ada yang memintanya untuk mundur dari Ketua DPR RI dan juga ada yang menginginkannya untuk turun dari kursi ketua umum Partai Golkar.

Setya Novanto bukan anak kemarin sore di dunia politik. Walau pun desakan kepada dirinya sangat kencang untuk mundur dari jabatan Ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar, Setya Novanto tidak bergeming (Reyhansyah: 2018: 5-7).

Partai Golkar pun bertindak cepat dengan mengelar rapat pleno. Rapat pleno DPP Golkar tidak menghasilkan terobosan yang dapat membawa Golkar cepat keluar dari kemelut karena ketua umumnya menjadi tersangka dan ditahan KPK.

Namun bisa saja keputusan pleno tersebut merupakan jalan tengah untuk keluar dari permasalahan yang mendera. Di tengah ramainya perdebatan untuk mengganti Setya Novanto, keluarlah dua surat sakti dari Setya Novanto.

Dua surat sakti Setya Novanto sudah cukup bagi Partai Golkar untuk menyelesaikan perdebatan dalam pleno. Surat sakti pertama berisi bahwa Setya Novanto telah menunjuk Idrus Marham sekretaris jenderal Partai Golkar untuk menjadi Plt. Dan surat sakti kedua, Setya Novanto meminta posisi Ketua DPR RI untuk dikosongkan hingga kasus yang menimpa dirinya inkrah. Dua surat sakti Setya Novanto tersebut terbukti sakti.

Karena dapat menyelesaikan sementara perdebatan kader Golkar di rapat pleno dan membuat Mahkamah Kehomatan Dewan (MKD) mandul. Berlandaskan surat sakti dari Setya Novanto dan berdasarkan pertimbangan lainnya.

Akhirnya rapat pleno DPP Golkar, tanggal 21 November 2017 memutuskan: Pertama, rapat pleno DPP Partai Golkar

menyetujui Saudara Idrus Marham sebagai plt (pelaksana tugas) ketua umum DPP Partai Golkar, sampai dengan ada keputusan pra-pradilan.

Kedua, apabila Setya Novanto menang pra-pradilan, maka jabatan Plt ketua umum berakhir dan posisi ketua umum dikembalikan kepada Setya Novanto.

Ketiga, apabila Setya Novanto kalah dalam pra-pradilan, maka Plt ketua umum dan rapat pleno DPP Partai Golkar meminta agar Setya Novanto mundur dari posisi ketua umum Partai Golkar. Dan apabila Setya Novanto tidak mundur, maka DPP Partai Golkar akan melaksanakan Munaslub.

Keempat, Plt ketua umum dalam menjalankan/mengambil kebijakan strategis partai Golkar harus berkonsultasi dengan ketua harian DPP Partai Golkar dan Bendahara DPP Partai Golkar.

Kelima, terkait posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR RI,menunggu sampai dengan adanya keputusan pra-pradilan.

Para jurnalis, pengamat, dan masyarakat pun kecele dengan hasil keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar tersebut.

Namun apapun keputusannya harus kita hargai. Dan itu bagian dari cara Partai Golkar dalam berdemokrasi dan menyelesaikan masalah sendiri.

Namun yang kita sayangkan, momentum rapat pleno tersebut tidak dijadikan momentum untuk perubahan. Padahal kader-kader Partai Golkar adalah orang-orang yang sudah teruji dan berpengalaman. Banyak yang mampu dan mumpuni untuk menggantikan Setya Novanto, namun mereka tidak berkutik dengan surat sakti Setya Novanto tersebut.

Setya Novanto sering dan telah teruji kesaktiannya. Bahkan pada tanggal 29 September 2017 masyarakat Indonesia

menjuluki sebagai hari kesaktian Setya Novanto. Karena Setya Novanto mampu memenangkan pra-pradilan melawan KPK dan menjadikan dirinya bebas dari status tersangka.

Namun pada tanggal 31 Oktober 2017 KPK kembali menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Dan KPK bergerak cepat menahannya. Bahkan sebelum penahan terjadi. KPK sempat menggeladah rumahnya, menjemput paksa, bahkan menjadikan Setya Novanto masuk pada DPO (Daftar Pencarian Orang).

Kesaktian Setya Novanto kembali diuji, akankah dia mampu lolos ataukah terjerat masuk bui mengikuti jejak terpidana kasus E-KTP yang sudah divonis oleh pengadilan.

Drama Setya Novanto akan terus bergulir. Putusan pra-pradilan akhir November ini akan menjadi jalan apakah Setya Novanto bebas atau masuk bui.

Apapun drama yang terjadi pada Setya Novanto kita harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Kita harus tetap menghargai hak-hak tersangka.

Dan sebelum ada keputusan pengadilan yang final dan mengikat kita tidak boleh menghakimi seseorang bersalah. Biarkan proses hukum berjalan. Dan mari kita kawal kasus hukum Setya Novanto agar berjalan fair dan adil.

Di negara ini tidak boleh ada orang yang kebal hukum. Siapapun yang terlibat korupsi harus diusut meski melibatkan orang kuat. Setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Dan hukum tidak boleh dipermainkan.

Sudah saatnya bangsa ini berubah. Sudah saatnya yang terlibat korupsi harus diberangus. Karena salah satu faktor kehancuran negeri ini karena korupsi. Tidak boleh ada toleransi bagi pelaku

korupsi. Apalagi ingin meminta perlindungan pada Presiden dan Kapolri.

Untuk memberantas korupsi. Bukan hanya penegakkan hukum yang konsisten dan pandang bulu tetapi juga harus menumbuhkan budaya malu. Malu jika korupsi. Malu jika disebut-sebut dalam kasus korupsi. Malu jika terlibat korupsi.

Di negara yang peradabannya tinggi seperti Jepang, pejabat yang baru disebut dalam kasus korupsi, ingat baru disebut dalam kasus korupsi sudah mengundurkan diri dari jabatannya.

Nah, di kita tidak. Di negara yang indah ini pejabat yang sudah jadi tersangka dan ditahan oleh penegak hukum pun enggan mundur. Rasulullah Saw bersabda: Alahya minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi jika kita masih memiliki rasa malu, kita termasuk golongan orang yang beriman.

BAB 2

SPIRIT NASIONALISME DAN KETELADANAN

7

Selamat Milad Akurat.co

Tak terasa artikel ini merupakan tulisan saya yang ke-16 di Akurat.co. Dan ditulisan artikel opini ini khusus saya tulis untuk menghormati Akurat.co yang akan berulang tahun ke-1 pada tanggal 2 Desember 2017. Semoga diusia perdana tersebut Akurat.co makin jaya, bersinar, objektif, konstruktif, dan dapat mencerdaskan rakyat Indonesia. Insya Allah dengan usaha dan kerja keras pada usia yang ke-2 tahun 2018 nanti Akurat.co menjadi media terbesar di Indonesia.

Suatu kebanggaan bagi saya bisa mengisi kolom opini mingguan di Akurat.co. Setiap hari Kamis, sejak 17 Agustus 2017

saya menulis artikel opini dengan judul mencintai Indonesia. Dan tidak terasa sudah hampir empat bulan saya sudah menulis 16 artikel. Awalnya saya bingung untuk menulis di Akurat.co karena kesibukan yang luar biasa. Namun karena Pimred Akurat.co Mas Farid, Wapimred Mas Sunardi, Dinda Iwan, Dinda Andri, dan Dinda Melly meminta untuk menulis akhirnya hati saya luluh dan mengikuti permintaan mereka. Karena saya tahu mereka adalah sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Dan sebuah kehormatan bisa bekerjasama dengan mereka.

Saya yakin Akurat.co akan mejadi media terbesar di Indonesia. Dengan sumber daya manusia yang unggul, pekerja keras, optimis, progressif, dan berpegang teguh pada objektifitas dan kebenaran. Ditambah lagi dengan pemiliknya yang memiliki komitmen untuk membesarkan Akurat.co, maka kebesaran itu hanya tinggal menunggu waktu. Dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. *Nothing is impossible* atau *impossible is nothing.* Tentu menjadikan Akurat.co menjadi media terbesar di Indonesia bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang sulit. Dengan doa dan kerja keras, maka Insya Allah cita-cita tersebut tercapai.

Di era digital seperti saat ini, pilihan untuk memilih bekerja dan berkarya di media online adalah keniscayaan (Perdana, 2019: 75-80). Akurat.co merupakan media online yang menjadi salah satu pilihan rakyat Indonesia untuk membaca berita dan mencari informasi berbagai hal terkait isu-isu nasional dan internasional. Indonesia harus bangga kepada Akurat.co karena telah membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan informasi dan berita-beritanya yang akurat dan terpercaya. Akurat.co harus mampu membawa perubahan bagi rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik.

Media merupakan salah satu pilar demokrasi. Jadi demokrasi akan timpang dan tidak akan berjalan jika medianya diintervensi, diberangus, dan dihancurkan. Media memiliki peran penting untuk menjaga, mengawal, dan memuluskan demokrasi hingga menjadi demokrasi yang berkeadilan. Tidak ada demokrasi jika tidak ada media. Media menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan maju dan mundurnya demokrasi. Kekuatan media sama juga dengan kekuatan demokrasi itu sendiri. Tanpa media demokrasi tak bermakna. Dan tanpa media demokrasi menjadi hambar.

Namun kekuatan media yang begitu besar jangan sampai digunakan untuk kepentingan yang salah. Jangan digunakan untuk kepentingan yang negatif. Jangan digunakan untuk kepentingan memecah-belah masyarakat. Jangan digunakan untuk memukul lawan politik. Jangan digunakan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan digunakan untuk merendahkan orang lain. Jangan digunakan untuk memfitnah. Jangan digunakan untuk melakukan adu domba. Jangan digunakan untuk menghancurkan bangsa. Dan jangan sampai digunakan untuk menggulingkan pemerintahn yang sah.

Akurat.co dan media lainnya memiliki kewajiban untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Memberi informasi yang akurat dan terpercaya. Membangun optimisme. Menyingkirkan pesimisme. Membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjaga perdamaian dunia. Mendukung program-program pemerintah yang baik. Mengkritik kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat. Dan berpihak kepada objektivitas dan kebenaran.

Berjuang bersama Akurat.co memang membanggakan. Betapa tidak, dalam usia yang baru akan menginjak satu tahun sudah ada diperingkat 159 versi Alexa.com. Mengalahkan media-media lainnya yang sudah duluan berdiri. Sebuah pencapaian yang luar biasa dan membanggakan. Saya secara pribadi juga bangga dengan pencapaian Akurat.co tersebut. Sebagai kolumnis tetap di Akurat.co saya merasa bahagia karena Akurat.co dengan konsisten mempublish tulisan-tulisan saya.

Diawali menulis artikel opini di Akurat.co, saya juga diminta untuk menulis di media lainnya. Dan alhamdulillah tulisan-tulisan saya di Akurat.co ditambah tulisan-tulisan dan komentar-komentar saya di media cetak dan online lainnya sudah menghasilkan tiga buku. Mudah-mudahan karya-karya saya menjadi cahaya bagi Indonesia dan dunia. Jadi Akurat.co dan teman-teman di Akurat.co menjadikan saya konsisten dan rajin menulis artikel opini mingguan.

Akurat.co harus menjadi media yang terdepan dalam mendukung dan menciptakan usaha-usaha untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat yang saat ini kondisinya susah dan lapar harus didukung dan diberitakan sehingga mereka tidak susah dan lapar lagi. Sehingga mereka tidak miskin lagi. Sehingga mereka dibantu oleh negara. Sehingga dibantu oleh pengusaha kaya. Sehingga tidak ada lagi atau berkurangnya orang miskin di Indonesia. Dan saya memiliki keyakinan Akurat.co bisa melakukan itu semua.

Akurat.co juga harus membesarkan dan mempromosikan orang-orang muda potensial dari kalangan akdemisi, politisi, pengusaha, LSM, jurnalis, dll untuk menjadi pemimpin Indonesia dimasa yang akan datang. Ini adalah bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki bangsa. Kedepan bangsa ini harus dipimpin oleh

orang-orang muda potensial yang memiliki karakter *siddiq, tablig, amanah,* dan *fathonah*. Tidak berkarakter sebaliknya. Indonesia butuh anak muda yang hebat yang mampu membawa Indonesia yang bermartabat dan disegani oleh negara-negara lain di dunia.

8

Golkar Pasca Novanto

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi tersangka untuk kedua kalinya oleh KPK. Pada penetapan tersangka pertama, Setya Novanto bebas karena memenangkan prapradilan melawan KPK.

Status tersangka Setya Novanto menjadi berita yang hot di negeri ini bahkan sampai ke luar negeri. Saya yang sedang di Saudi Arabia pun membaca dan mendengar kabar penetapan Setya Novanto sebagai tersangka.

Pro kontra mulai bermunculan. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah yang sumbernya dari Setya Novanto berbicara

ke media, bahwa penetapan tersangka Setya Novanto merupakan pesanan dari Presiden dan Wakil Presiden.

Pernyataan Fahri Hamzah tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan fitnah. Dan tentu Setya Novanto dan Fachri Hamzah harus membuka ke publik siapa yang telah memberi info ke Setya Novanto tersebut. Apakah informasi tersebut benar atau tidak.

Di luar itu semua. Status tersangka Setya Novanto akan berimbas ke Partai Golkar. Mungkin saja para loyalis Setya Novanto sedang berusaha untuk mengamankan Setya Novanto dari jeratan hukum. Dan disisi yang lain, lawan politiknya di internal Golkar tentu tidak tinggal diam. Mereka sedang mengatur strategi untuk menggusur Setya Novanto dari ketua umum Partai Golkar. Terlebih-lebih jika Setya Novanto ditahan oleh KPK.

Status tersangka Setya Novanto juga memberatkan Golkar untuk bergerak dan leluasa dalam meraih simpati dan dukungan rakyat guna memenangkan Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019.

Jika Setya Novanto tidak diganti, maka kemungkinan suara Partai Golkar akan turun. Bahkan mungkin bisa saja jeblok. Tentu hal tersebut tidak diinginkan oleh para kader Golkar. Oleh karena itu, penyelematan partai Golkar lebih penting dari penyelamatan Setya Novanto itu sendiri.

Jika seandainya Setya Novanto ditahan KPK, perebutan Ketua Umum di internal Golkar akan panas. Dan pimpinan dan kader Golkar harus bergerak bersama-sama untuk menyelamatkan Partai Golkar dengan cara mencari ketua umum yang tidak berkasus.

Kasus tersangka ketua umum Golkar menyulitkan Golkar untuk berbenah dan menata diri untuk menghadapi tahun politik yang tentu lebih keras dan panas.

Golkar tentu tidak mau seperti dinosaurus yang musnah tertelan jaman. Golkar harus tetap ada dan harus terus berkiprah dan berkarya untuk pembangunan bangsa. Golkar merupakan partai besar yang keberadaannya dibutuhkan oleh bangsa ini.

Oleh karena itu, setiap usaha untuk melemahkan dan menghancurkan Golkar harus dilawan. Dan itu tergantung kepada sesepuh, pimpinan, dan kader Golkar itu sendiri. Apakah mau dihancurkan atau bangkit.

Jika Golkar tidak mau hancur, maka perubahan atau pergantian kepemimpinan adalah keniscayaan. Banyak kader Golkar yang mumpuni untuk menggantikan Setya Novanto.

Akan seperti apakah wajah Golkar ke depan bergantung pada kekompakan kadernya dalam menjaga soliditas dan solidaritas partai. Tahun politik sudah di depan mata, akankah Golkar bertahan ataukah hancur berkeping-keping.

Salah satu faktor yang bisa membuat suara golkar hancur adalah terkait status tersangka Setya Novanto. Dan bahkan tadi malam KPK sudah melakukan gerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap Setya Novanto.

Jika dalam 1x 24 jam Setya Novanto tidak menyerahkan diri, maka secara resmi KPK akan melakukan perburuan terhadap Setya Novanto dan akan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Jika ini sampai terjadi, maka nasib Golkar sedang dipertaruhkan. Karena ketua umumnya sedang dicari dan diburu KPK. Walaupun demikian, kita harus menghormati asas praduga tak bersalah terhadap Setya Novanto hingga kasusnya berkekuatan hukum tetap di pengadilan.

Golkar harus berbenah secepatnya, karena hal itu tidak hanya berdampak pada Pilkada 2018, namun akan berimbas hingga Pileg/Pilpres 2019 nanti.

Status tersangka Setya Novanto dan perburuan KPK terhadapnya akan dimanfaatkan oleh lawan politik Golkar untuk melemahkan partai tersebut pada pertarungan di setiap pemilu. Dengan demikian, implikasinya adalah merosot, hilang, atau bahkan hancurnya suara Golkar.

Citra partai Golkar sedang dipertaruhkan. Tidak ada kata lain selain untuk mempersiapkan kepemimpinan baru di partai berlambang beringin tersebut. Mungkin ada dua skenario yang bisa dilakukan oleh partai Golkar (Mustafa, 2017: 215-220).

Pertama, Golkar bisa melakukan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) untuk pergantian ketua umumnya. Namun skenario Munaslub membutuhkan dana yang besar dan memakan waktu yang cukup lama. Sedangkan tahun 2018 tahapan Pileg dan Pilpres 2019 akan dimulai. Apakah cukup waktu bagi Golkar untuk bangkit kembali, jika pergantian ketua umumnya dilakukan dengan cara Munaslub. Dan apakah bisa ketua umum hasil Munaslub bisa memenangkan Pileg dan Pilpres di 2019.

Skenario kedua yaitu pergantian ketua umum dengan cara menunjuk seseorang untuk dijadikan Pelaksana Tugas (PLT) ketua umum Golkar. Persoalannya adalah siapa orangnya yang pantas dan layak menjadi seorang PLT. Ini saja akan terjadi pertarungan keras di internal Golkar. Karena seperti kita ketahui, Golkar memiliki banyak faksi. Dan masing-masing faksi sama kuatnya. Mencari orang yang tepat untuk dijadikan PLT tidaklah mudah.

Namun juga bukan sesuatu yang sulit. Kader Golkar sudah saatnya untuk berfikir jauh kedepan. Hilangkan ego pribadi dan kelompok. Bangun sikap kebersamaan. Jika tidak, maka Golkar bisa diujung tanduk bahkan bisa masuk jurang.

Baiknya Setya Novanto untuk menyerahkan diri ke KPK. Apapun risikonya harus dihadapi. Jika nanti di pengadilan Setya

Novanto tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, pasti akan bebas juga. Proses hukum harus dihadapi dengan gentlement. Menghindar bukanlah tindakan dari seorang kesatria. Dan kita semua rakyat Indonesia sedang menunggu kesaktian dan kehebatan Setya Novanto. Apakah Setya Novanto akan bebas lagi. Kita tunggu cerita selanjutnya.

9

Mencintai Pahlawan

Jumat, 10 November 2017 kita akan memperingati Hari Pahlawan yang ke-72. Memperingati hari Pahlawan merupakan suatu kewajiban. Bukan hanya untuk berbaris badan melakukan upacara bendera dan mendoakan mereka. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai anak bangsa mampu meniru, mengikuti, dan meneladani semangat juang para Pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia dari serangan musuh.

Jiwa kepahlawanan tidak akan tumbuh jika seseorang atau kelompok orang tidak mencintai rakyat dan negaranya. Kecintaan

kepada rakyat yang tertindas, terusir, miskin, dan terbunuh menjadi pemicu para Pahlawan untuk membantu dan menyelamatkan mereka. Rasa cinta kepada rakyatnya lebih dari rasa cinta kepada diri, keluarga, dan kelompoknya.

Dan kecintaan para Pahlawan kepada negara juga tidak perlu diragukan. Para Pahlawanlah yang berjuang dengan jiwa, raga, dan harta untuk menjaga kedaulatan negara. Seorang Pahlawan tidak mungkin berdiam diri melihat negaranya dijajah. Dan seorang Pahlawan tidak akan rela jika negaranya jatuh ke tangan penjajah.

Perjuangan Bung Tomo dan para Pahlawan lainnya dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Bahwa perjuangan membutuhkan pengorbanan. Berkorban untuk rakyat, bangsa, dan negara. Berkorban untuk sesama. Berkorban jiwa dan raga bahkan harta. Berkorban dengan semua apa yang kita miliki. Mampu kah kita berkorban dengan tulus lahir dan batin untuk berjuang menjaga dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang tercinta. Karena menjaga dan mempertahankan kemerdekaan lebih sulit dari merebut kemerdekaan (Fatmawati, 2015).

Kemerdekaan yang sudah kita peroleh harus diisi dengan sesuatu yang positif, kreatif, inovatif, dan produktif. Jangan diisi dengan hal-hal negatif seperti narkoba, *free sex,* tawuran, iri, dengki, hasad, kekerasan, kecurangan, kebohongan, kemunafikan, kemalasan, saling menghancurkan, jalan pintas, bermewah-mewahan, pemborosan, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hindari dan jauhi hal-hal negatif dan tumbuhkan nilai-nilai positif. Kemerdekaan yang tidak diisi dengan hal-hal positif akan menghancurkan kemerdekaan itu sendiri.

Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang dengan jiwa, raga, dan harta untuk mempertahankan kedaulatan negara. Tetapi kita semua bisa menjadi pahlawan. Karena bagi siapa saja yang memiliki kontribusi besar untuk masyarakat dan negara layak untuk disebut sebagai pahlawan. Orang yang berjuang untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan derajat keluarganya layak juga disebut pahlawan. Paling tidak pahlawan untuk keluarganya.

Begitu juga dengan Ibu/Bapak Guru. Mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Disebut sebagai pahlawan karena bertugas dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Tanpa guru bangsa ini tidak akan maju. Tanpa guru negara ini akan beku. Tanpa guru perjalanan Indonesia akan berliku. Dan tanpa guru kita hanya akan menjadi debu. Tanpa tanda jasa, karena selama ini guru masih belum mendapat perhatian dan penghargaan dari negara.

Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Banting-tulang, siang dan malam. Peluh dan air mata tak terasa. Beban kerja yang berat tak pernah membuat mereka mengeluh. Berjuang untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga dan Indonesia. Disiksa, diperkosa, bahkan dibunuh menjadi taruhan. Merekalah para pahlawan devisa. Pahlawan karena berjuang agar-anak-anaknya di kampung bisa sekolah bahkan kuliah. Pahlawan karena telah berjuang meningkatkan devisa negara. Dan pahlawan karena mereka rela bekerja di luar negeri demi keluarga dan bangsa. Sifat-sifat kepahlawanan ada dan melekat dalam diri kita.

Pahlawan adalah mereka yang membantu orang tua menyebrang jalan raya. Pahlawan adalah mereka yang berjuang untuk keluarga. Pahlawan adalah mereka yang membantu kaum

papa dan dhuafa. Pahlawan adalah mereka yang membantu orang miskin menjadi kaya.

Pahlawan adalah mereka yang mampu mengentaskan kemiskinan di komunitasnya. Pahlawan adalah mereka yang mampu mampu memberantas kebodohan. Pahlawan adalah mereka yang kreatif, inovatif, dan produktif berkarya demi negara. Pahlawan adalah mereka yang berjuang dan bekerja menjaga kedaulatan negara. Dan masih banyak lagi sebutan pahlawan bagi mereka yang berjasa bagi keluarga, masyarakat, dan negara.

Memaknai hari pahlawan harus dengan semangat dan jiwa penuh kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kesederhanaan, keteladanan, kebaikan, keharmonisan, keceriaan, kesetiakawanan, kekerabatan, kebahagiaan, ketulusan, keimanan, keindahan budi pekerti, kelembutan, kasih-sayang, kecintaan, kerukunan, kesatuan, kemudahan, dan optimisme. Di hari pahlawan kita semua masyarakat Indonesia harus ceria dan bahagia. Juga mendoakan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Hargai dan cintai para pahlawan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Karena jasa para pahlawan tak terkira dan tak terbatas sepanjang masa.

Cerita kepahlawanan yang heroik pada pertempuran 10 November 1945 dalam menjaga kedaulatan NKRI di Surabaya harus dijadikan ibroh (pelajaran) bagi kita semua. Bahwa perjuangan untuk menjaga dan mempertahankan negara dilakukan dengan darah dan air mata. Darah dan air mata para syuhada. Darah dan air mata rakyat Indonesia. Darah dan air mata para pahlawan kita. Hal yang sama kita juga harus berjuang dan mempertahankan kedaulatan negara dengan cara bekerja keras dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif.

Para pahlawan akan tersenyum di Surga jika kita selalu mendoakan mereka dan juga meneladani perjuangan dan sikap mereka yang mulia. Dan mereka akan menangis jika kita hanya bisa mengeluh dan hura-hura tanpa menjaga dan mempertahankan apa yang telah mereka perbuat untuk bangsa dan negara. Setiap kita adalah pahlawan. Paling tidak kita adalah pahlawan untuk diri dan keluarga kita. Dan kita juga bisa menjadi pahlawan untuk Indonesia tercinta.

10

Plus Minus 3 Tahun Jokowi-JK

Tiga tahun sudah pemerintahan Jokowi-JK berlangsung. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014 Jokowi-JK menjadi tumpuan dan harapan rakyat Indonesia untuk menuju gerbang kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan waktu yang hanya dua tahun untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Akankah Jokowi-JK menjadi harapan di tahun 2019 nanti. Ataukah jusru rakyat berbalik arah untuk mendukung dan memenangkan capres lain di Pilpres 2019 (Moeldoko, 2019).

Karena apapun alasannya, kinerja pemerintah Jokowi-JK akan menjadi bahan pertimbangan bagi rakyat utuk memilih

kembali Sang Presiden ataukah akan mengecamnya. Kinerja baik pemerintah tentu akan memuluskan Sang Presiden untuk mempertahankan singgasananya di 2019. Dan bahkan mungkin saja akan terpilih kembali.

Namun sebaliknya, jika berkinerja buruk, maka sulit bagi Sang Presiden untuk kembali menang pada kontestasi politik akbar 2019 yang akan datang. Kinerja menjadi salah satu penentu kemenangan Sang Presiden.

Rakyat sedang menunggu hasil karya Jokowi-JK untuk bangsa ini. Rakyat tentu tidak akan tinggal diam jika keadaannya makin sulit dan terjepit. Sebagai pemilik mandat kekuasaan, rakyat bisa saja mencabut kekuasaan yang telah diberikannya kepada Sang penguasa. Tentu itupun jika penguasa tersebut berbuat dzolim dan melukai rakyatnya sendiri.

Hal yang sebaliknya bisa juga terjadi. Jika rakyat merasa puas, terayomi, terpenuhi kebutuhan hidupnya, mudah mencari kerja, pendidikan dan kesehatan murah bahkan gratis, ekonomi baik, politik stabil, keamanan terjaga, bisa saja menjadikan penguasa tersebut makin kuat karena dicintai rakyatnya.

Pembangunan infrakstruktur di masa Jokowi-JK memang menjanjikan. MRT, LRT, jalan tol lintas Sumatera, rel kereta Sulawesi, pembangunan trans Papua, pembangunan 35 ribu megawatt dan lain-lain merupakan program Jokowi-JK yang membanggakan. Walau dibiayai dari hasil pajak dan hutang, namun pembangunannya berjalan dengan cepat.

Pembangunan infrastruktur memang tidak bisa dirasakan dalam jangka pendek. Tetapi akan terasa dimasa yang akan datang. Memang tidak salah membangun infrastruktur. Tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan yang lainnya.

Visi membangun infrastruktur yang terukur merupakan visi yang bagus. Seperti dikatakan Franklin D. Roosevelt bahwa bangsa yang tidak punya visi akan musnah. Musnah karena tidak jelas akan dibawa kemana bangsa tersebut. Bangsa Indonesia membutuhkan tindakan nyata dari para pemimpinnya, maka bertindaklah sekarang untuk membangun masa depan bangsa. Tindakan membangun infrastruktur merupakan tindakan yang benar untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan infrastruktur yang teratur dan baik, maka masyarakat pun akan menikmati dan merasakan hasil pembangunan.

Tindakan yang harus dilakukan oleh Jokowi-JK yaitu membuka lapangan pekerjaan. Di era 'disruption' meminjam istilah Rhenald Kasali, era yang tidak jelas, dimana banyak toko-toko perbelanjaaan hancur dan gulung tikar. Selain membuka peluang bagi yang kreatif untuk berbisnis berbasis online, namun juga menciptakan pengangguran karena banyaknya PHK.

Tugas utama Jokowi-JK membuat warga bekerja. Dengan bekerja masyarakat akan bahagia karena akan terpenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya bahkan dapat menolong orang lain. Namun jika Jokowi-JK disisa kepemimpinannya tidak mampu membuka kesempatan dan peluang kerja, maka yang terjadi adalah banyak pengangguran. Pengangguran merupakan beban negara. Dan pengangguran juga akan menciptakan kriminalitas.

Komunikasi Jokowi-JK dengan umat Islam juga masih kurang. Disatu sisi umat Islam yang dekat dengan pemerintah dilindungi dan diberi tempat. Namun disisi yang lain, umat Islam yang mengkritik dijinakan bahkan dikriminalisasi. Sebagian ulama dan umat merasa ada yang didzolimi dan dikriminalisasi, maka tidak heran sebagian umat Islam menuduh Jokowi anti ulama dan anti Islam.

Ini tentu tidak sehat. Bagaimana pun antara ulama dan umaro harus bersatu dan bahu membahu membangun bangsa ini. Bangsa ini membutuhkan teladan yang baik dari ulama dan umaro. Begitu juga Jokowi harus berkomunikasi baik dengan seluruh umat Islam. Karena bagaimana pun pemilih terbesar di negeri ini adalah umat Islam. Sangat baik jika ada rekonsiliasi antara umat Islam dengan Jokowi.

Hal mendasar yang harus jadi perhatian pemerintahan Jokowi-JK yaitu kenaikan tarif listrik. Masyarakat Indonesia sangat terpukul dengan kenaikan yang begitu tinggi dan tiba-tiba. Walau tidak di blow up media massa, namun sumpah serapah dari masyarakat yang dirugikan atas kenaikan tarif dasar listrik tersebut tentu akan merugikan pemerintah.

Pemerintah dianggap tidak mau dan tidak mampu melindungi masyarakat dan dianggap pro pemodal. Bisa dibayangkan token listrik pra bayar yang harganya seratus ribu hanya terisi enam puluh lima ribu. Artinya ada yang hilang tiga puluh lima ribu rupiah. Jika tiga puluh lima ribu rupiah dikalikan jutaan kepala keluarga, bisa dibayangkan berapa keuntungan Perusahan Listrik Negara (PLN).

Oleh karena itu tidak heran jika elektabilitas Jokowi tidak mampu menyentuh angka 70 %. Artinya masyarakat banyak yang kecewa dan dirugikan dengan kebijakan Jokowi. Memang Jokowi tidak kehilangan akal.

Salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas dan kecintaan rakyat kepadanya yaitu dengan cara membagi-bagikan sertifikat tanah kepada warga miskin disetiap kunjungan kerja di daerah-daerah. Program pembagian sertifikat tanah tersebut merupakan program pro rakyat yang sangat menguntungkan Jokowi. Dan tentu akan berdampak positif pada dirinya yang akan bertarung kembali menjadi presiden di 2019.

Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Jokowi-JK seperti tingginya harga bahan-bahan pokok yang tidak terkontrol. Bahkan garam pun menjadi komoditas yang tidak bisa dikontrol pemerintah yang berakibat pada mahalnya harga garam. Jumlah pengangguran yang banyak, baik yang terdidik amau pun yang tidak terdidik. Biaya kesehatan yang masih belum terjangkau oleh rakyat miskin. Biaya pendidikan yang masih mahal.

Dan juga kemiskinan yang masih merata dan merajalela. Kemiskinan merupakan akar segala permasalahan. Jika seseorang miskin, maka pola pikir dan tindakannya bisa mengarah kepada hal-hal negatif dan kriminal. Oleh karena itu, Jokowi-JK harus menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun ke depan. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw: *"Kaadal faqru anyakuna kufron",* bahwa kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran.

Memperbanyak kebijakan yang menguntungkan orang miskin harus segera dilakukan oleh Jokowi-JK. Jika tidak, maka masyarakat Indonesia hanya akan menjadi penonton dan kuli di negeri sendiri. Negeri yang *gemah, ripah, loh jinawi* ini pada akhirnya tidak memberi kebahagianan kepada warganya. Untuk itu, mengangkat harkat dan martabat kaum miskin Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan kita semua. Agar seleruh rakyat Indonesia menikmati kekayaan alam yang ada di perut bumi Indonesia.

11

Meneladani Hari Sumpah Pemuda

Pepatah Arab mengatakan *"Syubbaanul yaumi rizaalul ghodi,"* pemuda sekarang adalah pemimpin dimasa yang akan datang. Hal yang sama juga ada istilah dalam bahasa Inggris yang berbunyi *"Student Now, Leader Tomorrow"*, hari ini pemuda/pelajar, besok pemimpin.

Begitu pentingnya sosok pemuda dalam pembangunan dan masa depan suatu bangsa menjadikan pemuda harus mempersiapkan diri untuk menjadi yang terbaik. Agar suatu saat nanti ketika negara membutuhkan sudah siap untuk menjadi pemimpin.

Pemuda hari ini banyak yang kehilangan jati diri. Galau dalam menghadapi masa depan. Tidak siap menghadapi persaingan nasional dan global. Terombang-ambing oleh kehidupan. Terkapar oleh keadaan. Terjerumus kelobang kemaksiatan dan kenistaan. Terpenjara oleh kemalasan. Tergerus oleh jaman. Tercerabut dari kearifan. Terhadang oleh kejumudan. Terperosok dan jatuh oleh perilaku yang serampangan. Tercebur dalam sumur kegelapan. Dan terhina oleh kemiskinan.

Kita sedang membutuhkan pemuda-pemuda yang tangguh. Tidak goyah oleh keadaan. Anti kekerasan. Jauh dari kegundahan. Berkepribadian cemerlang. Cerdas dalam berfikir. Keras dalam bekerja dan berikhtiar. Cinta akan kedamaian. Pelopor dalam perubahan. Inisiator dalam kebaikan. Kuat dalam menghadapi cobaan. Ikhlas dalam beramal. Optimis dalam menghadapi masa depan dan kehidupan. Positif dalam befikir dan bertindak. Mengguncang Indonesia dan dunia. Dan bermanfaat bagi sesama.

Pemuda sejatinya memiliki jiwa kepemimpinan yang unggul. Kewirausahaan yang mumpuni. Keyakinan yang tak tergadaikan. Ke-Indonesiaan yang tak diragukan. Kesetiaan yang tak luntur. Keikhlasan dan ketulusan yang tak berimbal. Mental baja yang tak tergoyahkan. Kesederhanaan yang terpancarkan. Kemuliaan dalam pergaulan. Kecintaan pada tanah air dan Pancasila yang tak terhindarkan. Keunggulan dalam berkarya. Kesabaran dalam menerima ujian. Kebersamaan dalam bekerja dan berteman. Kekuasaan yang tak memberdayakan. Kekayaan yang tak menjerumuskan. Dan kemulian yang menjadi tujuan.

Pemuda Indonesia harus memiliki semangat juang empat lima. Perkembangan teknologi yang begitu cepat memaksa para pemuda harus berfikir cepat, kreatif, inovatif, produktif, terencana

dan yang terbaik. Jika tidak, tentu para pemuda akan tergilas oleh perkembangan jaman yang tak terelakan. Perubahan tak bisa dibendung dan dihentikan. Perubahan hanya bisa diikuti atau ditaklukan. Karena di dunia ini tidak ada yang tidak berubah. Bagi pemuda yang mempersiapkan diri dengan matang akan hidup tenang. Dan bagi pemuda yang malas dan leha-leha akan tergilas oleh keadaan.

Usia muda jangan dilakukan untuk hal-hal yang tak berguna. Apalagi melakukan tindakan pidana dan tercela. Masa muda kata bang Rhoma Irama adalah masa yang berapi-api. Artinya masa yang penuh dengan semangat dan perjuangan. Semangat dalam menjalani kehidupan dan masa depan. Masa muda harus digunakan untuk hal-hal positif dan produktif. Apa yang dilakukan pemuda hari ini akan menentukan masa depannya. Oleh karena itu, melakukan hal-hal yang berguna untuk diri sendiri, orang lain, dan negara harus dilakukan dari sekarang. Masa depan akan menjadi milik pemuda yang mau berjuang dan bekerja keras. Masa depan tidak akan dapat diraih oleh pemuda yang malas dan culas.

Saatnya kepemipinan Indonesia diserahkan kepada kaum pemuda. Kepemimpinan bangsa jangan hanya dipegang atau dikuasai oleh kaum tua. Saatnya yang tua untuk memberi kesempatan kepada kaum muda untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Atau bisa saja kepemimpinan Indonesia merupakan hasil kombinasi dari generasi tua dan muda. Jadi yang tua terwakili dan yang muda juga merasakan menjadi pemimpin di nusantara ini. Namun jika kaum tua tidak memberi kesempatan pada kaum muda, maka yang harus dilakukan kaum muda adalah merebut kekuasaan dari tangan kaum tua dengan cara yang konstitusional.

Bukan asal pemuda yang harus diberi kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Tetapi pemuda yang berprestasi dan

berdedikasi, serta sudah teruji kepemimpinannya di masyarakat. Pemuda yang visioner dan progresif lah yang harus diberi tempat dan kesempatan untuk mengabdi bagi Indonesia. Di tangan pemuda yang hebatlah bangsa ini akan jaya dan sejahtera. Dan ditangan pemuda yang luar biasalah negara ini akan dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Pemuda yang unggul dan prestatif bukan hanya karena bakat alami. Tetapi dididik melalui proses yang panjang. Ditempa dengan kesulitan dan penderitaan. Dilatih kerja keras dan pantang menyerah. Diajarkan kejujuran, ketulusan, kerjasama, optimisme, kreatifitas, kebaikan, kesungguhan, keadilan, kemuliaan, kesantunan, toleransi, kebijaksanaan, kesederhanaan, kesabaran, keuletan, ketekunan, keceriaan, kebahagiaan, menghargai perbedaan, kesetiakawanan, keindahan, keteraturan, ketertiban, dan kemanusiaan.

Pemuda masa kini adalah pemuda yang mampu menghadapi tantangan jaman dan menaklukannya. Trendy, stylish, modern, moderat, charming, milenial, pro perubahan, gesit, cerdik, friendly dan go internasional. Pemuda masa kini juga bukan pemuda yang manja dan berpangku tangan. Bukan pemuda yang kerjaannya menyebarkan proposal kegiatan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi pemuda yang memiliki ide dan gagasan kedepan.

Perjuangan pemuda dimasa lalu harus menginspirasi pemuda masa kini agar selalu berkomitmen menjaga bangsa yang satu bangsa Indonesia, berbahasa yang satu bahasa Indonesia, dan bertanah air satu tanah air Indonesia. Komitmen kepada bangsa, bahasa, dan tanah air meski direalisasikan dalam bentuk kesetiaan kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tugas pemuda masa kini adalah menjaga dan mempertahankan

spirit sumpah pemuda 1928 agar tetap ada. Karena dengan spirit sumpah pemuda Indonesia merdeka (Karyanti, 2010: 99).

12

Spirit Hari Santri Nasional

Pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2017 kita akan memperingati Hari Santri Nasional. Hari yang menjadi kebanggaan bagi seluruh santri di Indonesia. Di mana perjuangan para ulama dan santri dihargai oleh negara dan dijadikan sebagai hari yang istimewa dalam kalender Indonesia. Menjadi santri harus bangga dan harus menjadi kebanggaan Indonesia. Bangga karena predikat santri dihormati oleh pemerintah dan menjadi kebanggaan karena telah memberi kontribusi kepada negara dulu, kini, dan akan datang (Saadah, 2019).

Clifford Geertz dalam bukunya *The Religion of Java* yang diterjemahkan menjadi Abangan, Santri, Priyayi dalam masyarakat Jawa. Masyarakat jawa dikategarosasikan ke dalam tiga golongan, yaitu: santri, abangan, dan priyayi. Santri digunakan untuk mengacu pada orang muslim yang mengamalkan ajaran agama sesuai dengan syariat Islam. Santri bisa juga mengacu kepada orang muslim yang menginap (mondok) di pondok-pesantren untuk menuntut ilmu. Dan gurunya disebut kiyai atau ustad.

Hari Santri yang jatuh pada setiap tanggal 22 Oktober dan akan diperingati setiap tahun merupakan sebuah hari untuk menghargai dan menghormati peran besarpara santri dan para ulama dalam perlawanannya terhadap kolonialisme yang berbarengan dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Dimana KH. Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad yang berbunyi: "Membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu'ain atau wajib bagi setiap orang". Seruan jihad inilah yang menjadi penyemangat kaum santri Surabaya untuk mengusir penjajah dari ibu pertiwi.

Peran ulama (kiyai) dan para santri yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia tidak bisa terbantahkan. Karena besarnya peran tersebut dalam kemerdekaan Indonesia, maka tanggal 22 Oktober dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Dan secara legal pada tahun 2015 pemerintah meresmikan bahwa setiap tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Hari yang menjadi kebanggan bagi para santri dan kebanggan bagi kita semua.

Santri masa kini bukan hanya harus pandai mengaji, tetapi juga harus menguasai tekhnologi. Santi bukan hanya harus mampu membaca kitab kuning (kitab gundul), tetapi juga harus pandai bergaul. Santri bukan hanya harus mampu membaca Al-Qur'an

dan mempraktikkannya, tetapi juga harus mampu menjadi suri tauladan. Santri bukan hanya harus mengerti ilmu agama (akhirat), tetapi juga harus menguasai ilmu dunia. Jadi menjadi santri harus siap guna dan siap pakai.

Perkembangan tekhnologi yang begitu cepat menjadikan santri harus mampu mengikuti perkembangan jaman dengan kemenangan. Menjadi santri harus unggul disegala bidang kehidupan. Santri yang hebat adalah bukan hanya karena ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi juga mampu mewarnai kehidupan dan menjadi sejarah bagi pembangunan bangsa Indonesia dan dunia.

Menjadi santri tidak boleh bermental block. Tetapi harus bermental dan berfikir out of the box, kreatif, inovatif, mandiri, santun, ceria, bahagia, problem solving, win-win solution, bersahaja, setia kawan, pekerja keras, mencintai sesama, rajin ibadah, menguasai ilmu dunia (ekonomi, matematika, fisika, kimia, kedokteran, dll), mengabdi dan berjuang untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Saya juga bangga pernah menjadi santri. Menjadi santri di salah satu pondok-pesantren memang menyenangkan. Selain karena kita dididik untuk menjadi pemimpin ummat, kita juga dididik untuk menjadi pemimpin bangsa. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak pemimpin di negeri ini berasal dari kalangan santri. Menjadi santri juga kita dididik untuk menjadi manusia yang menguasai ilmu dunia dan akhirat.

Pondok-pesantren sebagai tempat santri mengaji dan menuntut ilmu juga menjadi basis pertahanan moral bangsa. Bagainama di pondok-pesantren diajarkan nilai-nilai ke-Islaman dan kemanusian yang luhur. Apa jadinya jika Indonesia tidak

punya pondok-pesantren. Apa jadinya jika Indonesia tidak memiliki santri. Apa jadinya jika Indonesia tidak punya ulama (kiyai). Sungguh bangsa ini akan rusak. Rusak karena tidak ada lagi yang bisa menjaga moral bangsa.

Menjadi santri idaman memang tidak mudah. Namun juga tidak sulit. Santri idaman bukan hanya mereka yang menerapkan Islam dengan benar. Tetapi juga berfikiran maju ke depan. Berakhlak baik, menjadi suri tauladan, membanggakan kedua orang tua, membanggakan agama, bangsa dan negara, dicintai sesama, menjadi lokomotif perubahan, menciptakan lapangan pekerjaan, melahirkan ide-ide cemerlang, membumikan Al-Qur'an, menjaga silaturrahmi, dan juga mengawal dan menjaga Pancasila.

Banyak dari masyarakat yang menginginkan anaknya menjadi santri di pondok-pesantren. Karena pendidikan dan pergaulan di pesantren sangat terjaga. Bahkan biasanya bagi orang tua yang memiliki anak yang nakal, mereka berkeinginan untuk menitipkan anaknya di pondok-pesantren untuk dididik dengan baik. Pesantren dapat menjadi bengkel perubahan dari anak-anak yang kurang baik atau nakal menjadi baik. Yang tidak sopan berubah menjadi sopan. Yang terkenal narkoba menjadi sembuh. Yang malas menjadi rajin dan mandiri.

Trend masyarakat yang ingin menitipkan anaknya di pondok-pesantren untuk menjadi santri sangat tinggi. Selain karena pesantren yang sudah terpercaya dalam mencetak pemimpin bangsa. Tetapi juga pergaulan di luar pesantren sangat membahayakan bagi perkembangan dan masa depan anak-anak Indonesia. Banyak anak kecil yang sudah merokok, pergaulan bebas, ketergantungan kepada obat-obat terlarang, minum-minuman keras, berjudi, tawuran, kenakalan remaja, menonton

video yang seharusnya tidak ditonton, melawan orang tua, tidak mengaji, menganggur dan bermalas-malasan, meminta-minta, dan hal-hal negatif lainnya yang bisa menghancurkan masa depan anak bangsa.

Sungguh beruntung mereka yang pernah dan sedang menjadi santri. Karena menjadi santri adalah kebanggan. Kebanggan karena dapat menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kebanggaan karena dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Kebanggan karena santri tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan kebanggaan karena santri diakui oleh negara.

BAB 3

KORUPSI YANG MERAJALELA DAN MENGGEJALA

13

Lagi-lagi OTT

Operasi Tangkap Tangan (OTT) kali ini menyasar Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Aditya Anugrah Moha dan Sudiwardono, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Celakanya Moha diduga menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawasi Utara tersebut demi untuk menolong Ibunya Marlina Moha yang sedang tersandung perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang sudah divonis 5 tahun penjara. Sebagai anak mungkin Moha sangat sayang kepada ibunya dan ingin meringankan bahkan berusaha untuk membebaskan ibundanya dari jeratan hukum. Namun apa yang

terjadi, demi ibu yang melahirkan, membesarkan, dan menjadikan dirinya ke pentas nasional menjadi anggota DPR RI, malah dia sendiri yang terpeleset (Hikmawati, 2018).

Saya mengenal Moha ketika saya masih mengabdi di DPR RI. Dia merupakan anggota DPR RI yang rajin dan baik. Tak disangka nasib menghantarkannya kejeruji penjara. Sebagai anggota DPR RI yang masih muda, Moha sudah menunjukkan kinerjanya dengan baik. Dan bahkan tidak terdengar riak-riak kasus hukum yang menerpa dirinya. Namun saya terkejut mendengar kabar Moha tertangkap tangan oleh KPK sedang menyuap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. Saya sungguh tak percaya. Karena Moha yang saya kenal adalah Moha muda yang gaul, rajin, cerdas, juga bersahaja. Namun memang perbuatan menyuap kategori pidana yang tidak diperbolehkan, yang masuk kategori tindak pidana korupsi.

Hukum tetap hukum. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh mentolerir sekecil apapun perbuatan korupsi. Hukum harus ditegakkan walaupun dunia akan kiamat. Kasus yang menerpa Moha harus menjadi cerminan bagi kita semua. Bahwa niat baik dilakukan dengan cara yang tidak baik hasilnya tidak baik. Moha memang berniat baik untuk menyelematkan ibunya dari jerat hukum, ketika dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Dan saya berdoa semoga Moha diberi ketabahan dan kesabaran dalam menjalani hari-hari di jeruji besi. Saya sangat prihatin, karena anak muda potensial dan berbakat seperti Moha harus terjerat masalah hukum.

Apakah sistem hukum kita sudah sebegitu bobrok dan parahnya. Apakah masih terjadi jual beli perkara di pengadilan.

Apakah masih ada mafia peradilan di Indonesia. Apakah seseorang harus menyuap untuk membebaskan ibunya dari jeratan hukum. Apakah Indonesia ini masuk kategori darurat korupsi. Apakah korupsi sudah menjadi budaya. Apakah sistem hukum kita masih bisa dipermainkan. Apakah kita tidak malu dengan label bahwa kita termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas mari kita berkaca kepada diri sendiri. Apakah kita bisa bebas dari korupsi.

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang harusnya menjadi teladan dan contoh malah melakukan perbuatan tercela dengan menerima suap. Dan ini meruntuhkan wibawa pengadilan. Di mana yang seharusnya pengadilan menjadi tempat masyarakat untuk mendapatkan keadilan malah dijadikan tempat yang tidak terpuji dengan cara menerima uang haram dari pihak yang berperkara. Kasus OTT ini harus menjadi contoh bagi kita semua. Bahwa memberi dan menerima suap apapun bentuknya tidak diperbolehkan. Terlebih-lebih terjadi pada penyelenggara negara yang harusnya bertugas melayani masyarakat.

Yang lebih hebat lagi. Kasus OTT KPK menyasar dan menjerat kader-kader Golkar, baik di eksekutif maupun legislatif, di pusat dan di daerah. Apakah suatu kebetulan atau tidak, kader-kader partai Golkar yang terkena OTT. Bahkan sudah 7 kader Golkar dalam sebulan ini yang terkena OTT. Ataukah kader Golkar sedang merasa bingung dan galau karena terlalu lama berkuasa sehingga terlalu banyak masalah yang melilit sehingga terkena OTT. Ataukah sistem pengkaderan di Golkar tidak berjalan. Sehingga kader yang berduit diutamakan dan menggeser kader yang kere. Jika sistem setor-menyetor di partai politik tidak dihentikan, maka jangan heran suatu saat nanti para kader Golkar banyak yang masuk bui.

Dan saya meyakini. Banyak kader Golkar yang bersih. Dan harus diberi ruang untuk tampil dan menjadi pimpinan di eksekutif atau legislatif. Ketika eksekutif atau legislatif dipimpin oleh kader yang bersih dan tidak terlibat KKN, maka eskalasi korupsi akan berkurang dikedua lembaga tersebut. Jadi mari kita dorong kader muda potensial di semua partai politik untuk memegang jabatan-jabatan strategis di negeri ini. Terlalu berbahaya jika jabatan dipegang oleh kader busuk. Karena komitmen kepartaian dan ke-Indonesiaannya diragukan. Apa yang dilakukannya demi uang dan kekuasaan. Dan cara apapun pasti dilakukan. Tentu ini bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila yang kita anut.

Sebulan 7 kader adalah sesuatu yang memalukan. Dan jika ini masih terus terjadi menyasar seluruh pejabat di pusat dan di daerah. Di eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, mau dibawa kemana bangsa ini. Mau diapakan bangsa ini. Karena pejabatnya (pemimpinnya) berlaku dan bertindak korup. Padahal korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Dan siapapun yang melakukannya harus ditindak dengan tegas.

Bangsa ini harus memberi ruang kepada orang-orang baik untuk menjadi pemimpin. Demokrasi yang kita anut belum memberi ruang kepada orang baik untuk menjadi pejabat. Jabatan banyak diisi oleh orang-orang yang berduit. Siapa yang bisa memberi setoran dialah yang akan naik jabatan. Siapa yang memberi upeti dialah yang akan naik tinggi. Jika ini yang terjadi jangan salahkan jika Indonesia akan dikuasai oleh para bandit. Bandit bekerja secara samar, gelap, licik, culas, dan menghalalkan segala cara. Dan bekerja hanya untuk diri dan kelompoknya. Bukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Agar bangsa ini tidak dikuasai oleh para bandit. Mari kita dorong pemerintah, DPR RI, KPK untuk bergerak bersama

mengatasi segala bentuk kecurangan di negeri ini. Bagi siapa yang curang harus dibuang. Dan bagi siapa yang jujur dia diangkat. Bangsa ini perlu perubahan. Perubahan dalam penegakkan hukum. Sasar semua yang terlibat korupsi dan bawa ke pengadilan. Dan pengadilan jangan dijadikan arena permainan, tetapi jadikan arena untuk menegakkan keadilan.

14

Gundah Gulana Kader Beringin

Pimpinan dan kader Partai Golkar sedang gundah gulana. Betapa tidak, partai yang sangat digdaya pada masa Orde Baru, saat ini para kadernya sedang mengalami kegalauan yang luar biasa. Partai Golkar mengalami penurunan elektabilitas karena kasus yang menerpa Ketua Umumnya Setya Novanto (Ghofur, 2017).

Sejak Setya Novanto dicekal dan dijadikan tersangka oleh KPK dan kader lainnya juga disebut-sebut terlibat kasus e-KTP, Partai Golkar sulit mendapat simpati dan dukungan rakyat. Walau pun berstatus tersangka, namun Setya Novanto enggan

dan tidak mau mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI. Setya Novanto berkeyakinan bahwa dia akan bebas dari kasus hukumnya melalui praperadilan. Dan memang, Setya Novanto akhirnya dinyatakan menang dalam praperadilan melawan KPK di PN Jakarta Selatan.

Tensi politik di Golkar makin panas, beberapa kader Golkar seperti Yorrys Raweyai dan Ahmad Doli Kurnia CS dengan keras meminta Setya Novanto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Mereka beralasan untuk menjaga marwah partai dan untuk meningkatkan elektabilitas partai tidak boleh Golkar dipimpin oleh orang yang berkasus apalagi tersangka.

Ditingkat elit, pimpinan Golkar yang dimotori oleh Nurdin Halid, Idrus Marham, dan Kahar Muzakir berdasarkan hasil pleno meminta Setya Novanto untuk menunjuk pelaksana tugas (PLT) Ketua Umum Golkar. Tentu Novanto tidak mau dan tidak akan menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain. Terlebih-lebih dia menang di praperadilan yang artinya Setya Novanto dibebaskan dari status tersangkanya.

Sebelumnya juga Golkar digoncang prahara. Ribuan kader Golkar Kabupaten Bandung mengembalikan kartu anggota partai sebagai bentuk protes munculnya surat rekomendasi DPP Partai Golkar kepada pasangan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Surat 'bodong' ini bertentangan dengan keinginan kader yang ingin Dedi Mulyadi, Ketua DPD Golkar Jawa Barat menjadi calon Gubernur Jabar dari Partai Golkar.

Bahkan kader partai Golkar Jawa Barat melakukan demonstrasi di DPP Partai Golkar sebagai bentuk dukungan kepada Dedi Mulyadi agar direkomendasikan menjadi calon

gubernur Jawa Barat. Gejala ini menandakan ada yang tidak beres di internal partai Golkar. Perseteruan internal di Golkar harus diselesaikan, jika tidak Golkar akan tertinggal. Dan sebagai partai yang memiliki sejarah panjang di Indonesia, Golkar sudah terbiasa berkonflik dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara elegen.

Rekomendasi DPP Partai Golkar kepada Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien (meskipun sudah dinyatakan bodong), tentunya akan menjadi persoalan dan merusak kaderisasi di internal Partai Golkar. Bagi kader yang sudah berjuang dari bawah seperti Dedi Mulyadi, dari anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dia lakoni, menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati dua periode ditambah lagi sedang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat tidak dihargai sebagai perjuangan kader untuk membesarkan partai. Malah justru yang direkomendasikan yaitu Ridwan Kamil yang bukan kader dan tidak ada kontribusinya kepada Golkar dicalonkan Golkar sebagai calon gubernur Jawa Barat. Jika pola ini dilakukan, maka sangat bernahaya dan menjadi blunder politik bagi Partai Golkar. Dan jika ini menggejala, maka proses kaderisasi di partai politik akan mati. Dan juga memberi ruang bagi yang punya uang untuk membeli rekomendasi.

Belum lagi permintaan mahar sebesar 10 Milyar kepada Dedi Mulyadi oleh oknum kader Partai Golkar agar bisa direkomendasikan menjadi Calon Gubernur Jawa Barat. Ini sama saja meminta calon gubernur untuk melakukan korupsi jika terpilih nanti. Karena dipaksa untuk mengembalikan uang mahar tersebut. Mahar di politik memang ada dan terjadi. Dan tarif mahar berbeda-beda tergantung daerah dan partai politik yang merekomendasikannya. Mahar di daerah yang kaya sumber daya

alam akan lebih besar dengan daerah yang miskin. Dan mahar untuk mendapatkan rekomendasi dari partai besar akan lebih tinggi dari partai yang kelas menengah atau kecil.

Agar mahar yang mahal untuk membeli rekomendasi kepada partai politik tidak menjadi gejala nasional, maka Dedi Mulyadi harus mengungkap ke publik siapa yang meminta mahar tersebut. Karena jika tidak dibuka, maka akan menjadi permasalahan akut di negeri ini. Uang akan menjadi faktor penentu dalam mendapatkan rekomendasi dari partai politik. Mungkinkah Golkar atau partai politik lain menghindari mahar politik.

Sistem mahar yang mahal tersebut menjadi persoalan bagi calon kepala daerah. Karena tidak semua calon memiliki uang dan tentu hanya orang-orang yang memiliki modal besar atau di *back up* para pengusahalah yang akan bisa menjadi calon kepala daerah. Ini sangat berbahaya, karena akan menyuburkan korupsi dan menutup peluang bagi kader potensial yang memiliki kecakapan dalam memimpin dan berintegritas untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Jika semua calon kepala daerah membayar mahar mahal kepada partai politik untuk mendapatkan surat rekomendasi pencalonan untuk apa *money politic*s dilarang. Money politics dilarang, tapi tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Money politics dilarang namun banyak orang melakukan.

Demokrasi memberi ruang kepada setiap orang untuk dapat memilih dan dipilih. Persoalannya kemudian demokrasi juga memberi ruang kepada setiap orang untuk berkompetisi. Nah dalam kompetisi Pilkada, orang yang memiliki modal besarlah yang kemungkinan akan memenangkan kompetisi. Dan dalam demokrasi orang yang tidak jelas dan tidak punya kemampuan pun bisa terpilih menjadi pemimpin.

Gejolak Golkar pasca putusan praperadilan yang memenangkan Novanto pun tidak surut. Karena para kader Golkar masih galau terhadap kondisi partai golkar yang sudah tersalip oleh partai lain. Dan galau terhadap kasus yang menerpa kader-kader partai Golkar di DPR RI yang disebut-sebut menerima uang korupsi E-KTP. Juga galau karena beberapa kepala daerah dari Golkar di tangkap KPK. Seperti Gubernur Bengkulu, Wali Kota Tegal, Wali Kota Cilegon, dan Bupati Kutai Kertanegara.

Penangkapan kepala daerah dari Golkar tersebut sangat memprihatinkan karena menjadi bagian ujung tombak partai. Karena selain menjadi kepala daerah, mereka juga mereka juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar di wilayahnya masing-masing. Ini harus menjadi peringatan partai Golkar agar waspada dan siap untuk bertarung di Pilkada serentak 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019.

Babak baru di Golkar pun akan dimulai. Dengan digantinya Yorrys Raweyai dari posisi Korbid Polhukam oleh Letjen (purn) Eko Widyamoko dan dengan dilaporkannya Yorrys Raweyai dan Ahmad Dolli Kurnia ke polisi oleh kader AMPG, karena dianggap mencemarkan nama baik Setya Novanto. Akan kah Golkar dapat menyelesaikannya permasalahan dengan apik ataukah akan akan terperosok lebih dalam yang akan berimbas pada kegundahan para kadernya. Kader Golkar masih galau karena KPK memperpanjang status cekal Novanto untuk enam bulan kedepan. Akankah Golkar bangkit ataukah akan terperosok dalam kubang kemerosotan dan kehancuran. Kita tunggu saja drama selanjutnya.

15

Tahun Baru dan Tahun Politik

Tahun 2017 akan berakhir. Semua warna kehidupan, baik suka maupun duka juga akan hilang ditelan oleh waktu dan zaman. Esok hari kita akan memasuki tahun baru 2018. Tahun yang penuh dengan tantangan dan harapan. Karena selain kita harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi tahun 2018, kita juga dihadapkan dengan tahun politik. Dimana ditahun 2018 seluruh rakyat Indonesia akan sibuk dengan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah. Dan memasuki tahapan Pileg dan Pilpres serentak 2019.

Rakyat berharap ditahun politik 2018 dan 2019 nasibnya mengalami perubahan. Jika Pilkada, Pileg, dan Pilpres dilaksanakan secara periodik setiap lima tahunan, tetapi nasib rakyat tidak berubah, maka ada yang salah dalam sistem politik kita. Sejatinya Pilkada, Pileg, dan Pilpres harus dijadikan sebagai momentum untuk perubahan nasib rakyat Indonesia. Karena dalam kontestasi ketiga pesta demokrasi tersebut terbesit harapan melahirkan pemimpin daerah, anggota DPR, dan Presiden yang peduli akan nasib kaum miskin dan tertindas.

Rakyat Indonesia sedang harap-harap cemas menghadapi tahun baru dan tahun politik. Pesta demokrasi lima tahunan (Pilkada, Pileg, dan Pilpres) harusnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, visioner, berjuang bersama rakyat, menjadi suri tauladan, mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan pemimpin yang ingin dilayani, koruptif, menghalalkan segala cara, pembela pengusaha hitam, elitis dan berjarak dengan yang dipimpinnya, merasa hebat, dan tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang amanah.

Di tahun 2017 pula banyak kepala daerah yang tertangkap tangan (OTT) oleh KPK. Apakah ditahun 2018 yang akan datang jumlahnya makin banyak atau berkurang. Hanya sang waktu yang akan bisa menjawabnya. Perilaku koruptif kepala daerah merupakan cerminan bobroknya mental pejabat di daerah. Amanah yang diberikan rakyat kepadanya dijadikan kesempatan untuk mengeruk kekayaan yang seharusnya kekayaan daerah tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Tahun politik 2018 dan 2019 harus dijadikan sebagai momentum untuk perbaikan daerah dan Indonesia. Jika salah

dalam memilih pemimpim, maka rakyat juga yang akan menerima akibatnya. Hanya dengan memilih pemimpin yang bersihlah kita akan mencapai kejayaan dan kehebatan. Pemimpin yang bersih akan mampu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya. Pemimpin yang bersih juga akan membawa kebangkitan dan kejayaan daerah dan Indonesia (Muchthar, 2018).

Mari kita tinggalkan dan jangan memilih calon kepala daerah, anggota DPR, dan Presiden yang terlibat kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dan juga bermental bobrok. Karena ditangan pemimpin yang bermental rusaklah daerah dan Indonesia akan hancur. Kekayaan alam daerah dan nasional tersedot hanya untuk segelintir orang kaya yang pernah membiayai kampanye para pemimpin tersebut. Bukan untuk kepentingan rakyat jelata, yang makin hari hidupnya makin menderita dan terlunta-lunta.

Harus kita akui, masyarakat masih banyak yang belum tersadarkan atas bahayanya pemimpin yang tidak amanah dan dzolim. Jika daerah mau bangkit dan Indonesia juga mau bangkit, maka satu-satunya jalan adalah kita harus memiliki pemimpin yang adil. Pemimpin yang mau mendengarkan keluh-kesah rakyatnya. Pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan partainya. Pemimpin yang tegas dan berwibawa yang mampu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya. Pemimpin yang satu kata antara perkataan dan perbuatan. Dan pemimpin yang menjadi panutan bagi warganya.

Pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah tidak datang dengan sendirinya. Tetapi harus diciptakan. Mari didik anak-anak kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia yang baik. Bangsa ini membutuhkan anak-anak yang cerdas, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, mencintai orang tua, agama,

bangsa, dan negaranya, mengabdi untuk kepentingan ummat dan bangsa.

Jika generasi muda calon pemimpin sudah dipersiapkan sejak dini, maka akan terlihatlah kebangkitan dan keunggulan suatu daerah dan bangsa nanti.

Begitu juga sebaliknya. Jika anak-anak muda harapan bangsa hanya kongkow-kongkow, bergosip, terlalu berlebihan main game, terlibat narkoba, pergaulan bebas, bersantai ria, berpangku tangan, melawan orang tua, terlibat tawuran, mengambil barang yang bukan miliknya, bermental pengemis, mencoktek ketika ujian, bersendau gurau ketika waktunya belajar, bersifat permisif, bertindak diluar norma dan kewajaran, boros, pesimis, maka sudah dapat dipastikan bahwa bangsa ini akan hancur. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, maka lakukan kaderisasi kepemimpinan dari sejak dini dengan cara-cara yang baik dan benar.

Lembaga-lembaga negara juga harus diisi oleh orang-orang yang baik. Agar bangsa ini juga bernasib baik. Baik buruknya nasib bangsa ini ditentukan oleh para pemimpinnya yang dihasilkan dari proses demokrasi elektoral dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Pada tahun politik 2018 dan 2019 nasib bangsa untuk lima tahun kedepan dipertaruhkan. Pertaruhannya bukan sekedar kalah dan menang lalu selesai. Tetapi pertaruhan apakah rakyat bisa sejahtera dan makmur. Ataukah rakyat tetap menderita, miskin, sekarat, dan hidup melarat, tanpa ada yang mau mengangkat harkat dan martabatnya.

Jika rakyat tidak peduli dan acuh-tak acuh, maka nasib mereka tak akan berubah. Namun jika rakyat mau bekerja keras untuk mendukung calon pemimpin yang bersih dan transformatif, maka nasibnya akan berubah. Karena seluruh kebijakan yang ada

di daerah maupun yang di pusat diputuskan dan ditetapkan oleh para pemimpin yang kita pilih. Jika yang dipilih oleh rakyat adalah pemimpin yang baik, maka tentu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin tersebut akan memihak rakyat.

Sudah saatnya daerah-daerah diseluruh Indonesia berubah. Kita sudah tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Mari kita doakan dan kita pilih calon-calon pemimpin yang memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib rakyatnya. Semoga ditahun baru 2018 membawa harapan baru bagi kita semua. Selamat Tahun Baru 2018.

16

Pilih Golkar atau Novanto

"Aku Bukan Pilihan" itulah judul lagu yang sering dinyanyikan oleh Iwan Fals. Judul lagu yang bisa menggambarkan Partai Golkar dan Setya Novanto saat ini. Sebuah pilihan yang sulit dan sangat menentukan, bagai makan "buah simalakama" apakah memilih Partai Golkar atau Setya Novanto untuk diselamatkan. Ataukah melawan kehendak rakyat. Hidup memang pilihan dan hidup memang harus memilih. Apapun pilihannya harus yang terbaik untuk Partai Golkar dan Indonesia.

Jelang pra-pradilan Setya Novanto pada hari Kamis, 30 November 2017 seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan ketukan palu hakim apakah status tersangka Setya Novanto oleh KPK sah atau sebaliknya. Pra-pradilan tanggal 30 November tersebut merupakan pertaruhan hidup mati bagi Setya Novanto. Hakim harus adil dan harus memutus sesuai bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Dan harus memutus sesuai hati nurani. Tidak boleh berdasarkan titipan atau tekanan dari siapapun. Hakim juga tidak boleh diintervensi oleh kekuatan apapun. Pra-pradilan pertama Setya Novanto pada tanggal 29 Sepetember 2017 yang membebaskan Setya Novanto dari status tersangkanya harus menjadi cerminan. Cerminan agar hukum tidak dibelokkan oleh siapapun. Dan apapun keputusan hakim harus dihormati.

Jika Setya Novanto menang lagi dalam pra-pradilan yang keduanya pada hari kamis, maka sudah dapat dipastikan dia adalah orang kuat dan sakti. Kuat karena KPK tidak mampu mengalahkannya. Dan KPK akan kehilangan kepercayaan diri. Sakti karena Setya Novanto selalu lolos dari jerat hukum. Setya Novanto kuat mungkin saja dia sudah banyak menanam jasa kepada orang lain dan membentuk jaringan yang kuat hingga ke penegak hukum. Dengan kesaktianya Setya Novanto mampu membulak-balikan logika hukum. Dan jika menang pra-pradilan lawan KPK, maka KPK harus melakukan evaluasi.

Jika bisa menang dalam pra-pradilan yang kedua, Setya Novanto tetap harus legowo dan merelakan Partai Golkar untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Jika tidak, maka Partai Golkar akan semakin tenggelam. Munaslub merupakan jalan terbaik bagi Partai Golkar agar dapat dengan cepat melakukan recovery (tempo.co). Salah satu lembaga survey

merilis bahwa jika Pemilu dilakukan saat ini Partai Golkar hanya di posisi ke tiga dengan raihan suara 10 % disalip oleh Partai Gerindra yang menyodok diurutan kedua dengan raihan suara 13 %. Ini merupakan warning bagi Partai Golkar. Jika tidak cepat diantisipasi bisa saja Partai Golkar disalip oleh partai-partai lainnya.

Dan jika Setya Novanto kalah dalam pra-pradilan, maka secara politik dia akan tamat. Dia dipastikan akan dicopot dari jabatan ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar. Dan rame-rame kader Partai Golkar akan meninggalkannya. Bahkan yang akan berbahaya adalah jika KPK menerapkan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) kepada Setya Novanto. Jika TPPU diberlakukan, maka harta Setya Novanto akan ditelusuri dan disita. Kita dorong agar KPK bekerja profesional dan objektif. Sehingga keadilan dirasakan oleh semua warga negara yang sedang tersandung masalah hukum.

Senior, pimpinan dan kader Partai Golkar harus dengan cepat bertindak melakukan langkah-langkah penyelematan Partai Golkar. Jika Partai Golkar sampai karam apalagi tumbang dan kalah dalam Pemilu, maka yang akan rugi bukan hanya kader Partai Golkar, tetapi juga bangsa Indonesia. Karena Partai Golkar telah banyak memberikan kontribusi dan darma baktinya untuk pembangunan dan kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, Partai Golkar harus diselamatkan agar tidak punah seperti dinosaurus. Dulu besar sekarang hilang dan punah. Langkah-langkah penyelematan tidak harus menunggu hasil pra-pradilan Setya Novanto. Menang atau kalahnya Setya Novanto dalam pra-pradilan tidak boleh menghalangi Partai Golkar untuk berbenah

Jika pilihan senior, pimpinan, dan kader menyelematkan Setya Novanto, bisa kedua-duanya – Setya Novanto dan Partai Golkar

-- tenggelam. Seandainya Setya Novanto menang di pra-pradilan dan kembali memimpin Partai Golkar. Rakyat sudah benci dan muak. Dan Partai Golkar bisa ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Jadi pilihan yang rasional adalah memilih menyelamatkan Partai Golkar, bukan menyelamatkan Setya Novanto. Yang dibangun oleh Partai Golkar bukan individu atau ketokohan seorang ketua umum, tetapi harus membangun institusi dan sistem.

Di Partai Golkar tidak mengenal ketokohan dan kultus individu. Partai Golkar tidak pernah defisit atau kekurangan tokoh. Ketokohan di Partai Golkar merata. Tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya memiliki kemampuan yang berimbang. Dan masing-masing tokoh memiliki faksi sendiri. Ibarat team sepak bola, Partai Golkar sama dengan team Panzer Jerman. Dimana kekuatan pemainnya disemua lini merata dan memiliki skill sepak bola di atas rata-rata.

Jadi jika Setya Novanto kalah di pra-pradilan dan dibui KPK, maka tidak akan mengganggu proses recovery. Karena begitu Setya Novanto mundur atau dimundurkan, pengganti Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar pun akan bermunculan. Tak ada gunanya mempertahankan Setya Novanto, jika masih tetap dipertahankan citra partai akan hancur. Rakyat Indonesia sangat peduli terhadap Partai Golkar. Partai Golkar harus tetap tegak berdiri. Bahkan harus merebut kemenangan dalam kontestasi Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019. Momentum inilah harus ditangkap oleh senior, pimpinan, dan kader Partai Golkar untuk berubah. Dan perubahan itu bisa dilakukan dengan Munaslub. Munaslub adalah jalan terbaik untuk kebangkitan kembali Partai Golkar.

Tidak ada yang bisa membendung keinginan rakyat. Rakyat menginginkan "Partai Golkar Yes, Novanto No". Artinya perubahan

kepemimpinan di Partai Golkar harus dilakukan dengan secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Dan pergantian ketua umum Partai Golkar adalah keniscayaan.

17

Apa Kabar Pansus KPK?

Pansus KPK yang kemarin getol mengungkap, menyerang, menguliti bahkan ingin membubarkan KPK nyaris tak terdengar lagi. Apakah misinya telah selesai dengan menangnya Setya Novanto ketua DPR RI dan ketua umum Partai Golkar pada pra-pradilan pada tanggal 29 September 2017. Artinya Setya Novanto bebas dari tuduhan tersangka kasus e-ktp. Ataukah karena pimpinan dan anggota Pansus KPK takut dan khawatir jika Pansus bergerak lagi untuk mengevalusi KPK nasibnya akan seperti Setya Novanto, ditersangkakan untuk kali kedua, digeledah, dijemput paksa,

menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), bahkan dalam kondisi masih sakit ditahan oleh KPK (kompas.com).

Seperti kita ketahui pimpinan dan anggota Pansus KPK diduga ada yang mendapat aliran dana kasus e-ktp. Ini mungkin yang membuat anggota Pansus tiarap dan tidak bergerak. Juga ngeri-ngeri sedap jika KPK mengusut semua penerima aliran dana haram kasus e-ktp. Semua tentu masih dugaan dan harus dibuktikan di pengadilan. Kita semua tentu menanti keberanian KPK untuk mengungkap semua yang diduga terlibat dan menerima aliran dana e-ktp. Bagi yang tidak menerima dan tidak terlibat tidak usah takut. Karena KPK bekerja profesional dan berdasarkan UU. Jika pun KPK bekerja kurang profesional mari kita perbaiki bersama.

Cooling down-nya Pansus KPK dipertanyakan banyak orang. Apakah hanya segitu saja kekuatan Pansus. Ketika Setya Novanto ditersangkakan kembali untuk kedua kalinya bahkan ditahan oleh KPK, harusnya Pansus bergerak untuk membela ketua DPR nya yang jadi pesakitan. Seperti pada awal-awal Pansus dibentuk garangnya bukan main, bahkan seolah-olah apa yang dilakukan KPK salah semua. Kini para anggota Pansus was-was dan tak segarang dulu bahkan nyaris tak terdengar suaranya.

Harusnya Pansus tetap konsisten untuk tetap mengkritisi KPK. Namun sikap kritis tersebut harus objektif. Sehinga tidak menimbulkan kecurigaan bahwa Pansus dibuat untuk melindungi dan mengamankan orang-orang yang diduga menerima lairan dana e-ktp dan bahkan lebih jauh lagi untuk membubarkan KPK. Tak ada lagi suara-suara dari senayan yang ingin membekukan KPK. Tak ada lagi suara tinggi serangan terhadap KPK. Tak ada lagi yang mampu menahan KPK untuk menjadikan Setya Novanto menjadi tersangka dan menahannya.

Yang akan geger adalah jika KPK mengusut tuntas kasus e-ktp. Karena begitu banyaknya anggota DPR RI yang diduga menerima aliran dana e-ktp. Jika semua diusut, maka DPR akan gonjang-ganjing. Sikap Pansus KPK yang berdiam diri mengindikasikan bahwa anggota Pansus mencari aman. Takut-takut jika bersuara lantang nasibnya akan sama seperti Setya Novanto. KPK tentu punya bukti kuat untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Termasuk jika mentersangkakan anggota DPR RI.

Jika Pansus KPK merasa benar dan bekerja objektif harusnya terus bekerja. Jangan berhenti apalagi diam saja. Buktikan jika Pansus bekerja untuk memperbaiki KPK demi bangsa dan negara. Bukan untuk mengganggu kinerja KPK. Jangan biarkan kepentingan orang-orang tertentu memainkan Pansus untuk kepentingan tertentu. Jika Pansus KPK diam saja seperti saat ini, maka Pansus akan diaggap takut dan ketakutan dengan bayangannya sendiri. Bayangan yang tidak bersih sehingga KPK tahu siapa-siapa saja anggota DPR yang diduga menerima uang dari e-ktp.

Jangan pernah kita merasa sombong. Mentang-mentang sedang berkuasa seenaknya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Orang sombong tidak disukai Tuhan juga tidak disukai manusia. Jangan juga mentang-mentang memiliki jabatan tinggi, lalu tidak mau dan tidak pernah datang ketika dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Jangan juga merasa sombong karena menang dipra-pradilan. Jangan juga merasa sombong dengan kuasanya melaporkan pimpinan KPK dan penyidiknya ke Kepolisian. Kesombongan akan menjadikan seseorang hancur dan tersungkur.

Lihat saja. Kurang apa hebatnya Setya Novanto, ketua DPR RI jabatan setara dengan Presiden, ketua umum Partai Golkar

tidak berdaya dan tragis ketika masih dalam kedaan sakit ditahan oleh KPK. Bahkan tak seorangpun dari pimpinan dan kader Partai Golkar yang menemani dan mendampingi Setya Novanto ketika digiring menuju tahanan. Tragis memang. Tapi itulah penegakan hukum yang benar. Bahwa hukum tidak pandang bulu. Siapapun di mata hukum sama. Dan hukum harus ditegakkan.

Tentu banyak anggota DPR RI yang namanya disebut dan diduga menerima aliran dana e-ktp berharap bahwa kasus e-ktp berhenti hanya pada Setya Novanto. Oleh karena itu, Pansus KPK tidak kedengaran lagi. Karena jika kencang lagi berhadap-hadapan dengan KPK. Bukan hal yang mustahil dengan alat bukti yang cukup kuat akan menjerat dan mentersangkakan pimpinan atau anggota Pansus yang diduga menikmati alairan dana e-ktp. Tapi apapun yang terjadi kita harus tetap menghomati sikap Pansus yang tak terdengar lagi nyayian merdunya. Dan kita juga mesti mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus e-ktp yang melibatkan orang-orang kuat di Republik ini.

Harusnya antara KPK dengan Pansus KPK bersinergi untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena kita sedang dalam keadaan darurat korupsi. Korupsi terjadi dimana-mana hampir disemua tempat dan lembaga. Tidak mengenal kasta. Bahkan korupsi dilakukan dengan cara berjamaah. Begitu hebatnya perilaku korupsi di Indonesia sudah saatnya kita bersama-sama untuk memeranginya. Tidak ada kata lain kita harus bergerak untuk memberantas korupsi hingga Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi atau minimal korupsinya berkurang.

Malu jika negara kita masih dicap atau dilabeli sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Tidak mungkin pembangunan akan jalan jika korupsi merajalela. Sudah saatnya Pansus KPK mendorong

KPK untuk lebih keras lagi dalam memberantas korupsi. Sangat luar biasa jika Pansus KPK bekerja untuk kebaikan bangsa dan negara. Pansus KPK bekerja dengan uang rakyat. Akankah mereka bekerja untuk kepetingan rakyat. Rakyat sedang menunggu hasil kerja Anda semua.

18

Meneladani Para Pahlawan

Pahlawan merupakan sosok atau figur yang memiliki jasa besar kepada negara dan rakyat Indonesia. Sosok pahlawan menjadikan dirinya dikenang sepanjang masa dalam sanubari rakyat Indonesia. Sosok pahlawan juga merupakan sosok yang mulia. Karena berjuang dan bekerja untuk memuliakan manusia. Memuliakan sesama. Dan memuliakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulia di dunia dan mulia di akhirat kelak

Sosok mulia para pahlawan harus kita teladani. Kita sangat bersyukur dan beruntung memiliki banyak pahlawan. Mereka

bisa menjadi teladan sekaligus sumber inspirasi yang tidak akan ada habis-habisnya bagi generasi milenial saat ini. Sosok pahlawan merupakan personifikasi dari orang baik dan bijak yang bekerja untuk kebaikan dan kemanusiaan dan juga bekerja untuk negara. Jadi negara dan warganya menjadi tempat perjuangan dan pengabdian dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.

10 November diperingati sebagai hari pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran di Surabaya. Begitu gigih dan heroiknya para pahlawan dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan nagara dari serangan musuh. Mereka para pahlawan rela meregang nyawa untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka. Indonesia yang berdaulat. Indonesia yang cinta damai. Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang tanpa luka. Dan Indonesia yang jaya (Menteri Sosial, 2019) .

Meneladani para pahlawan merupakan kewajiban. Kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Meneladani mereka yang berjuang dan berkorban tanpa pamrih, tulus dan ikhlas. Berjuang dengan darah, air mata, jiwa, raga, dan harta. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Jika kita sebagai penerus bangsa meneladani dan meneruskan perjuangan mereka. Perjuangan dalam menjaga dan mempertahankan NKRI. NKRI harga mati dan harus dijaga hingga kita mati nanti.

Meneladani para pahlawan tidaklah sulit. Namun bukan berarti mudah. Tergantung kepada kita yang melakukannya. Nilai-nilai heroik yang diajarkan oleh pahlawan harus ditiru dan diteladani oleh kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai heroisme dipakai bukan hanya ketika kita berperang dalam melawan penjajah. Tetapi bisa digunakan untuk menyemangati

diri kita dan orang lain untuk belajar dan bekerja keras untuk memajukan Indonesia. Juga untuk menjaga kedaulatan di darat, laut, dan udara Indonesia. Ketika ikan laut kita di curi oleh bangsa lain, maka kita yang harus pertama mengecam dan memprotes kegiatan illegal tersebut. Jadi sifat heroisme bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pahlawan ada untuk diteladani. Bukan untuk dicaci. Pahlawan ada untuk menjadi inspirasi. Bukan untuk dikebiri. Pahlawan ada untuk dihormati. Bukan untuk diingkari. Pahlawan ada untuk dicintai. Bukan untuk dikelabui. Pahlawan ada untuk dimuliakan. Bukan untuk dihinakan. Pahlawan ada untuk dikenang jasa-jasanya. Bukan untuk dilupakan. Pahlawan ada untuk diberi tanda jasa. Bukan untuk diberi janji-janji biasa. Dan pahlawan ada untuk didoakan bukan untuk dilupakan.

Di antara ribuan pahlawan yang gugur pada 10 November 1945 kita mengenal Bung Tomo yang dengan begitu heroik dan patriotismenya memekikan perang melawan tentara penjajah di Surabaya. Tidak ada kata lain selain melawan. Karena melawan penjajah merupakan kehormatan. Kehormatan menjaga wilayah Indonesia dari penjajahan. Kehormatan jika mati menjadi syuhada. Kehormatan yang akan melekat sepanjang masa. Perjuangan Bung Tomo dan para pahlawan lainnya harus dijadikan contoh dan diteladani. Karena dengan mencontoh dan meneladani perjuangan para pahlawan kita telah menghormati mereka. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.

Hari jum'at tanggal 10 November 2017 kita akan memperingati hari pahlawan yang ke-72. Selama 72 tahun itu pula kita merayakannya dengan keceriaan dan riang gembira. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meneladani para

pahlawan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita sifat-sifat heroisme, patriotisme, kerja keras, optimisme, ketulusan, keikhlasan, keyakinan, pesaudaraan, persatuan, kebaikan, kecintaan, kasih-sayang, kesetiaan, kemuliaan, keagungan, keluhuran, kejujuran, kebenaran, kecerdikan, kecerdasan, kehebatan, kesabaran, kebersihan, keindahan, kesehatan, kesederhanaan, kemenangan, dan optimisme.

Pahlawan bukan orang yang culas, pembohong, penipu, pembunuh, pemerkosa, pencuri, suka mengorbankan orang lain, menjual negara, kolusi, korupsi, dan nepotisme, curang, negatif, pemalas, individualis, hedonis, iri, dengki, hasad, boros, cinta dunia dan takut mati, munafik, suka kekerasan, nakal, jahat, cabul, anti kebhinekaan, intoleransi, dan anti Pancasila. Sifat-sifat negatif tersebut bukan milik para pahlawan. Tapi milik para pengkhinat dan pecundang. Jika kita ingin jadi pahlawan, maka tanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri kita. Begitu juga sebaliknya, jika ingin jadi pecundang, maka lakukanlah hal-hal negatif. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita ingin menjadi pahlawan atau pecundang.

Para pahlawan diteladani karena kebesaran jiwanya karena mau berjuang untuk negara dan masyarakat. Tulus dan ikhlas berjuang dan bekerja untuk kemanusiaan. Membangun jiwa optimisme. Membangun kecintaan terhadap tanah airnya. Karena cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Dan berjuang diniatkan hanya untuk Allah SWT semata. Tuhan pemilik alam semesta yang telah menganugerahkan kemerdekaan kepada kita bangsa Indonesia.

Begitu besarnya jasa para pahlawan sepatutnya kita harus menghargai dan menghormati keluarga dan keturunannya. Jasa

para pahlawan tidak bisa dihitung dan diukur dan tidak akan bisa terbalaskan. Oleh karena itu, kita harus meneladaninya dengan cara mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang positif, kreatif, dan inovatif sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan setiap kita bisa menjadi pahlawan yang juga akan diteladani oleh generasi mendatang.

BAB 4

PILKADA DAN MASIFNYA MAHAR POLITIK

19

Spirit Hari Sumpah Pemuda

Tepat pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 1917 kita akan memperingati hari sumpah pemuda yang ke-89. Hari di mana seluruh elemen bangsa termasuk pemuda di seluruh Indonesia bergerak bersama untuk memperingati salah satu hari yang bersejarah yang menjadi cikal-bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 1945. Hari sumpah pemuda mengingatkan kita kembali bahwa spirit hari sumpah pemuda harus kita jaga. Agar sejarah bangsa ini tidak lenyap oleh perkembangan jaman yang semakin *edan*.

Pada 89 tahun yang lalu, para pemuda Indonesia yang diwakili oleh Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatera, Jong Islamieten Bond, Jong Betawi dll berkumpul di Jakarta untuk melakukan Kongres Pemuda II yang menghasilkan rumusan teks sumpah pemuda yang menjiwai seluruh jiwa dan raga pemuda Indonesia. Ikrar pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut menjadi tonggak sejarah bagi berdirinya Indonesia merdeka.

Untuk lebih menghayati dan mengamalkan ikrar sumpah pemuda generasi milenial harus bertekad untuk menjaga spirit hari sumpah pemuda dengan cara membaca, menghafal, menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak kita mesti berikrar kembali untuk mengingatkan generasi sekarang dan yang akan datang bahwa para pemuda Indonesia pernah berikrar menyatakan bahwa: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia (Triningsih, 2019).

Spirit bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia harus dimaknai bahwa kita sebagai pemuda Indonesia yang lahir, tumbuh dan besar di Indonesia. Segala gerak langkah dan perjuangan kita dan tumpah darah kita hanya untuk tanah air Indonesia tercinta. Bukan untuk bangsa lain. Bukan untuk negara lain. Bukan untuk tanah air orang lain. Bukan untuk berdarah-darah membela kepentingan Asing. Bukan untuk membangga-banggakan tanah air milik bangsa lain dan menghancurkan tanah air sendiri. Kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia harus termanifestasikan dalam kehidupan nyata. Karena kecintaan terhadap tanah air merupakan bagian dari iman, *"Hubbul Wathon Minal Iman".*

Pemuda Indonesia juga tidak boleh ragu dan harus mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu. Tidak boleh tercerai-berai, berantakan apalagi hancur. Kita harus tekadkan dalam jiwa dan relung hati kita yang terdalam bahwa pengakuan kita terhadap bangsa yang satu bangsa Indonesia adalah final. Ikatan kebangsaan kita dipersatukan oleh kebulatan tekad kita untuk selalu bersama-sama membangun negara dan bangsa Indonesia yang aman dan damai sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an (Saba/34:15) *"Baldatun Toyyibatun Warobbun Gofur",* menjadi negara yang baik dengan Rabb Yang Maha Pengampun.

Pemuda Indonesia bukan hanya harus paham dan mengerti bahasa daerahnya masing-masing. Namun wajib dan harus menggunakan dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesialah yang mempertemukan kita dalam kekhasan budaya bangsa. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu pemuda Indonesia. Bahasa Indonesia yang sangat indah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari denyut nadi sejarah perjuangan dan persatuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai bahasanya. Bahasa menjadi sumber kekuatan bagi sebuah bangsa. Dan bahasa menjadi simbol kerukunan dan keakraban sesama anak bangsa.

Pemuda Indonesia harus mencerminkan ketiga kekuatan roh dan spirit hari sumpah pemuda, yaitu spirit bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, spirit berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan spirit menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia agar spirit hari sumpah pemuda tidak lekang oleh jaman. Dan harus menjadi sumber inspirasi bagi generasi milenial untuk meneladani perjuangan para pemuda terdahulu yang telah berjuang memerdekakan Indonesia.

Pemuda masa kini tidak boleh kalah oleh pemuda jaman dulu. Pemuda milenial bukan hanya mengandalkan kehebatan dan kecakapan orang tuanya, tetapi juga harus menjadi pemuda hebat karena perjuangan individu yang penuh semangat, pantang menyerah, menjaga optimisme, *positive thinking, problem solving,* bermanfaat bagi sesama, mencintai Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kebhinekaan, menginspirasi dalam kebaikan, menjadi teladan, cakap dalam pikiran dan tindakan, bermental pemenang, pandai bergaul, rajin ibadah, membangun kebersamaan, menciptakan kreativitas, inovasi, dan produktifitas, membangun komunitas unggul. Dan menjadi pemuda kebanggaan orang tua, agama, bangsa, dan negara Indonesia.

Pemuda harapan bangsa bukanlah pemuda yang pesimistis, malas, curang, suka melakukan adu domba, berkelahi, tawuran, pendendam, iri, dengki, hasad, pemalu, pemurung, pendendam, melawan orang tua, *negative thinking,* penjilat, emosional, sombong, kurang setiakawan, individual, pecundang, peragu, pengkhianat, munafik, pembohong, mudah menyerah, penghujat, licik, pergaulan bebas, narkoba, dan obat-obatan terlarang, dan perbuatan negatif lainnya.

Pemuda Indonesia harus berkarya untuk masa depan bangsa. Bangsa ini butuh karya monumental dari para pemuda. Pemuda jangan hanya jadi figuran. Tetapi harus jadi aktor utama penentu sejarah bangsa. Pemuda juga harus berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Dengan kemajuan tekhnologi yang begitu cepat dan dengan persaingan yang begitu ketat, pemuda tidak boleh hanya berpangku tangan. Memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Namun harus berbuat yang terbaik untuk agama, nusa, dan bangsa. Maju tidaknya suatu bangsa tergantung pada

pemudanya. Pemuda yang kreatif dan menginspirasi akan menjadi teladan dan penentu kemajuan bangsa. Namun juga sebaliknya, pemuda yang loser (pecundang) akan menghancurkan bangsa.

20

Menagih Janji Anies - Sandi

Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta akan segera dilantik pada Senin, 16 Oktober 2017 di Istana Negara. Harapan kepada Anies-Sandi sebagai gubernur DKI Jakarta terpilih sangat besar (Alvionita, 2018).

Sebagai barometer Indonesia, Jakarta menjadi daya tarik sendiri. Jakarta menjadi tempat jutaan orang mengadu nasib. Jakarta menjadi pusat kekuatan ekonomi, politik, hukum, dan budaya.

Jangan sampai Jakarta menjadi neraka. Neraka karena kemacetan yang menerka. Neraka karena banjir melanda. Neraka

karena kriminalitas yang tinggi. Neraka karena prostitusi merajalela. Neraka karena gerak individualitas yang menggejala. Neraka karena kenakalan remaja. Neraka karena narkoba yang tak terbendung. Neraka karena bencana tak kunjung reda. Neraka karena susah cari kerja. Neraka karena beban hidup yang tak terpenuhi. Dan neraka karena kejamnya ibu kota.

Dengan berjalannya waktu Jakarta harus menjadi surga. Surga bagi kaum papa dan dhuafa. Surga bagi penyandang disabilitas. Surga bagi pengemis dan pengamen. Surga bagi para pencari kerja. Surga bagi para pencari keadilan. Surga bagi pejuang demokrasi dan HAM. Surga bagi mahasiswa, guru dan dosen. Surga bagi ibu rumah tangga. Surga bagi pencinta kebhinekaan. Surga bagi pedagang kaki lima. Surga bagi manusia gerobak. Dan surga bagi pencinta agama.

Membangun Jakarta memang tidak mudah. Namun juga tidak sulit. Asal ada kemauan pasti ada jalan. Jalan mencapai kebahagiaan. Membangun Jakarta butuh kecerdasan, kreatifitas, dan inovasi, sehingga Jakarta tidak menjadi tempat yang hampa dan tak berguna. Jakarta yang bercahaya dan kaya menjadi dambaan kita semua. Problematika Jakarta harus diselesaikan dengan tuntas, jika tidak, maka Jakarta akan menjadi kota yang tak layak untuk di tempati.

"Maju Kotanya, Bahagia Warganya" merupakan jargon politik yang menjadi andalan pasangan Anies-Sandi. Jargon tersebut menjadi daya tarik masyarakat Jakarta untuk memilih pasangan tersebut pada Pilgub Februari yang lalu. Anies-Sandi harus mampu membuktikan jargon tersebut dalam kehidupan nyata warga Jakarta. Jika tidak, maka warga Jakarta akan kecewa dan akan mengurangi kepercayaan sehingga merugikan Anies-Sandi.

Anies-Sandi harus membuktikan bahwa Jakarta harus menjadi kota yang maju. Maju dalam bidang transportasi. Maju dalam bidang keagamaan. Maju dalam bidang sarana dan prasarana olah raga. Maju dalam bidang kesenian dan budaya. Maju dalam bidang pendidikan. Maju dalam bidang kesehatan. Maju dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan. Maju dalam bidang pariwisata. Maju dalam bidang teknologi. Maju dalam bidang industri kreatif. Maju dalam bidang birokrasi dan pemerintahan. Dan maju dalam tata kelola perkotaan.

Anies-Sandi juga harus mampu membahagiakan warganya sebagaimana yang dijanjikannya ketika kampenye dulu. Bahagia lahir dan batin bagi setiap warga ibu kota. Bahagia karena memiliki tempat tinggal yang layak. Bahagia karena kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bahagia karena mudah mencari dan mendapatkan pekerjaan. Bahagia karena pemimpinnya bersahaja. Bahagia karena birokrasinya mudah, cepat, tanggap, dan melayani. Bahagia karena budaya betawi dihargai. Bahagia karena pendidikan gratis. Bahagia karena kesehatan gratis. Dan bahagia karena janji-janji politik Anies-Sandi ditepati.

Di antara janji-janji kampanye yang harus ditepati dan dilaksanakan adalah Down Paymant (DP) rumah nol persen. Program rumah DP nol persen merupakan program unggulan Anies-Sandi yang memikat para pemilih di DKI Jakarta. Jika mengikuti perkembangan yang ada DP nol persen tersebut sulit untuk dilaksanakan. Ini menjadi tantangan bagi Anies - Sandi. Karena apapun alasannya program tersebut harus terealisasisi. Jika tidak, maka warga Jakarta tidak akan percaya lagi kepada pasangan tersebut.

Anies-Sandi juga berjanji akan menghentikan proyek reklamasi di teluk Jakarta. Akan kah program ini bisa direalisasikan.

Karena pada perkembangannya proyek reklamasi teluk Jakarta tersebut masih berjalan. Jika program tersebut bisa dihentikan, maka akan menjadi indikator pencapaian kesuksesan Anies - Sandi, karena bisa merealisasikan janji politiknya. Namun jika tidak bisa dihentikan, maka Anies-Sandi akan kehilangan dukungan dari warga Jakarta. Jangan sampai dukungan masyarakat Jakarta yang cukup besar kepada Anies-Sandi menjadi sebuah kekecewaan. Bahkan bisa menjadi kecaman dan ancaman.

Terkait reklamasi sepertinya Anies-Sandi tidak akan berdaya, karena kewenangannya diambil oleh pemerintah pusat. Jika reklamasi tidak bisa dihentikan dan berjalan, maka Anies - Sandi harus memastikan bahwa reklamasi digunakan untuk kepentingan rakyat kecil. Bukan kepentingan para pemilik modal dan orang kaya.

Untuk kaum muda Anies - Sandi juga berjanji akan membangun fasilitas olah raga salah satunya stadion sepak bola bertaraf internasional untuk menggantikan stadion menteng dan lebak bulus. Jika janji ini bisa dilaksanakan, maka Anis-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur yang diidolakan oleh kaum muda dan superter sepak bola Jakarta. Namun persoalan akan menjadi pelik, jika program tersebut tidak terealisasi. Karena akan berbuah kekecewaan yang mendalam bagi kaum muda Jakarta.

Sejatinya pemimpin yang baik harus mampu menepati janji-janji politik dalam kampanye mereka. Tidak ada kata lain selain merealisasisikan semua program-programnya. Sekali masyarakat kecewa, maka akan sulit untuk mengobatinya. Oleh karena itu, pemimpin harus amanah dan tidak mengecewakan warganya.

Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memang membutuhkan usaha dan kerja yang ekstra untuk bisa membangun Jakarta yang berbudaya dan berperadaban. Pertaruhannya sangat besar. Jika bisa berhasil dan sukses membangun Jakarta, maka bukan tidak mungkin karir politiknya akan menanjak, sehingga bisa berkesempatan besar untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebaliknya, jika gagal dalam memimpin ibu kota, maka perjalanan politiknya akan hancur. Karena dianggap tidak bisa memimpin dan tidak bisa merealisasikan program-program yang sudah dijanjikannya.

Semoga Anies-Sandi dapat membawa Jakarta kearah yang lebih baik. Sehingga jargon Maju Kotanya, Bahagia Warganya bukan janji kosong. Tapi menjadi jargon yang nyata dan menjadi realita.

21

Jurus Sakit Para Koruptor

Koruptor memang banyak akalnya. Sudah cukup banyak uang negara yang digasak oleh para koruptor. Tidak sedikit para tersangka korupsi ketika mereka ditahan KPK mendadak sakit atau berpura-pura sakit. Ini memang gejala umum dan menjadi salah satu jurus atau strategi tersangka korupsi untuk menghindar dari proses hukum. Dan jurus ini bisa juga untuk mengulur waktu dan merupakan jurus lama yang masih dipakai hingga kini.

Jurus sakit masih tetap ampuh digunakan oleh para tersangka korupsi. Sebut saja Setya Novanto. Sang Ketua Umum Partai

Golkar dan Ketua DPR RI. Pada hari Senin, 11 September 2017 dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Konon di internal KPK sudah mempersiapkan rompi orange bagi Setya Novanto. Namun karena informasi akan ditahannya Setya Novanto tersebut bocor, Novanto mendadak sakit atau bisa juga pura-pura sakit (Reyhansyah, 2018).

Di hari berikutnya sidang pra pradilan Novanto digelar. Novanto merasa tidak bersalah dan status tersangka yang dia sandang dianggap menyalahi prosedur. KPK juga tidak mau kalah dengan rumor sakitnya Novanto yang tiba-tiba. KPK pun memeriksa ulang Novanto pada minggu berikutnya. Tepat pada tanggal 18 September Novanto pun dipanggil kembali oleh KPK untuk menjalani pemeriksaan. Namun karena beralasan masih sakit Novanto pun tidak datang.

Kita tidak tau apakah Novanto itu pura-pura sakit atau sakit betulan. Kenapa sakitnya mendadak dan langsung dioperasi. Dan kenapa sakitnya tiba-tiba ketika KPK memanggil Novanto untuk diperiksa. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Bisa saja nanti para tersangka korupsi akan melakukan trik dan strategi pura-pura sakit untuk menghindari proses hukum di KPK.

Dan bisa saja para tersangka meminta operasi di luar negeri. Menghabiskan waktu di luar negeri. Dan tidak kembali lagi ke Indonesia. Atau bisa juga kembali ke Indonesia jika dianggap sudah aman. Banyak para koruptor yang pergi atau lari keluar negeri sebut saja salah satunya Edi Tansil. Hingga kini masih bebas berkeliaran walaupun sudah menjarah uang negara.

Strategi sakit atau pura-pura sakit merupakan salah satu jurus yang digunakan oleh para koruptor. Karena strategi ini

memang yang paling memungkinkan untuk mengelabui para penegak hukum. Dan sebenarnya jurus sakit ini bukan jurus baru atau bukan sesuatu yang baru. Pernah juga digunakan oleh para tersangka di masa yang lalu.

Para pejabat yang menjadi tersangka biasanya pura-pura sakit ketika akan diperiksa KPK. Jurus sakit sering digunakan oleh para politisi dan para pejabat yang bermasalah, paling tidak mengatur strategi dalam menghadapi para penegak hukum. Pola lama ini menjadi bagian dari intrik politik yang dilakukan oleh para tersangka agar merasa dikasihi. Oleh karena itu, agar tidak menjadi yurisprudensi yang jelek. Harus dibuat aturan, bagi para tersangka jika sakit harus diperiksa oleh dokter dari KPK. Agar lebih objektif dan bisa dipertanggung jawabkan.

Bobroknya moralitas pejabat tidak bisa disalahkan. Karena memang ada celah untuk melakukan kecurangan atau berbohong dengan cara-pura-pura sakit. KPK harusnya mencari cara yang ampuh agar bagi siapapun yang menjadi tersangka korupsi ketika akan diperiksa dan ditahan tidak bisa lagi pura-pura sakit. Penegakan hukum tidak boleh kalah oleh kebohongan dan kecurangan yang dilakukan oleh para tersangka.

Walaupun sistem hukum kita menganut prinsip praduga tidak bersalah. Namun harusnya demi moralitas dan demi Indonesia, bagi siapapun yang sudah menyandang gelar tersangka harus mengundurkan diri dari jabatannya dan bersikap kooperatif kepada penegak hukum. Bahaya jika hukum dimainkan. Tak akan ada keadilan. Tak akan ada ketertiban dan keteraturan. Tak akan ada kebijaksanaan. Yang ada adalah kebobrokan dan kehancuran.

Tentu bangsa ini tidak mau hancur. Oleh karena itu, kita mendorong KPK untuk bekerja dengan maksimal dalam

pemberantasan korupsi. Kita tidak boleh kalah oleh para koruptor. Mereka menggasak uang rakyat untuk kepentingan pribadi, keluarga, partai atau golongannya.

Rakyat cukup lelah melihat dan menyaksikan aksi teatrikal drama sakit para tersangka. Sakit menjadi jurus maut untuk membohongi penegak hukum dan rakyat. Penegak hukum sudah canggih dalam bekerja. Dan rakyat juga sudah semakin cerdas melihat permasalahan korupsi di negeri ini.

Sakit jangan lagi menjadi kata pembenaran dan penghindaran dari proses hukum. Boleh dan bisa saja penegak hukum dan rakyat dibohongi dan dikelabui. Namun yang pasti Allah SWT tidak bisa dibohongi. Allah SWT Tuhan Yang Maha Adil akan membalas kebaikan dengan kebaikan begitu juga sebaliknya.

Boleh saja para tersangka bangga karena lolos dari pemeriksaan para penegak hukum. Namun tidak untuk dihari pembalasan nanti. Dimana setiap manusia akan dihitung sesuai dengan amal perbuatannya. Dan bisa saja di dunia manusia bisa berbohong. Tapi tidak untuk di akhirat nanti.

Walaupun Novanto dianggap masih sakit. Namun pra pradilan di pengadilan Jakarta Selatan terus berlanjut. Novanto diwakili oleh para kuasa hukumnya. Di sidang pra pradilan bisa saja Novanto lolos dan bebas. Namun bisa juga Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka oleh KPK jika KPK punya bukti-bukti baru atau bisa juga menjadi tersangka dikasus yang lain.

Yang jelas. Hakim harus memutus dengan objektif dan seadil-adilnya. Karena banyak informasi di masyarakat bahwa Novanto akan menang di praperadilan. Kita tunggu saja drama selanjutnya.

22

Partai Golkar bukan Toko Kelontong

Kisruh di tubuh Partai Golkar belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kisruh tersebut dipicu oleh adanya surat dari Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin untuk menjadi Ketua DPR RI untuk menggantikan dirinya yang mundur sebagai Ketua DPR RI. Surat sakti dari Setya Novanto tersebut tentu menjadi polemik di DPR RI dan juga di internal Partai Golkar. Di lembaga parlemen yang terhormat tersebut, pro dan kontra muncul ada yang mendukung tentu ada juga yang menolak pergantian Setya Novanto ke Aziz yang dianggap cacat etika. Bahkan penolakan

tersebut datang dari koleganya Aziz Syamsudin di Fraksi Partai Golkar DPR RI. Bahkan sudah 50 orang lebih anggota FPG DPR RI yang menandatangani petisi untuk menolak pelantikan Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR RI.

Di internal Partai Golkar juga bergejolak. Rame-rame senior, pimpinan dan kader partai beringin menolak pelantikan Aziz sebagai Ketua DPR RI, karena dianggap melanggar AD/ART partai dan tidak dibicarakan dan diplenokan di DPP Partai Golkar. Penolakan terhadap Aziz memang beralasan. Selain karena Aziz tidak membicarakannya bersama pengurus partai, Aziz juga dianggap sebagai kroninya Setya Novanto. Setya Novanto memang hebat, di balik jeruji besi dia masih bisa merekomendasikan Aziz sebagai Ketua DPR RI.

Penolakan terhadap Aziz berjalan lancar dan sukses. Akhirnya Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI memutuskan bahwa persoalan pelantikan Aziz Syamsudin dibatalkan dan dikembalikan ke internal Partai Golkar. Tentu keputusan Bamus tersebut mengecewakan Aziz dan menyenangkan rival-rivalnya. Tapi itulah keputusan yang terbaik. Semua hal yang terkait jabatan strategis di parlemen atau pun di pemerintahan harus dibicarakan di internal Partai Golkar. Agar kader atau orang yang diberi amanah oleh partai di parlemen atau pemerintahan menjabatnya dengan enak dan tenang. Partai Golkar itu partai yang sudah dewasa dan matang, bukan toko kelontong. Jadi setiap jabatan yang akan diamanahkan kepada kader harus dibicarakan dan di internal partai.

Partai politik memang dibentuk untuk mendistribusikan kader-kadernya di pemerintahan, termasuk untuk menempatkan kadernya menjadi Ketua DPR RI. Partai politik tidak boleh seenaknya dan sembrono dalam menempatkan kader-kadernya

sebagai pimpinan DPR RI. Partai politik harus menempatkan kader-kader terbaiknya untuk menempati jabatan-jabatan strategis. Jangan berdasarkan *like or dislike,* atau berdasarkan deal-deal politik tertentu, jangan juga berdasarkan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Tidak baik jika jabatan publik ditempati oleh orang yang terlibat KKN.

Penolakan kader-kader Partai Golkar terhadap pelantikan Aziz Syamsudin untuk menjadi Ketua DPR RI harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bahwa jabatan merupakan amanah dan untuk mendapatkan jabatan harus dimusyawarahkan dulu di internal partai. Agar jabatan yang diemban nanti enak dan mulus. Dan semua anggota FPG DPR RI berhak untuk menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto yang sudah mengundurkan diri. Nama-nama seperti Bambang Soesatyo, Agus Gumiwang, Zainudin Amali dan Aziz Syamsudin sangat layak untuk menjadi Ketua DPR RI. Siapapun yang nanti direkomendasikan oleh Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPR RI adalah merupakan kader terbaik partai beringin tersebut (Kompas.co).

Kredibilitas Partai Golkar sedang dipertaruhkan. Konflik internal yang berkepanjangan dan ketua umumnya yang ditahan KPK karena diduga terlibat kasus e-KTP menjadikan Partai Golkar harus waspada agar tidak tergerus dan jatuh tersungkur, bahkan karam. Jika tidak hati-hati dan tidak dikelola dengan baik, bisa saja Partai Golkar nasibnya akan seperti dinosaurus, besar dan bersejarah, namun hilang ditelan zaman. Jangan sampai Partai Golkar kalah dan menjadi pecundang sehingga tertelan oleh perpolitikan nasional. Partai yang begitu digdaya, matang dan dewasa, jangan sampai menjadi toko kelontong yang cara mengelola dan mengatur konfliknya salah.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Minaslub) Partai Golkar harus segera dilaksanakan. Mengulur-ulur atau menunda-nunda Munaslub akan merugikan Partai Golkar. Munaslub merupakan jalan yang terbaik. Kepemimpinan baru yang segar di tubuh partai beringin tersebut dibutuhkan agar Partai Golkar tidak disebut sebagai partai toko kelontong. Dan agar Partai Golkar mampu bangkit dari keterpurukan. Jika Partai Golkar tidak mampu bangkit yang rugi bukan hanya kader partai tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan kehilangan. Karena Partai Golkar begitu besar jasanya dalam proses pembangunan di Indonesia.

Mungkin partai-partai lain akan bersorak-sorai jika Partai Golkar hancur. Karena suara Partai Golkar dalam Pemilu akan beralih ke partai lain. Oleh karena itu, ketua umum baru Partai Golkar tugasnya sangat berat. Berat karena selain harus mampu menyatukan faksi-faksi di internal partai, tetapi juga harus mampu me-*recovery* dan memenangkan Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019. Jika kader Golkar mampu dipersatukan dan bersama-sama berjuang menuju Golkar baru, maka tidak mustahil Partai Golkar akan mampu meraih kemenangan. Semua bergantung pada kader. Apakah mau bangkit atau tenggelam dan karam dihantam badai politik.

Yang pasti ketua umum baru hasil Munaslub harus mereprestasikan dari kalangan anak muda yang progresif, profesional, kreatif, inovatif, gaul, merangkul semua kelompok di internal maupun eksternal partai, dekat dengan penguasa, berpengalaman panjang di partai maupun pemerintahan, dan tidak terkait kasus hukum. Sekali lagi tidak terkait kasus hukum. Jika salah memilih ketua umum, maka Partai Golkar akan menjadi

bulan-bulanan dan lelucon oleh partai lain dan masyarakat. Momentum Munaslub harus digunakan oleh kader-kader Partai Golkar untuk berubah. Berubah menjadi Partai Golkar yang disegani oleh kawan dan lawan. Dan juga disayangi dan dicintai oleh masyarakat.

Perjuangan untuk bangkit tidaklah sulit. Namun tidak juga mudah. Kuncinya adalah kepemimpinan baru yang reformatif dan menjaga soliditas di internal partai. Jangan ada yang tersakiti. Rangkul semua kelompok. Bangun Golkar dengan kebesaran jiwa dan kebersamaan, bukan dengan uang. Beri kesempatan kader yang potensial untuk menempati jabatan-jabatan strategis di pusat atau daerah di parlemen ataupun di pemerintahan. Berikan jabatan kepada kader yang loyal dan sudah berjuang lama di partai, bukan diberikan kepada orang luar yang tidak jelas. Karena akan merusak kaderisasi di tubuh Partai Golkar. Partai Golkar harus mampu menghadapi semua ujian. Selamat menuju kebangkitan. Jika tidak sekarang kapan lagi. Dan jika bukan anda-anda semua kader Partai Golkar siapa lagi. Kebangkitan adalah keniscayaan, jika tidak, maka Partai Golkar akan hancur berkeping-keping. Buktikan Partai Golkar adalah bukan toko kelontong. Buktikan Partai Golkar adalah partai yang matang dan dewasa.

23

Pilkada dan Kemaslahatan Bangsa

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 merupakan salah satu pesta demokrasi terbesar bagi rakyat Indonesia. Karena terjadi di 171 daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Pilkada sejatinya harus menjadi kontestasi pertarungan politik yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pilkada juga harus menyenangkan dan menjadi wahana pendidikan politik bagi warga Negara (Kemendagri, 2018).

Pilkada bukan hanya sekedar memilih kepala daerah, lalu selesai. Pilkada adalah titik awal bagi kemajuan dan kemaslahatan

bangsa. Pilkada yang berkualitas akan menghasilkan kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang berkualitas pula. Dengan dipimpin oleh kepala daerah yang berkualitas, maka rakyat pun akan terlayani dengan baik. Dan Pilkada menjadi ajang kontestasi politik dalam mensejahterakan rakyat.

Namun jika Pilkada dijadikan sebagai pertarungan politik yang tidak sehat, menebar fitnah, saling mengintimidasi, melakukan cara-cara curang dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, maka Pilkada bukan sebagai pesta demokrasi yang membawa kepada kemaslahatan bangsa tetapi menjadi alat pemecah bangsa. Oleh karena itu, pilihannya adalah Pilkada harus menjadi momentum perbaikan nasib rakyat dalam lima tahun kedepan dan membawa kemaslahatan bagi bangsa dan negara.

Pilkada jangan hanya dijadikan rutinitas pesta demokrasi lima tahunan semata, tetapi harus menjadi momentum terbaik dalam memperbaiki bangsa. Pembangunan nasional harus dimulai dari pembangunan dari daerah. Jika suatu daerah dapat membangun dengan baik, maka akan berimbas kepada baiknya pembangunan nasional. Begitu juga sebaliknya, jika daerah tidak bergerak, maka pembangunan nasional pun akan mandek. Oleh karena itu perlu sinergi antara kepala daerah terpilih dengan pemerintah pusat.

Pilkada harus membawa kemaslahatan bagi rakyat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan indikasi bahwa Pilkada membawa keberkahan. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, terbukanya kesempatan dan lapangan kerja, kebutuhan pangan murah, dan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat menjadi indikator bahwa Pilkada membawa kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun bisa saja Pilkada juga menjadi bencana. Jika pesta demokrasi Pilkada berujung rusuh dan terjadi permusuhan dan perpecahan di masyarakat, maka Pilkada menjadi madhorot. Jangan sampai Pilkada serentak tahun 2018 ini menjadi ajang perkelahian antar sesama masyarakat. Menjaga agar Pilkada menjadi damai dan lancar merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Demokrasi yang sudah dibangun jangan sampai dihancurkan karena Pilkada yang rusuh dan tak terkendali.

Kemaslahatan dalam Pilkada juga akan terlihat dengan terpilihnya calon kepala daerah yang komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, memilih kepala daerah yang baik merupakan bagian dari ibadah. Karena di tangan kepala daerah yang baik dan amanah, maka kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Begitu juga sebaliknya, jika kepala daerah yang dihasilkan dalam Pilkada tidak cakap dan tidak mampu memimpin, maka rakyat akan menjadi korban. Kepala daerah yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan partainya akan membawa kemadhorotan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Jadi memilih pemimpin yang baik adalah kewajiban kita semua. Pemimpin yang adil dan melayani akan membawa kemaslahatan. Dan begitu juga sebaliknya pemimpin yang dzolim akan membawa kemadhorotan.

Pertarungan politik dalam Pilkada hendaknya tidak membawa kemadhorotan. Cara-cara kotor yang digunakan untuk memenangkan kontestasi Pilkada harus dihindari karena akan merusak kualitas Pilkada. Gunakanlah cara-cara yang manusiawi

dan beradab dalam memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan. Jika cara-cara yang digunakan baik, maka hasilnya pun akan baik. Namun begitu juga sebaliknya, jika cara untuk merebut kekuasaan tersebut jelek dan cenderung menghalalkan segala cara, maka kekuasaan yang diperoleh tersebut akan cenderung korup.

Kemaslahatan dalam Pilkada harus diutamakan dan menghindari kemadhorotan juga harus dilakukan. Tentu Pilkada dilaksanakan sebagai bentuk pesta demokrasi rakyat untuk memilih pemimpin terbaik untuk memparbaiki nasib rakyat kecil. Bukan untuk menindasnya. Rakyat sudah lama menanti pemimpin yang mampu mengangkat harkat dan martabat nasibnya yang dari hari ke hari makin sulit. Kesejahteraan dan kemakmuran adalah kuncinya. Kepala daerah yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya adalah dambaan seluruh rakyat Indonesia.

Pilkada juga sejatinya menjadi ajang untuk mengadu konsep terbaik dalam pembangunan daerah. Calon kepala daerah dengan konsep terbaiknyalah yang seharusnya diberi kesempatan untuk memimpin. Bukan kepala daerah yang mengandalkan uang untuk merebut simpati rakyat. Ketika Pilkada sudah dirusak oleh permainan uang, maka tunggulah kehancuran daerah tersebut. Karena calon kepala daerah yang banyak menghabiskan uangnya untuk merebut dan membeli kekuasaan, ketika sudah terpilih akan berusaha untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya tersebut.

Kepala daerah yang terpilih akan berusaha kongkalikong dengan pengusaha dan memberikan proyek dalam APBD ke pengusaha. Dan dalam hal ini banyak kepala daerah masuk ke jeruji besi karena ketangkap KPK. Pilkada bukannya membawa kemaslahatan, tetapi membawa kemadhorotan. Oleh karena itu,

Pilkada saat ini harus dijadikan sebagai pesta rakyat yang membawa maslahat.

Pilkada dan kemaslahatan harusnya tidak terpisahkan. Pilkada dan kemaslahatan harusnya menjadi satu kesatuan yang bekerja untuk menjadikan rakyat sejahtera. Bukan mejadikan rakyat melarat dan sekarat. Pilkada jangan dijadikan untuk mengumbar dan menebar kemadhorotan. Stop kemadhorotan dan kembangkan serta laksanakan kemaslahatan. Pilkada yang baik dan berkualitas adalah Pilkada yang mengutamakan dan menjunjung kemaslahatan sebagai tujuan.

24

Pilkada dan Mahar Politik

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 merupakan ajang pemanasan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Pilkada juga merupakan pertarungan hidup mati calon kepala daerah dan pertarungan partai politik dalam menjaga eksistensinya. Calon kepala daerah berani meminjam uang atau berhutang kepada bandar atau cukong demi ikut kontestasi politik lima tahunan. Calon yang menang bisa saja bangga, berbahagia, dan tersenyum karena memiliki harapan dan keyakinan akan mampu mengembalikan pinjamannya. Namun bagi calon yang kalah bisa berujung nestapa dan bahkan bisa menjadi gila.

Pilkada juga akan menjadi ajang pertarungan politik antar partai politik. Partai politik sudah mulai memanaskan mesinnya untuk siap-siap menghadapi kontestasi politik yang lebih berat di Pileg dan Pilpres 2019. Partai politik tidak akan tinggal diam dan akan berjuang mati-matian demi menjaga eksistensinya. Pilihannya bergerak atau terkubur. Jika partai politik selalu aktif mencitrakan diri dengan cara-cara yang elegan dan positif, lalu menyapa rakyat dan memberikan program-program yang dibutuhkan rakyat, maka bisa saja partai-partai tersebut akan mampu menarik simpati rakyat.

Namun sebaliknya, jika di tahun ini partai-partai diam dan tidak bergerak untuk membangun pencitraan, maka partai-partai tersebut akan mati dan terkubur kalah dalam belantara pertarungan politik nasional. Partai baru dan partai lama akan berlomba-lomba untuk menjadi jawara dalam memenangkan calon yang diusungnya dalam Pilkada serentak 2018. Dan juga akan all out bergerak untuk menjadi nomor satu menang di Pileg dan Pilpres 2019.

Isu mahar dalam Pilkada selalu berhembus dalam setiap momen Pilkada. Mahar politik atau pemberian sejumlah uang calon kepala daerah kepada pimpinan partai politik untuk mendapatkan rekomendasi. Di mana rekomendasi tersebut digunakan sebagai syarat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai calon kepala daerah. Disinyalir mahar politik yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah jumlahnya bisa milyaran rupiah. Dan anehnya, para calon kepala daerah berebut untuk mendapatkan rekomendasi partai politik, walaupun harus mengeluarkan banyak uang (Susilo dan Sa'bani, 2018).

Pilkada dan mahar politik tidak akan bisa dipisahkan dan tidak akan terpisahkan. Selama ada Pilkada selama itu pula akan ada

mahar politik. Bahkan partai politik tertentu memasang tarif yang sangat tinggi. Hitungannya bisa perkursi DPRD di kabupaten/kota/provinsi. Satu kursi bisa mencapai 5 Milyar. Jadi jika di satu kabupaten/kota/provinsi satu partai memiliki 5 kursi di DPRD, maka calon kepala daerah demi untuk mendapatkan rekomedasi partai politik harus menyiapkan 25 Milyar.

Terlepas benar atau tidak. Terlepas karena kekecewaan atau tidak. Kasus La Nyala Mataliti harus menjadi perhatian. Namun La Nyala harus membuktikan jika mahar politik permintaan uang 40 Milyar oleh salah satu ketua umum partai politik itu nyata dan terjadi. Karena jika hanya berbicara di media dan tidak mampu membutikannya, maka bisa masuk dalam kategori fitnah. Oleh karena itu, bisa saja La Nyala Mataliti melaporkannya ke Bawaslu atau ke Kepolisian.

Mahar politik harus diangkat ke publik dan harus dibuktikan. Jangan hanya ramai di media lalu menguap dan hilang. Mahar politik bagai dua keping sisi mata uang logam. Pasti ada dan pasti terjadi. Namun cara membuktikannya membutuhkan perhatian khusus. Pilkada yang mahal membuat demokrasi menjadi rusak. Rusak karena jabatan dapat dibeli dengan uang. Dalam demokrasi liberal seperti saat ini. Orang yang memiliki uanglah yang akan mampu mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Uang menjadi sumber utama atau rujukan dalam menjalankan aktifitas kontestasi politik.

Sedangkan orang yang baik, cerdas, berintegritas, religious, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan dalam memimpin, karena tidak memiliki uang, maka akan sulit untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, harus dicari formula di mana kesempatan untuk orang yang memiliki uang atau pun tidak bisa berkontestasi dengan seimbang untuk menjadi kepala daerah.

Jika Pilkada diwarnai mahar politik, maka Pilkada tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Karena banyak calon pemimpin bangsa yang berintegritas dan berkualitas dan memiliki mental melayani tidak memiliki banyak uang sehingga tidak bisa bersaing untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, pimpinan partai politik harus membuka ruang untuk orang-orang yang potensial yang tidak memiliki modal politik untuk bisa bertarung untuk menjadi kepala daerah.

Mahalnya biaya politik jangan dijadikan alasan partai politik untuk meminta mahar kepada calon kepala daerah. Tingginya biaya Pilkada juga jangan menjadi aji mumpung bagi partai politik untuk mengeruk uang untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Mahar politik yang tinggi bisa membuat calon kepala daerah mati-matian ketika nanti sudah menjadi kepala daerah untuk mengembalikan modal politiknya. Jika salah-salah bermain proyek, maka bisa ditangkap KPK dan masuk penjara.

Mari kita ciptakan Pilkada yang tanpa mahar politik. Pilkada yang bersih. Pilkada yang jujur dan adil. Pilkada yang menyenangkan bagi banyak orang. Pilkada yang bisa menghasilkan pemimpin yang berprestasi dan unggul. Ada partai politik tertentu memang tidak meminta mahar kepada calon kepala daerah yang direkomendasikannya. Namun jumlahnya masih sangat kecil dan minim. Yang harus diungkap ke publik adalah partai politik mengusung kader terbaiknya untuk menjadi calon kepala daerah tanpa mahar politik.

Jika mahar politik masih menjadi bagian dari sumber keuangan bagi ketua umum partai politik atau sumber keuangan partai politik, maka Pilkada akan menjadi dilema. Pilkada hanya akan menjadi kontestasi politik yang akan menghasilkan pemimpin yang culas dan korup.

BAB 5

PILKADA DAN MARAKNYA MONEY POLITICS

25

Tahun Politik Tahun Penuh Intrik

Tahun politik menjadi tahun yang menarik untuk diamati. Di tahun politik ini kita akan menghadapi tahun yang penuh intrik. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 menandai dimulainya pertarungan di tahun politik. Di tahun 2018 ini pula tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dimulai. Pilkada, Pileg, dan Pilpres menjadi momen politik dan pesta demokrasi yang akan dipenuhi banyak intrik yang dilakukan oleh aktor-aktor politik di tingkat lokal maupun nasional (Kemendagri, 2018).

Persoalan mahar politik dalam Pilkada menandai pemanasan betapa akan serunya pertarungan di tahun politik. Saling tuduh dan saling serang terkait mahar politik menjadi isu yang seksi untuk menjatuhkan citra salah satu calon presiden di 2019 nanti. Entah karena kecewa karena tidak didukung dan tidak direkomendasikan oleh Partai Gerindra, La Nyala Mataliti menuduh Prabowo meminta mahar untuk pencalonan dirinya menjadi calon gubernur Jawa Timur.

Awal tahun politik ini juga ditandai dengan dipecatnya Oesman Sapta Oedang (OSO) dari ketua umum Partai Hanura dan digantikan oleh ketua umum Hanura yang baru Daryatmo. Digulingkan oleh Daryatmo, OSO tidak tinggal diam. Dia mengklaim dan menunjukkan bahwa kepengurusannya lah yang sah karena sudah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham. Dia juga memecat sekretaris jenderalnya Sarifuddin Sudding dan digantikan oleh Herry Lontung Siregar. Saling pecat antar dua kubu menjadikan Hanura terbelah. Terbelahnya Hanura bukan hanya merugikan internal partai tersebut. Namun juga akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan sistem kepertaian di Indonesia.

OSO memang seorang pengusaha dan politisi petarung. Dua jabatan penting diembannya, ketua umum Hanura dan Ketua DPD RI - padahal ketua dan anggota DPD RI merupakan representasi rakyat dari jalur non-partai. Artinya baru sekarang ini ketua DPD RI dipimpin oleh ketua umum partai politik. Namun sehebat apapun OSO tetap manusia yang memiliki kelemahan. Dan kelemahan itu yang dimanfaatkan oleh lawan-lawannya di internal partai untuk menggusur dirinya. Akankah Hanura bersatu ataukah hancur berkeping-keping. Hanya waktu yang akan menjawab.

Kemarin juga telah dilantik Menteri Sosial yang baru. Idrus Marham dari Partai Golkar dipilih Jokowi untuk menjadi Mensos RI menggantikan Khofifah yang mundur karena mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Timur. Penunjukkan Idrus Marham juga merupakan bagian dari strategi Jokowi untuk mengamankan dirinya agar mendapat tiket dari Partai Golkar untuk pencalonan dirinya maju kembali menjadi calon presiden di 2019.

Tidak digesernya Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian RI menjadi kejutan dan intrik di tahun politik. Padahal Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar. Ini mengindikasikan bahwa Jokowi ingin menjadikan Partai Golkar sebagai teman. Walaupun Jokowi menjilat ludahnya sendiri. Karena pada awal pembentukan kabinet kerja di tahun 2014 Jokowi melarang ketua umum partai menjabat sebagai menteri.

Jika saat ini keputusan Jokowi berbeda dengan keputusan yang lalu, itu hak Jokowi karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Jadi apa pun yang dilakukan presiden dan siapapun yang ditunjuk menjadi menteri itu terserah presiden. Namun keputusan Jokowi mempertahanan Airlangga menjadi preseden yang tidak baik. Karena beda dulu, beda sekarang. Dulu tidak boleh kok sekarang boleh. Biarlah rakyat yang akan menilai.

Untuk menjaga stabilitas di kalangan TNI dan pensiunan TNI, Jokowi menjadikan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Dengan diangkatnya Moeldoko paling tidak Jokowi terhindar dari intrik-intrik politik dari kalangan pensiunan TNI dan juga untuk mengimbangi bahkan menghalangi kekuatan Gatot yang juga sudah menjadi purnawirawan. Pengangkatan Moeldoko paling tidak bisa meredam keluarga besar TNI dan purnawirawannya yang selama ini tersisihkan.

Untuk mengamankan menuju kursi presiden yang kedua kalinya di 2019. Jokowi juga mengangkat Agum Gumelar sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Agum Gumelar merupakan jenderal (Purn) senior. Dan tentu Jokowi merasa perlu memberi tempat kepada Agum Gumelar sebagai bagian untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaannya.

Intrik politik juga sudah terasa dalam perombakan kabinet kemarin. Di mana Idrus Marham dilantik menjadi Menteri Sosial RI menggantikan Khofifah yang mengundurkan diri dalam rangka menjadi calon gubernur Jawa Timur. Sepertinya tidak ada masalah dalam pelantikan Mensos yang baru tersebut. Namun jika kita amati, pelantikan Idrus Marham bisa saja sebagai bagian dari pengamanan atau barter politik antara Jokowi dengan Partai Golkar. Bisa saja Idrus Marham diminta Jokowi untuk mengamankan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar hingga 2019. Pengamanan Airlangga menjadi penting, karena sudah beredar kabar di internal Golkar bahwa Airlangga juga akan jatuh sebelum tahun 2019.

Airlangga bagi Jokowi menjadi sangat penting. Kepentingan Jokowi adalah mendapatkan tiket dukungan bagi pencalonannya kembali untuk bertarung kedua kalinya di Pilpres 2019 nanti. Oleh karena itu, Jokowi tidak me-reshuffle Airlangga dari jabatan Menteri Perindustrian RI. Jokowi berani mengambil resiko mempertahankan Airlangga dengan alasan umur kabinet kurang lebih tinggal setahun dan Airlangga dianggap menteri yang baik. Mempertahankan Airlangga dikabinet tentu tidak gratis. Hal ini mengarah pada dukungan Golkar untuk Jokowi saat ini hingga 2019.

Jokowi bahkan berani menjilat ludah sendiri dengan mempertahankan Airlangga rangkap jabatan sebagai ketua umum

partai Golkar dan Menteri. Padahal di awal-awal pembentukan kabinet kerja Jokowi-JK pada tahun 2014 dengan jelas Jokowi melarang menterinya untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik. Reshuffle memang prerogatif presiden dan kita tidak boleh ikut campur. Namun jika hak prerogatif tersebut mengorbankan sikap konsistensi seorang presiden, maka rakyat Indonesia boleh melakukan kritik yang membangun kepada presiden Jokowi .

Intrik-intrik politik di tahun politik masih akan bertebaran dan akan menghiasi jagat perpolitikan nasional ke depan. Intrik-intrik tersebut tidak terhindarkan. Dan bahkan skalanya akan lebih besar dan massif. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jaga bangsa ini dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab yang akan menghancurkan bangsa ini.

26

Eks TNI/Polri Masuk Gelanggang Politik

Pesta demokrasi Pilkada tahun 2018 berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 171 daerah pada tahun ini menjadi ajang peruntungan dan sekaligus pertarungan bagi eks (Purn) Jenderal TNI/Polri dalam memperebutkan kursi kepala derah atau wakilnya. Fenomena majunya Jenderal TNI/Polri dalam Pilkada memantik banyak pertanyaan dari masyarakat.

Seperti kita ketahui, pasca reformasi 1998 dan pasca diundangkannya UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU

No. 2 tahun 2002 tentang Polri bahwa TNI/Polri tidak boleh lagi terlibat aktif dalam urusan politik. Hingga saat ini pun anggota TNI/Polri aktif tidak diperkenankan memegang jabatan politik. Artinya prajurit TNI/Polri aktif harus netral. Dan jika ingin aktif di politik, maka harus sudah pensiun atau keluar dari kesatuannya masing-masing.

UU TNI dan Polri dengan jelas membagi fungsi dan kewenangan institusi masing-masing. TNI mengurusi pertahanan negara dan Polri mengurusi tentang keamanan negara. Sebelum reformasi, TNI/Polri memiliki perwakilan di DPR RI dan DPRD di seluruh provinsi, kabupaten/kota se Indonesia dengan memiliki fraksi sendiri di setiap tingkatan lembaga legislatif. Namun zaman now, fraksi TNI/Polri sudah dihapus dan ditiadakan. Oleh karena itu, bagi anggota TNI/Polri yang ingin menjadi anggota DPR RI/ DPRD atau pun kepala daerah harus terlebih dulu mundur dari kesatuannya atau pensiun dini (Seregar, 2011).

Jabatan memang menyilaukan. Selain menjadi anggota legislatif baik di pusat maupun di daerah. Jabatan kepala daerah juga menjadi jabatan yang seksi dan diperebutkan oleh kalangan sipil atau pun eks (Purn) TNI/Polri. Bukan sesuatu yang haram dan dilarang memiliki jabatan yang tinggi termasuk menjadi kepala daerah. Bahkan jabatan ditangan orang yang baik, maka jabatan tersebut akan menjadi berkah. Yang dilarang adalah mengejar jabatan dengan cara-cara haram yaitu menggunakan cara-cara curang dan menghalalkan segala cara.

Begitu juga dengan eks (Purn) Jenderal yang masuk ke gelanggang politik untuk bersaing menjadi kepala daerah atau wakilnya. Karena majunya mereka dalam kontestasi pertarungan Pilkada merupakan hak pribadi dan asalkan sudah memenuhi

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya prajurit TNI/Polri yang masih aktif hukumnya wajib mengundurkan diri. Bahkan Kapolri Tito Karnavian mewanti-wanti soal etika politik prajuritnya yang maju dalam Pilkada, tidak elok jika nanti prajurit TNI/Polri gagal ditetapkan menjadi calon kepala daerah kembali kekesatuan.

UU TNI dan UU Polri juga harus singkron dengan UU Pilkada. Ada keuntungan yang dimiliki oleh Jenderal TNI/ Polri yang maju dalam Pilkada serentak tahun 2018 ini. Waktu pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah dengan penetapan paslon kepala daerah ada jeda waktu kurang lebih sebulan. Para Jenderal yang baru mendaftarkan diri menjadi paslon kepala daerah belum wajib mengundurkan diri. Artinya masih bisa aktif di kesatuannya dan masih bisa melakukan lobi-lobi politik bahkan bisa saja menggunakan jabatannya untuk menekan orang lain untuk menguntungkan dirinya.

Dalam UU Pilkada, jenderal-jenderal tersebut diharuskan mundur ketika sudah ditetapkan menjadi paslon kepala daerah oleh KPUD. UU Pilkada perlu direvisi untuk memastikan pertarungan politik dalam Pilkada antara kekuatan sipil dan militer berjalan adil. Revisi bisa dilakukan pada pasal-pasal tertentu yaitu terkait pasal harusnya prajurit TNI/Polri ketika sudah mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah ke KPUD harus mengundurkan diri, tidak menunggu waktu penetapan paslon oleh KPUD.

Rame-rame jenderal aktif dan purnawirawan masuk gelanggang politik pada Pilkada serentak tahun 2018 merupakan salah satu kegagalan partai politik dalam membangun kaderisasi di internal mereka. Kaderisasi tersumbat bahkan mungkin mati dan tidak jalan. Sehingga membuka bagi kalangan eksternal dari

prajurit TNI/Polri untuk mencari peruntungan menjadi kepala daerah. Kaderisasi yang gagal juga menjadi pintu masuk bagi kalangan pemilik modal untuk maju menjadi kepala daerah.

Ketika kalangan eksternal partai didukung untuk menjadi kepala daerah. Bukan hanya akan merusak kaderisasi tetapi juga akan mempersubur budaya instan dan korup. Jadi orang akan berfikir, tidak usah berjuang dan berdarah-darah aktif di partai politik toh nanti yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah juga orang luar partai. Dan orang akan berfikiran lebih baik kumpulkan uang dan beli perahu untuk maju dalam Pilkada. Toh aktif di partai politik juga tidak ada jaminan dicalonkan untuk menjadi pemimpin daerah. Hal inilah yang menyuburkan praktik mahar politik. Di mana calon kepala daerah cukup membayar mahar dengan sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan rekomendasi dalam pencalonan kepala daerah.

Pilkada memang memberi peluang kepada setiap orang termasuk eks prajurit TNI/Polri untuk bersaing menjadi yang paling unggul di Pilkada. Fenomena banyaknya jenderal aktif dan (Purn) yang dicalonkan oleh partai politik menjadikan pertarungan dalam Pilkada semakin seru. Seru karena jaringan struktur TNI/Polri walaupun secara institusi netral. Tapi secara politik keluarganya yang memili hak pilih akan bergerak memenangkan calon dari keluarga besarnya sendiri.

Politik Indonesia sangat cair. Gelombang arus perubahan pasti akan terjadi. Calon kepala daerah dari sipil atau militer memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Untuk menang memang tidak mudah. Perlu kerja keras bersilaturrahmi dan menyapa rakyat. Rakyat perlu pemimpin yang sering turun menyapa untuk melihat denyut nadi kehidupan kalangan bawah. Dan

rakyat membutuhkan pemimpin yang melayani bukan dilayani. Darimana pun asal usul pemimpin itu, baik dari sipil atau pun militer. Tak penting sipil atau militer, yang penting bisa melayani dan memimpin dengan baik itu yang harus dipilih.

27

Mungkinkah Pilkada Tanpa Money Politics?

Pilkada serentak tahun 2018 merupakan momentum pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah yang terbaik, berintegritas, profesional, bertanggung jawab, *siddiq, tabligh, amanah, fathonah,* dan memiliki jiwa melayani. Dengan memiliki kepala daerah yang berprestasi dan unggul suatu daerah akan mengalami banyak kemajuan dalam pembangunan. Dan pembangunan daerah akan berjalan dengan baik (Sakdiah, 2016).

Pemimpin yang baik, berprestasi dan unggul haruslah melalui Pilkada yang jujur, adil, tanpa kecurangan, dan tanpa *money politics.*

Oleh karena itu, menjaga agar Pilkada berjalan dengan fair adalah tugas kita semua. Jika Pilkada dilumuri permainan uang, maka Pilkada sejatinya akan menghasilkan pemimpin yang palsu, korup, dan hanya akan mementingkan diri kelompok dan partainya.

Namun bisakah kita dapat menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada yang tanpa kecurangan dan tanpa permainan uang. Jawabannya bisa. Tapi entah kapan itu bisa terjadi. Fenomena mahar politik menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa usaha membeli rekomendasi kepada partai politik oleh calon kepala daerah itu terjadi. Dan mahar politik menjadi indikasi awal bahwa proses Pilkada sudah diwarnai oleh permainan uang.

Memang di dunia ini tidak ada makan siang gratis. "No free lunch". Termasuk urusan mahar dalam Pilkada. Tidak ada yang gratis untuk mendapatkan rekomendasi partai politik. Partai politik membutuhkan dana segar untuk operasional partai dan untuk memenuhi gaya hidup pimpinan partai. Dan di sisi yang lain calon kepala daerah juga membutuhkan rekomendasi partai politik sebagai syarat pencalonan menjadi kepala daerah.

Saya dengan beberapa teman pernah melakukan riset kecil-kecilan di tiga kabupaten di Jawa Barat terkait dengan *"money politics"* dalam Pilkada, Pileg, Pilpres. Dalam satu kesempatan saya mewawancarai beberapa warga dari berbagai macam profesi. Mereka yang saya wawancarai dengan jelas mengatakan bahwa percuma melakukan kampanye ke semua tempat jika di hari H pencoblosan tidak ada "uang cendol", maka tidak akan dipilih. Sebuah jawaban yang polos dan lugu dari masyarakat yang membutuhkan pendidikan politik yang baik dan benar.

Jawaban masyarakat tersebut harus menjadi refleksi apakah sebenarnya yang terjadi dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Mungkin

masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepala daerah, anggota legislatif, bahkan presidennya. Yang mungkin saja ketika janji-janji kampanye dulu tidak terealisasi. Dan masyarakat tidak merasakan bantuan atau pembangunan yang sudah dijanjikan oleh para pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif. Oleh karena itu, masyarakat berfikir masa bodoh dan dipaksa menerima "uang cendol" dihari pemilihan.

Saya juga melakukan riset lanjutan ingin mengetahui kapan kira-kira waktu yang tepat dalam memberikan "uang cendol" kepada pemilih. Saya menemukan jawaban yang memang cukup memuaskan. Ternyata yang paling efektif untuk memberi "uang cendol" itu di hari H pencoblosan. Hampir 90% masyarakat yang saya wawancarai menjawab hari H pemilihan adalah waktu yang paling tepat dan efektif untuk melakukan operasi pembagian "uang cendol". Oleh karena itu, tidak heran kita sering mendengar istilah "serangan fajar". Artinya para tim sukses Paslon sangat sibuk di waktu fajar untuk membagi-bagikan "uang cendol" tersebut.

Untuk memperkuat riset saya. Saya pun mewawancari salah satu kepala daerah di Jawa Barat. Saya tercengang dan kaget mendapat jawaban dari kepala daerah tersebut. Ternyata ketika dia menacalonkan diri sebagai Bupati menghabiskan uang Rp 40 Milyar. Sebuah angka yang bagi kita cukup besar. Dan cukup untuk memberi makan ribuan orang miskin. Dia pun bercerita bahwa untuk menang menjadi kepala daerah membutuhkan uang yang banyak. Bahkan sang kepala daerah tersebut mempersiapkan satu juta setengah amplop yang diisi dengan uang nominal dua puluh ribuan untuk diberikan kepada pemilih di hari H pemilihan.

Saya juga mewawancarai anggota legislatif daerah terpilih. Untuk terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten juga harus

mengeluarkan banyak modal untuk mempersiapkan "uang cendol" dan lain-lain. Bahkan menurutnya satu pemilih itu dihargai seratus ribu per-pemilih. Saya tersenyum kecut mendengar jawaban dari anggota legislatif tersebut. Masih menurutnya, harga suara pemilih menjadi mahal dan tinggi karena masing-masing calon anggota DPRD juga beradu kekuatan dan gengsi. Jika ada calon A membayar lima puluh ribu per-pemilih, maka calon B akan membayar lebih tinggi dari angka yang dikeluarkan oleh calon A.

Fenomena dan fakta politik uang masih terjadi. Dan bahkan mungkin terjadi di semua wilayah Indonesia. Tentu hal ini jangan dibiarkan. Karena akan merusak esensi Pilkada dan demokrasi. Pilkada sejatinya bukan untuk menyuburkan politik uang. Tetapi untuk menjadi yang terbaik dalam menawarkan visi-misi dan program-program Paslon kepala daerah. Jika uang sudah bisa membeli pemilik suara, maka Pilkada dalam ancaman. Pilkada hanya akan menghasilkan pemimpin yang bermental penyuap dan korup. Sudah bisa dipastikan pemimpin yang terpiih karena menyuap akan menjadi pemimpin yang akan berurusan dengan penegak hukum di kemudian hari.

Menjadikan Pilkada yang bersih, jujur, dan adil menjadi dambaan dan tugas kita semua. Kita tidak hanya bisa berharap pada KPUD, Panwaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian yang harus profesional menyelenggarakan, menjaga, dan mengawal pesta demokrasi Pilkada dengan damai, bersih, jujur, dan adil. Tapi kita juga sebagai warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menjadikan dan memastikan Pilkada menjadi Pilkada yang menghasilkan kepala daerah yang bersih dan amanah.

Momentum Pilkada tahun ini harus menjadi momentum perbaikan daerah dan bangsa. Pilkada yang jujur akan menghasilkan

pemimpin yang jujur pula. Dan begitu juga sebaliknya. Pilkada jangan dirusak oleh "uang cendol". Berbahaya dan merusak sendi-sendi bernegara. Jika mau bersedekah "uang cendol" bersedekahlah dengan ikhlas. Dan bersedekahlah ketika sedang tidak menjadi calon kepala daerah.

28

Menjaga Netralitas dalam Pilkada

Menjaga netralitas dalam Pilkada bagi TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah keniscayaan. Reformasi mengamanahkan bahwa TNI dan Polri aktif harus menjauh dan netral dalam politik. Begitu juga bagi para ASN harus netral dan tidak boleh memihak apalagi dukung mendukung ke salah satu pasangan calon (paslon) yang berlaga dalam Pilkada (Siregar, 2011).

Permintaan Mendagri Cahyo Kumolo kepada Kapolri Tito Karnavian yang meminta agar Kapolri mengusulkan pejabat

eselon I di instansinya harus ditolak. Namun Kapolri sudah mempersiapkan dua nama bintang duanya Irjen M Iriawan dan Irjen Martuani untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Memang ini baru sebatas usulan dan nanti keputusannya ada di tangan Presiden Jokowi.

Mengusulkan dua nama jenderal aktif untuk menjadi Plt Gubernur menjadi pertanyaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukankah Polri itu tugasnya untuk menjaga keamanan masyarakat. Bukan untuk menjalankan pemerintahan di daerah. Apalagi di kedua daerah tersebut –Jabar dan Sumut—kontestasi Pilkadanya diikuti oleh jenderal-jenderal dari TNI dan Polri.

Alasan Mendagri yang mengatakan bahwa kekurangan stok eselon I di kementeriannya untuk mengisi Plt di Jabar dan Sumut tentu tidak berdasar dan patut dicurigai. Bangsa ini tidak pernah kekurangan pejabat eselon I yang berintegritas dan siap untuk mengisi jabatan Plt di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Apakah ini ada kaitannya dengan Mendagri yang berasal dari PDIP yang selama ini partai politik tersebut disinyalir sedang dekat-dekatnya dengan kepolisian. Ataukah ada alasan lain yang rasional sehingga kita mengerti dan paham ada kepentingan apa dibalik usulan kedua jenderal Polri untuk menjadi Plt Gubernur.

Baiknya untuk menghilangkan kecurigaan dari masyarakat usulan pengangkatan jenderal aktif di kepolisian untuk menjadi Plt Gubernur harus ditolak oleh Presiden Jokowi. Karena Presidenlah yang memiliki kewenangan untuk menolak dan menghentikan usulan tersebut. Jika Presiden Jokowi menyetujui usulan dari Mendagri, maka tahun politik ini akan dicederai oleh keputusan yang tidak adil dan tentu dianggap memihak. Biarkan institusi Polri dan jenderal-jenderal bintang duanya yang aktif untuk

mengurus institusinya sendiri dalam menjaga kamtibmas. Bukan untuk menjalankan pemerintahan di daerah dengan menjadi Plt Gubernur.

Dan jika Jenderal-jenderal aktif tersebut jadi ditunjuk menjadi Plt Gubernur, maka persaingan Pilkada bisa mengarah kepada kecurangan. Karena bisa saja Plt tersebut menggunakan kewenangannya untuk mengkondisikan dan memerintahkan birokrasi untuk memenangkan salah satu Paslon tertentu. Ini sangat berbahaya. Apalagi di Jabar dan Sumut peserta Pilkadanya ada yang berasal dari kalangan TNI dan Polri. Dan Jabar dan Sumut merupakan wilayah strategis yang menjadi lumbung suara dalam Pilkada maupun Pilpres.

Sebelum terlanjur. Kita wajib hukumnya untuk mengingatkan pemerintah. Dan mengingatkan masyarakat untuk bergerak menolak penunjukkan jenderal-jenderal aktif untuk menjadi Plt Gubernur di Jabar dan Sumut. Begitu juga fraksi-fraksi di DPR RI harus dengan keras dan lantang untuk menolak kebijakan yang tidak tepat tersebut. Demi untuk menjaga netralitas dan untuk menjaga kewibawaan pemerintah di mata masyarakat.

Pertarungan dalam Pilkada yang melibatkan jenderal-jenderal dari TNI dan Polri merupakan fenomena baru dalam Pilkada langsung. Fenomena ini harus dilihat sebagai bagian dari demokrasi. Demokrasi memang membolehkan para jenderal yang sudah pensiun atau pensiun dini untuk dapat menjadi calon kepala daerah. Namun keikutsertaan para eks jenderal TNI/ Polri harus juga diikuti oleh birokrasi yang netral. Penunjukkan jenderal-jenderal aktif menjadi Plt Gubernur di Jabar dan Sumut disinyalir oleh banyak kalangan akan mengarahkan birokrasi untuk memenangkan calon tertentu.

Bisa saja Kapolri Tito Karnavian sedang melakukan upaya "testing the water" untuk melihat respons masyarakat Indonesia terkait pengajuan usul dua jenderal aktif bintang dua untuk menjadi Plt Gubernur di Jabar dan Sumut. Bisa jadi jika respons masyarakat positif terhadap usulan tersebut, maka pengusulan Irjen M. Iriawan dan Irjen Martuani akan direalisasikan. Namun jika masyarakat menolak, maka tentu akan menarik usulan tersebut. Atau bisa saja memaksakan pengusualan dua jenderal aktif tersebut dengan alasan tidak ada undang-undang atau aturan yang dilanggar.

Dalam demokrasi kita tidak boleh memaksakan kehendak. Apalagi kehendak tersebut berlawanan dengan aspirasi masyarakat. Kapolri harus bertindak arif dan bijaksana. Dan perlu untuk meninjau kembali bahkan menolak permohonan dari Mendagri terkait pengusulan nama-nama pejabat eselon I di institusi Polri untuk diangkat menjadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut.

Sudahlah. Lebih baik Mendagri bersikap adil dan bijaksana untuk tidak meminta jenderal-jenderal di Kepolisian untuk dijadikan kepala daerah. Isi saja jabatan Gubernur di Jabar dan Sumut dengan pejabat-pejabat eselon I dari Kemendagri atau dari kementrian lain. Banyak eselon I di negeri ini yang layak dan pantas untuk menjadi Plt Gubernur. Tinggal diseleksi dan diberi kesempatan saja.

Kita tentu tidak mau demokrasi kita set back ke belakang. Pengusulan dan penunjukkan jenderal aktif dari Kepolisian untuk menjadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut adalah sebuah kekeliruan yang harus dikoreksi. Jangan berdalih tidak ada aturan yang melarang atau berdalih tidak ada pejabat eselon I di Kemendagri yang cakap untuk menjadi Plt Gubernur. Atau juga berdalih

pernah ada kejadian serupa bahwa pejabat Polri pernah ditunjuk menjadi Plt kepala daerah. Atau beralasan penunjukan tersebut untuk meredam konflik di daerah.

Menjadikan jenderal-jenderal aktif menjadi Plt Gubernur merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi. Biarkan Polisi menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan masyarakat. Bukan untuk memimpin pemerintahan di daerah. Jika ingin memimpin daerah harus mundur dulu dan mengikuti kontestasi Pilkada untuk menjadi kepala daerah. Ini baru adil dan fair.

Mari kita bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dan mari kita ciptakan Pilkada yang damai. Pemerintah jangan membuat kebijakan yang kontraproduktif dan meresahkan masyarakat. Biarkan Polisi bertugas mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat dengan baik. Menjadikan institusi kepolisian yang bersih lebih penting daripada soal penunjukkan dua jenderal aktif menjadi Plt kepala daerah. Kita mendambakan Polri yang bersih dan berwibawa. Dan mendambakan Polri yang tidak berpolitik.

29

Kursi Panas Pilkada 2018

Pilkada serentak 2018 yang melibatkan 171 daerah merupakan salah satu Pilkada terpanas. Selain karena Pilkada terjadi di tahun politik, Pilkada juga diikuti oleh Jenderal atau purnawirawan Jenderal baik dari TNI maupun Polri. Pilkada menjadi panas juga disebabkan kepentingan Pileg dan Pilpres 2019 berkelindan menjadi satu (Tedjo, 2018).

Turunnya para jenderal aktif maupun yang sudah pensiun ke gelanggang politik Pilkada menjadikan pertarungan dalam memperebutkan jabatan kepala daerah menjadi panas dan menarik.

Terlebih-lebih Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kapolri Tito Karnavian untuk mempersiapkan jenderal bintang dua –level eselon I—untuk menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala daerah di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Gayung pun bersambut, Kapolri sudah menyiapkan dua nama jenderal aktif yaitu Irjen M. Iriawan dan Irjen Martuani Sormin untuk diproses menjadi Plt Gubernur di dua provinsi yang strategis dan banyak pemilihnya tersebut. Keputusan penunjukan dua jenderal aktif dari institusi Polri memang belum terealisasi. Namun kebijakan tersebut dikritik dan ditolak oleh banyak kalangan. Karena dikhawatirkan Pilkada tidak akan berjalan dengan netral dan fair.

Jabatan kepala daerah merupakan jabatan yang sangat strategis. Oleh karena itu, tidak heran jika elit-elit dan aktor politik –parpol dan non-parpol—termasuk para calon presiden memiliki kepentingan agar Paslon yang didukungnya menang. Kemenangan menjadi harga mati. Dan kemenangan bisa saja dilakukan dengan cara-cara curang dan menghalalkan segala cara.

Memegang dan menguasai kepala daerah terpilih menjadi keniscayaan. Paling tidak kepala daerah yang terpilih tersebut akan mendukung elit atau aktor sebagai calon presiden di 2019 nanti. Menguasai kepala daerah berarti sudah menguasai setengah (lima puluh persen) pada pertarungan Pilpres nanti. Karena bagaimanapun kepala daerah adalah penguasa daerah yang powerfull yang dapat menggerakan birokrasi dan masyarakat untuk memilih capres tertentu.

Jadi, memenangkan Pilkada di 171 daerah bagi partai politik dan calon presiden menjadi kunci memuluskan langkah menang di Pilpres 2019. Kepala daerah bukanlah orang biasa, mereka adalah

orang kuat yang memiliki power dan modal. Wajar jika calon-calon presiden 2019 ingin mendekati, menguasai, dan memenangkan pasangan calon (paslon) yang didukungnya.

Karena begitu strateginya posisi kepala daerah. Anggota DPR RI, mantan Menteri, dan tokoh-tokoh nasional lainnya juga rame-rame turun gelanggang untuk mengikuti kontestasi Pilkada tahun ini.

Pilkada serentak 2018 ini juga menjadi panas karena partai-partai politik sudah mulai memanaskan mesinnya untuk mempersiapkan pertarungan di Pileg 2019. Menjaga eksistensi partai politik bagi pimpinan dan kader partai merupakan sebuah keharusan. Jika di Pilkada tahun ini partai-partai tidak bergerak menyapa dan mendekati masyarakat. Bisa jadi partai-partai tersebut akan mati dan akan terkubur eksistensinya.

Memenangkan Paslon kepala daerah menjadi kewajiban bagi partai politik. Partai politik pengusung dan pendukung calon kepala daerah akan senang dan menikmati sumber-sumber kekuasaan dan financial jika kepala daerah yang didukungnya menang. Dan begitu juga sebaliknya, jika paslon kepala daerah yang didukung oleh partai tersebut kalah, maka akan merana dan rugi karena kehilangan pendapatan.

Partai politik yang banyak memenangkan paslon kepala daerah yang didukungnya akan membawa harapan dan dapat menjaga eksistensi partai di tahun politik. Tahun yang penuh intrik. Dan tahun di mana partai politik harus banyak mengeluarkan taktik agar tidak tercabik-cabik. Partai politik yang banyak kalahnya dalam mengusung kepala daerah akan bernasib tragis. Dan akan sangat berat dalam menjaga eksistensi partai dan berat dalam menghadapi kontestasi Pileg 2019.

Kerja keras adalah kuncinya. Partai-partai yang tidak bekerja keras akan terlumat dan terhempas oleh persaingan politik yang keras dan panas ditahun politik. Saling sikut dan saling bunuh akan menjadi fenomena politik nasional tahun ini dan tahun depan. Demi menjaga eksistensi partai-partai politik akan melakukan segala cara agar partainya tidak tenggelam dan hilang dari perpolitikan nasional.

Kursi panas Pilkada seharusnya tidak harus panas dan tidak harus terjadi. Kursi atau jabatan sejatinya adalah amanah dari rakyat untuk berbuat terbaik melayani rakyat. Dan Pilkada harusnya menyenangkan dan membahagiakan, karena merupakan bagian dari pesta demokrasi di daerah untuk memilih kepala daerah terbaik.

Kursi panas Pilkada menjadi semakin panas karena Pilkada dimaknai sebagai pertarungan politik antarpaslon dan partai politik untuk saling mengalahkan dan menghancurkan. Bukan untuk bahu-membahu saling mendukung. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam Pilkada muncul konflik politik. Demokrasi elektoral dalam Pilkada jangan dibuat panas dan membara. Tapi buatlah menjadi damai, aman, dan nyaman.

Pilkada yang tidak jujur juga akan menambah Pilkada semakin panas. KPUD harus bertindak profesional dan netral. Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan juga jangan bekerja untuk Paslon tertentu. Jika KPUD, Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan bekerja dengan baik dan profesional, maka Pilkada pun akan berjalan dengan damai, aman, dan lancar. Namun sebaliknya, jika penyelenggara, pengawas, dan penegak hukum tidak netral, maka Pilkada akan membara.

Menjaga Pilkada agar damai adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas KPUD, Panwas, dan penegak hukum. Tapi tugas

kita sebagai masyarakat. Masyarakat memiliki kedaulatan dan independensi untuk menjadikan Pilkada yang damai. Biarkan kursi panas Pilkada diperebutkan. Namun hati dan pikiran kita harus tetap adem. Dan kita tidak boleh terpancing untuk memanas-manasi Pilkada yang memang sudah panas. Mari kita jaga agar persatuan dan persatuan tetap terpelihara.

30

Menjadikan Pilkada Penuh Makna

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 merupakan hajatan rakyat untuk memilih pejabat yang pro-rakyat dan berdaulat. Rakyat yang saat ini hidupnya melarat dan sekarat membutuhkan pejabat yang mampu mengangkat harkat dan martabatnya. Pilkada adalah salah satu jalannya. Jalan mencari dan memilih pejabat – kepala daerah—yang bersih dan tidak terlibat skandal hukum berat yang akan menjadi laknat (Zulfikar, 2015).

Pilkada sejatinya membuat rakyat bahagia. Bahagia karena melalui Pilkada akan terpilih pejabat daerah yang dapat membawa

perubahan bagi daerahnya. Pejabat terpilih sejatinya harus mampu membawa perubahan nasib *wong cilik* menjadi ciamik dan sejahtera lahir dan bathin.

Pilkada bukanlah ritual politik lima tahunan semata. Pilkada harus dimaknai sebagai ajang kompetisi pertarungan antara aktor-aktor politik dalam menghasilkan pejabat (pemimpin) yang mumpuni dalam mengelola pemerintahan di daerah. Pejabat yang terpilih haruslah yang terbaik di antara yang terbaik – *primus inter pares* — bukan pejabat karbitan yang tidak tahu bagaimana cara mengatur daerah dan negara.

Pilkada yang bermakna bukan hanya menjalankan prosedur demokrasi tanpa arti. Pilkada adalah momen terbaik (*golden moment*) bagi rakyat untuk merubah nasib untuk lima tahun kedepan. Berdiam diri membiarkan Pilkada penuh pelanggaran dan kecurangan sama artinya dengan membiarkan nasib yang tidak akan berubah selama lima tahun. Nasib rakyat memang bukan bergantung pada Pilkada. Tapi nasib rakyat akan dipengaruhi oleh siapa yang menang dalam Pilkada.

Jika yang terpilih adalah pejabat munafik, penuh kepalsuan, dan pembuat kerusakan, maka yang akan menderita adalah rakyat juga. Pejabat yang dalam dirinya penuh kepalsuan dan kepura-puraan akan membawa rakyat kepada kesengsaraan. Sengsara lahir dan bathin. Di dunia bahkan mungkin di akhirat kelak. Pilihlah calon pejabat daerah yang merakyat dan apa adanya. Bukan ada apanya. Apalagi mengada-ngada. Memilih calon pejabat daerah yang baik akan berkorelasi positif dengan nasib rakyat.

Pejabat sejati bukanlah pejabat yang tipu-tipu rakyat. Tetapi dengan ikhlas dan tulus berjuang untuk memperbaiki nasib rakyat di daerah yang jauh dari kesejahteraan dan kemakmuran. Pejabat

sejati tidak menampilkan pencitraan yang penuh dengan kepalsuan. Pejabat sejati akan memiliki arti dan akan selalu melayani dengan setulus hati. Yang dipikirkan pejabat sejati adalah rakyatnya. Bukan diri, keluarga, kelompok, dan partai politik yang mendukungnya.

Mencari pejabat sejati memang tidak mudah. Tetapi juga bukan sesuatu yang sulit. Artinya di antara calon Paslon kepala daerah yang tersebar di 171 daerah pasti dan akan ada Paslon yang tulus untuk mengabdi demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Kepentingan rakyat harus diutamakan demi utuhnya bangsa dan negara ini.

Pilkada akan penuh makna jika masyarakat cerdas dalam memilih calon pejabat. Menghindari politik uang adalah salah satu caranya. Hindari pemberian uang berapapun jumlahnya dari para calon pejabat daerah tersebut. Sekali saja rakyat menerima pemberian mereka, maka sesungguhnya nasib rakyat sedang dipertaruhkan. Pejabat daerah yang menang karena uang dan karena membeli suara pemilih, maka sudah bisa dipastikan bahwa pejabat tersebut bermental buruk dan korup.

Akan hancur jika suatu daerah dipimpin oleh pejabat daerah yang bermental penyuap. Karena jabatan akan diperjual-belikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya untuk kepentingan rakyat akan dijadikan proyek bancakan dan diijonkan kepada para pengusaha. Ketika APBD sudah dibeli oleh pengusaha, maka yang akan terjadi adalah pembangunan yang tidak berorientasikan kerakyatan. Rakyat akan tetap miskin dan melarat.

Jika ingin Pilkada penuh makna. Penyelenggara Pilkada seperti KPUD dan Panwalu. Bahkan Kepolisan dan Kejaksaan. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat lokal harus bahu membahu menjadikan

Pilkada bersih. Pilkada yang terhindar dari kecurangan. Dan Pilkada yang menjadi model bagi sejarah pembangunan bangsa kedepan.

Pilkada menjadi tidak bermakna dan cenderung rusak. Jika para penyelenggara Pilkada –KPUD dan Panwaslu—main mata dan *kongkalikong* dengan Paslon kepala daerah. Jangan sampai penyelenggara Pilkada tersebut menerima janji atau uang untuk memenangkan Paslon tertentu. Menjaga integritas bagi penyelenggara Pilkada adalah kewajiban. Dan menyelenggarakan Pilkada yang jujur dan bersih adalah keharusan. Jangan sampai Pilkada ternodai atau dinodai oleh oknum-oknum penyelenggara Pilkada yang tidak bertanggung jawab.

Pilkada akan tidak bermakna akan hancur. Jika oknum-oknum KPUD dan Panwaslu bersekutu berbuat curang demi uang. Uang jangan sampai membeli kehormatan dan kewibawaan para penyelenggara Pilkada di daerah. Menjaga agar Pilkada lebih bermakna jauh lebih baik dari membiarkan kecurangan dan persekongkolan. Demi untuk menjaga marwah dan kredibilitas penyelenggara Pilkada hindari janji-janji dan pemberian dari Paslon manapun.

Profesionalitas para penyelenggara Pilkada akan diuji. Jangan sampai melakukan perbuatan tak terpuji karena nanti bisa masuk jeruji besi. Kebaikan anggota KPUD dan Panwaslu dalam mengawal dan menjaga Pilkada yang netral berintegritas akan menentukan pemimpin daerah terpilih. Jika prosesnya baik, maka tentu hasilnya juga akan baik. Namun jika proses Pilkadanya dilumuri oleh kecurangan dan manipulasi, maka yang akan dihasilkan adalah pejabat kepala daerah yang memiliki mental perusak.

Kepolisian dan Kejaksaan juga harus netral. Begitu juga aparat TNI dan pegawai negeri. Jangan sampai pihak Kepolisian dan Kejaksaan juga terbawa arus untuk berbuat dan bertindak mendukung salah satu Paslon. Demi menjaga Pilkada yang penuh makna, Kepolisian dan Kejaksaan harus profesional. Bangsa ini membutuhkan Polisi-polisi dan Jaksa-jaksa yang jujur. Pilkada jangan dikotori oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari para oknum Polisi dan Jaksa. Dan kita masih yakin banyak Polisi dan Jaksa yang jujur dan bersih yang siap mengawal Pilkada yang penuh warna dan dinamika.

BAB 6

PILKADA DAN MOMENTUM PERUBAHAN BANGSA

31

Pilkada Zaman Now

Membahas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 tidak akan ada habis-habisnya. Pilkada zaman now akan diwarnai oleh pemilih zaman now pula. Karakteristik pemilih zaman now tentu berbeda dengan pemilih tradisional atau pemilih zaman old. Pemilih zaman now lebih rasional dan sangat mengandalkan otak daripada otot dan dengkul. Pilkada zaman now akan menjadi kekuatan bagi pemilih zaman now untuk terlibat aktif dalam politik. Gelora jiwa muda pemilih zaman now tidak hanya akan mewarnai dan mempengaruhi Pilkada. Tetapi juga akan menjadi faktor menentukan dalam perpolitikan nasional ke depan.

Pilkada zaman now juga diwarnai oleh fenomena kuatnya incumbent di beberapa daerah yang menghasilkan calon tunggal. Ada 19 daerah yang Paslonnya hanya satu dan melawan kotak kosong. Entah apa yang terjadi. Demokrasi memang memberi pilihan kepada siapapun untuk dapat bertarung dalam Pilkada. Namun orang sering lupa bahwa demokrasi juga akan memunculkan orang-orang kaya atau orang kuat lokal yang dapat membajak demokrasi. Calon tunggal di beberapa daerah membuktikan bahwa Pilkada tidak memberi ruang kepada yang lain untuk ikut dalam kontestasi politik Pilkada.

Pilkada yang berbarengan dengan tahun politik membuat Pilkada penuh dinamika. Fenomena mahar politik, calon tunggal, wacana penunjukkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur dari kalangan jenderal aktif, money politics, pecahnya alumni 212 – banyak alumni yang tidak direkomendasi partai tertentu untuk menjadi calon kepala daerah-- jenderal dan eks jenderal TNI/ Polri menjadi kontestan peserta Pilkada, dan partai-partai politik berlomba membajak non kader untuk menjadi calon kepala daerah. Semua itu menandakan bahwa Pilkada zaman now menjadi pesta demokrasi rakyat yang harus dikelola dengan baik.

Pilkada zaman now merupakan barometer untuk mengukur kekuatan pada pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pilkada zaman now merupakan pertarungan dalam menjaga eksistensi partai politik. Pilkada zaman now merupakan pertarungan adu pengaruh, strategi dan kekuatan para calon presiden. Pilkada zaman now merupakan Pilkada pertarungan hidup mati para aktor dan elit pemburu kekuasaan. Dan Pilkada zaman now harus membawa perubahan dan perbaikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pilkada zaman now jangan sampai merusak persaudaraan. Pilkada zaman now jangan sampai mengoyak rasa persatuan dan kesatuan. Pilkada zaman now jangan sampai menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan. Pilkada zaman now jangan sampai menciptakan konflik horizontal. Pilkada zaman now jangan sampai membawa malapetaka dan kesengsaraan bagi masyarakat. Pilkada zaman now harus melahirkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Pemimpin yang se-iya dan sekata antara antara perkataan dan perbuatan. Dan pemimpin yang membanggakan bagi yang dipimpinnya.

Untuk mengikuti dan menjadi peserta Pilkada memang tidak mudah. Butuh modal besar dan uang banyak untuk menjadi calon kepala daerah. Uang memang masih menjadi raja dan menentukan dalam hiruk-pikuk Pilkada zaman now.

Untuk menjadi calon kepala daerah, bukan seberapa hebat kita, pernah kuliah di kampus terbaik – dalam dan luar negeri - berprestasi di tingkat nasional dan internasional, penulis puluhan buku best seller, cendekiawan dengan prestasi segudang, intelektual dengan karya monumental. Bukan, bukan itu yang pertama akan ditanya oleh pimpinan partai politik. Pertanyaan pertama dan utama adalah seberapa besar dan banyak Anda memiliki uang. Karena bagi pemuja kekuasaan. Dengan memiliki uang lima puluh persen pertarungan dalam Pilkada sudah dimenangkan. Inilah yang membuat demokrasi menjadi rusak. Demokrasi dibajak oleh para elit politik sehingga demokrasi menjadi mahal. Dan hanya orang-orang yang berduitlah yang akan menjadi kepala daerah.

Pilkada zaman now sesungguhnya memberi ruang kepada bangsa ini untuk berubah. Karena hanya dengan Pilkada akan terpilihlah pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana yang

akan membangun bangsa dan negara. Pilkada zaman now harus membawa harapan yang besar dan tinggi bagi masyarakat. Masyarakat harus tercerahkan. Bukan termarginalkan. Masyarakat harus terdidik. Bukan diulik. Masyarakat harus senang. Bukan ditendang. Masyarakat harus dilayani. Bukan melayani. Dan masyarakat harus sejahtera. Bukan dihina.

Sejatinya Pilkada zaman now menjadi sarana bagi rakyat untuk berdaulat. Bukan untuk dilaknat. Rakyat harus menjadi subjek bukan menjadi objek pembangunan. Rakyat harus menjadi raja. Bukan diarahkan untuk menjadi durjana. Rakyat yang harus menentukan bulat lonjong dan maju mundurnya suatu daerah. Rakyat jangan dibohongi dan ditipu dengan obral janji-janji yang tanpa realisasi.

Pilkada zaman now harus menjadi contoh dan referensi bagi dunia. Bahwa Pilkada di Indonesia menjadi ajang mencari pemimpin pilihan. Pemimpin yang bisa berprestasi di tingkat dunia. Semoga dalam Pilkada zaman now dapat melahirkan gubernur/bupati/walikota yang memiliki kualitas dan berprestasi di tingkat internasional. Karena bisa saja suatu hari nanti kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2018 ini dapat menjadi pemimpin nasional dan internasional.

Pemimpin yang berkualitas baik, tidak datang dengan sendirinya. Tetapi harus diciptakan dan dikader. Oleh karena itu, kaderisasi kepemimpinan di tingkat lokal dan nasional menjadi keniscayaan. Bangsa ini harus dibangun dengan kekuatan kepemimpinan yang berkarakter dan berkualitas unggul (Kojoh, 2014).

Rakyat akan bangga jika daerahnya menjadi maju, kesejahteraannya meningkat, dipimpin oleh kepala daerah pilihan

dan berprestasi. Kepemimpinan yang menginspirasi dan menjadi suri tauladan juga menjadi kunci pembangunan daerah dan bangsa. Kepala daerah yang menginspirasi akan diikuti dan dituruti oleh warganya. Dan kepemimpinan yang memberi contoh yang baik kepada rakyatnya akan menjadi panutan bagi warganya. Antara pemimpin dan rakyat harus bahu membahu dalam membawa daerahnya maju dan dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia.

Pilkada zaman now jangan sampai menjadi Pilkada yang menyebalkan dan berlumur dosa karena Pilkadanya diwarnai dengan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yaitu membeli suara pemilih dengan uang. Mari kita lawan politik uang dengan menjaga moralitas kita sebagai pemilih. Kitalah yang menentukan apakah Pilkada zaman now berjalan dengan normal atau curang. Kecurangan hanya akan menghasilkan pemimpin yang bermoral bejat dan laknat.

32

Pilkada dan Pertaruhan Masa Depan Bangsa

Masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Pertaruhan itu ada dalam Pilkada serentak tahun 2018. Pilkada menjadi salah satu pintu masuk dalam pembangunan bangsa. Dan akan menentukan masa depan bangsa ke depan. Pilkada yang beradab akan menciptakan pembangunan daerah yang pesat dan juga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika daerahnya maju, maka pembangunan nasional pun akan melaju. Begitu juga sebaliknya, jika daerahnya terbelakang, maka pembangunan nasional akan stagnan bahkan cenderung akan mundur ke belakang.

Pilkada juga akan menjadi momen menentukan dalam proses perjalanan bangsa ke depan. Pilkada yang aman, damai, bersih, jujur, dan adil akan menjadi cermin bagi dunia internasional dan menilai bahwa bangsa Indonesia sukses dalam menjalankan pesta demokrasi lokal dan akan menjadi inspirasi dunia. Pilkada yang sukses akan menjadi pembuktian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Namun jika Pilkada berlangsung *chaos*, terjadi intevensi oleh pemerintah, penyelenggara Pilkada –KPUD dan Panwaslu—ikut "cawe-cawe" dan diam-diam mendukung calon tertentu, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan tidak netral, Badan Intelijen Negara (BIN) memihak, terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif, konflik horizontal, saling fitnah dan adu domba, ini semua akan mengancam peradaban dan masa depan bangsa.

Masa depan daerah dan bangsa tidak mungkin bisa dibangun dengan kecurangan, kebencian, keributan, dan kegaduhan. Masa depan bangsa hanya akan bisa dibangun kedamaian, persatuan, kesatuan, cinta, dan kasih sayang.

Bangsa ini sedang mengalami defisit keteladanan. Jika zaman old kita memiliki pemimpin yang bisa dijadikan panutan; seperti HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Sjahril, Mohammad Roem, KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, Buya Hamka dan masih banyak lagi tokoh-tokoh bangsa yang bisa dijadikan panutan dalam beragama dan bernegara.

Di zaman *now* kita sedang dihadapkan pada dilema miskinnya keteladanan dari para pemimpin daerah dan pemimpin nasional. Fakta menunjukkan banyak dari para bupati/walikota/gubernur, dan DPRD terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

karena melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Para kepala daerah yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya terjebak dalam permainan tindak pidana korupsi.

Begitu juga dalam konteks kepemimpinan nasional. Banyak tokoh nasional yang terperangkap dalam perbuatan nista dan tercela karena melakukan korupsi, baik yang dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah. Banyak Menteri, Anggota DPR RI, Ketua Umum Partai Politik yang terjerat KPK karena menggarong uang negara.

Bahkan eks ketua-ketua lembaga tinggi negara seperti Ketua MK Akil Muchtar, Ketua DPD RI Irman Gusman, dan Ketua DPR RI Setya Novanto menjadi terdakwa dan terpidana dan dijebloskan kepenjara. Kepada siapa lagi rakyat harus percaya. Kepada siapa lagi rakyat harus mencontoh. Kepada siapa lagi rakyat harus mengadu. Kepada siapa lagi rakyat harus menyampaikan aspirasi dan keluhan hidupnya jika pejabat-pejabatnya – baik di daerah maupun di pusat - asyik sendiri terlibat permainan korupsi yang tak pernah berhenti.

Defisit keteladan dalam kepemimpinan daerah dan nasional harus menjadi evaluasi bagi kita semua. Tak mungkin daerah dan bangsa ini dibangun atas dasar perilaku korup yang dicontohkan oleh pemimpin daerah dan nasional. Bangsa ini akan memiliki masa depan yang cerah, gemilang dan indah jika kepemimpinan di daerah dan nasional kompak bersatu padu dalam membangun bangsa. Hindari dan jangan libatkan diri dalam korupsi. Selain karena akan menghancurkan daerah, bangsa, dan negara. Tetapi juga akan memberi contoh yang buruk bagi masyarakat.

Masyarakat sedang dan akan mencari pemimpin daerah yang bisa dijadikan panutan bagi mereka. Kurangnya contoh baik

yang diberikan oleh elit-elit lokal dan nasional membuat rakyat kehilangan panutan. Yang terjadi adalah *distrust* antara rakyat kepada pemimpinnya. Jika rakyat sudah tidak percaya kepada pemimpinnya, maka tunggulah kehancuran pemimpin tersebut. Dan jika rakyat sudah marah, maka yang rugi bukan hanya pemimpinnya. Tetapi juga daerah, bangsa, dan negara.

Pilkada harus jadi *starting point* untuk membangun masa depan bangsa yang yang sejahtera. Pilkada jangan hanya dijadikan ajang untuk mencari kekuasaan semata. Pilkada jangan hanya dijadikan ambisi para elit untuk menjadi raja-raja di daerah. Pilkada juga jangan hanya dijadikan cara untuk mengeruk kekayaan di daerah. Tetapi jadikanlah Pilkada sebagai momen terbaik untuk membangun daerah dan bangsa kearah yang lebih baik (Adriansyah, 2017).

Masa depan bangsa dan negara ada di tangan kita semua. Kitalah yang harus menentukan masa depan bangsa dan negara. Jangan hanya karena uang "cendol", sembako, atau pemberian lainnya dari para kontestan Pilkada, masa depan bangsa dipertaruhkan. Yakinlah, jika kita semua menolak *money politics,* maka para pasangan calon (Paslon), partai politik, dan tim suksesnya juga tidak akan berani untuk membeli suara.

Namun terkadang teori jauh dari kenyataan. Secara teori dan aturan kita tidak diperkenankan untuk melakukan dan menerima pemberian dari pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada. Tapi faktanya pemberian uang kepada oknum-oknum penyelenggara, oknum penegak hukum, dan masyarakat massif terjadi diseluruh daerah di wilayah NKRI ini.

Stop Money Politics. Jangan ajari rakyat untuk melakukan suap dan praktik korup yang akan menghancurkan masa depan

bangsa. Stop memberi contoh yang buruk kepada masyarakat. Stop dalam melakukan kecurangan-kecurangan. Disadari atau tidak, diakui atau tidak. Pilkada yang baik, bersih, jujur, dan adil akan menentukan masa depan bangsa. Dan Pilkada yang rusak, curang, dan dikondisikan akan menghancurkan bangsa.

33

Kartu Kuning untuk Jokowi

Terlepas pro dan kontra yang menyertai protes Zaadit Taqwa kepada Presiden Jokowi diacara Dies Natalis Universitas Indonesia (UI) yang ke-68. Zaadit Taqwa merupakan mahasiswa fenomenal. Betapa tidak. Di saat mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh Indonesia berdiam diri dan disibukkan dengan tugas-tugas kuliah. Zaadit Taqwa muncul menjadi mahasiswa yang membanggakan. Karena mampu melakukan protes secara terbuka kepada Kepala Negara (Universitas Indonesia, 2018).

Kartu kuning yang diberikan Zaadit Taqwa kepada Presiden RI ke-7 tersebut harus dimaknai positif dan konstruktif. Positif

karena Zaadit Taqwa mampu mengingatkan Jokowi agar dalam menjalankan pemerintahan tidak keluar jalur. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus di kerjakan oleh kepala pemerintahan tersebut. Konstruktif karena kritik tersebut bermaksud untuk membangun bangsa kearah yang lebih baik.

Kritik jangan dimaknai menghujat. Kritik jangan dimaknai menghina. Kritik jangan dimaknai merendahkan martabat. Kritik jangan dimaknai anti pemerintah. Kritik jangan dimaknai ingin dirangkul. Kritik jangan dimaknai ketidaksukaan. Kritik jangan dimaknai perbuatan yang aneh. Kritik jangan dimaknai sebagai kebencian. Kritik jangan sampai dimaknai sebagai kejahatan. Tapi kritik harus dimaknai sebagai kasih sayang. Kasih sayang seorang Zaadit Taqwa kepada Jokowi sebagai Presiden RI.

Zaadit Taqwa bukan mahasiswa biasa. Dia Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI. Tidak heran, jika apa yang dilakukannya memprotes Jokowi dengan cara mengacungkan "map kuning" dan juga meniup pluit mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Dengan keberaniannya tersebut, dia akan tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Indonesia membutuhkan anak muda pemberani, cerdas, gesit, progresif, produktif, inovatif, kreatif, percaya diri, mandiri, murah hati, bijaksana, menjunjung moralitas, optimis, dan bermental baja. Dan Indonesia tidak membutuhkan pemuda yang pengecut, pemalas, pragmatis, rendah diri, pesimis, a-moral, berpangku tangan, pengkhianat, *memble*, curang, culas, bermental tempe dan ayam sayur.

Zaadit Taqwa merupakan mahasiswa dan pemuda zaman now. Anak muda yang kritis dan sensitif dalam melihat permasalahan-permasalahan bangsa yang harus diperbaiki. Gizi

buruk dan kelaparan di Papua, kenaikan harga listrik, kenaikan harga bahan pokok, impor beras, makin sulitnya beban masyarakat, penganiayaan kepada para ulama, penunjukkan jenderal aktif menjadi plt gubernur, kemiskinan, dan kebodohan merupakan permasalahan-permasalahan yang harus dicari jalan keluar dan diselesaikan.

Kartu kuning dari Zaadit Taqwa merupakan peringatan agar Jokowi dalam menjalankan pemerintahannya *on the track,* tidak berbelok-belok atau bahkan lari dari tanggung jawab. Sebagai kepala negara dan pemerintahan yang baik, Jokowi harus menerima kritikan dan peringatan tersebut dengan lapang dada. Dan bahkan jika perlu mengundang Zaadit Taqwa dan pengurus BEM UI lainnya ke Istana Negara untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa yang sedang dihadapi.

Say thank you-lah kepada Zaadit Taqwa. Di saat mahasiswa dan masyarakat seperti kita diam dalam melihat ketidakadilan dan keterpurukan. Ekonomi makin sulit, rakyat makin terjepit, kerusakan moral meraja rela, korupsi terjadi di mana-mana, kekayaan negara dikuasai oleh segelintir orang, narkoba yang tak terbendung. Zaadit Taqwa berdiri untuk mengingatkan kita semua bahwa bangsa ini harus segera diperbaiki, bahwa pemerintah harus bertindak cepat dan serius dalam mengurus negara dan rakyatnya.

Jangan biarkan rakyat menderita kelaparan dan gizi buruk. Jangan biarkan negara ini berjalan tanpa arah. Jangan biarkan rakyat semakin melarat karena dihisap oleh pejabat yang korup dan laknat. Jangan biarkan rakyat sekarat karena tidak berdaulat. Jangan biarkan rakyat bekerja sendirian. Pemerintah harus hadir untuk mengangkat harkat dan derajat rakyat.

Rakyat jangan hanya dicari, didatangi, dan disapa ketika akan Pilkada, Pileg, atau Pilpres. Rakyat harus menjadi sumber inspirasi dalam mengambil kebijakan bernegara. Jika rakyat lapar, maka negara harus hadir dan menjadikannya kenyang. Jika rakyat miskin, pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakannya. Jika rakyat bodoh, maka pemimpin bangsa ini yang harus mencerdaskannya. Jadikanlah rakyat sebagai subjek pembangunan. Dan jangan jadikan rakyat sebagai objek pembangunan.

Peringatan kartu kuning dari Zaadit Taqwa menandakan bahwa pemerintah dianggap abai terhadap persoalan-persoalan kerakyatan. Jangan sampai pemerintah salah urus dalam mengelola negara ini. Dan jangan sampai karena sibuk kampanye dan pencitraan rakyat yang menjadi korban.

Di mana suara mahasiswa yang lain? Apakah sedang sibuk kuliah? Ataukah sedang *kongkow-kongkow* tanpa arah? Suara mahasiswa adalah suara rakyat. Mari kita berbuat yang terbaik untuk rakyat, bangsa dan bernegara. Jika kita melihat kebobrokan dan kejanggalan dalam pengelolaan negara, maka wajib hukumnya kita mengingatkan pemerintah agar berbenah dan terarah.

Sejatinya siapapun yang melakukan kritik dan protes terhadap pemerintah harus direspons dengan baik. Karena kritikan-kritikan tersebut bertujuan untuk membangun bangsa. Kritikan Zaadit Taqwa harus menjadi inspirasi untuk kita semua. Bahwa mengkritik dan mengingatkan penguasa adalah keniscayaan. Dan dijamin undang-undang. Jangan biarkan negara ini dikelola serampangan.

Jika negara ini dikelola dengan baik, insya Allah negara ini akan menjadi negara hebat dan kuat. Hebat dan tidaknya negara kita ini bergantung kepada penyelenggara negaranya. Pastikan para penyelenggara negara jauh dari perilaku korup dan cinta

dunia "*wahn*". Bangsa ini butuh percepatan untuk bangkit dari keterpurukan dan dapat melaju bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Kartu kuning dari Zaadit Taqwa sebagai pengingat untuk kita semua bahwa masih banyak persoalan-persoalan bangsa yang perlu penanganan serius untuk diselesaikan.

Jangan sampai kartu kuning Zaadit Taqwa kepada Jokowi menjadi kartu merah di kemudian hari. Oleh karena itu, dengan sisa dua tahun lagi pemerintahan Jokowi-JK harus bekerja yang terbaik dalam melayani rakyat. Selamat bekerja.

34

Demokrasi Kaum Penjahat

Demokrasi atau roti. Demokrasi merupakan pilihan kita dalam berpolitik, sedangkan roti melambangkan kesejahteraan. Apa hubungannya Demokrasi dengan roti. Sesungguhnya jika kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik yang kita ikuti bersama, sejatinya demokrasi harus menjadi alat agar masyarakat sejahtera. Roti bisa melambangkan negara non-demokratis yang rakyatnya sejahtera.

Lihat dua negara tetangga kita –Malaysia dan Singapura— kedua negara tersebut bukanlah negara yang demokratis seperti

Indonesia. Tetapi kedua negara tersebut lebih maju dan lebih sejahtera dari negara kita. Artinya negara yang tidak demokratis seperti Malaysia dan Singapura bisa menjadikan rakyatnya maju dan sejahtera.

Bagaimana dengan Indonesia yang memilih demokrasi. Demokrasi Indonesia sedang menuju arah kriminal seperti itulah yang pernah dikatakan oleh Haryono Umar, mantan pimpinan KPK. Kriminal mungkin karena banyak pejabat kita yang berfikir dan bersikap kriminal. Dan melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti korupsi dan lain-lain.

Meminjam istilah Juan J. Linz, dalam bukunya *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain.* Kita mesti menghindari demokrasi yang tumbuh dan dikembangkan oleh para kaum penjahat baik di daerah maupun di pusat. Demokrasi dikhianati oleh kaum penjahat untuk merusak sendi-sendi bernegara (Linz, 2001).

Minggu yang lalu, dua kepala daerah Bupati Jombang Nyono Suharli dan Gubernur Jambi Zumi Zola dijadikan tersangka oleh KPK. Belum lagi sebelum-sebelumnya banyak deretan kepala daerah yang kena OTT KPK. Apakah ada yang salah dari sistem demokrasi ataukah memang sistem kita yang sudah rusak dan hancur karena perangai elit-elitnya yang korup dan tak bermoral.

Demokrasi memang merupakan sistem tebaik dari yang terburuk. Demokrasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan sistem yang baik. Namun jika demokrasi disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik kekuasaan yang lalim dan zholim, maka demokrasi akan menjadi sumber bencana.

Demokrasi merupakan sistem politik yang diimpor dari Barat. Laiknya barang dan pemikirian dari luar, tentu akan

disesuaikan dengan konteks budaya Indonesia yang memang sudah demokratis. Namun demokrasi di Indonesia masih jauh dari cita-cita kita bersama yaitu kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara.

Jika negara-negara Barat dan Eropa dengan demokrasinya mereka bisa sejahtera. Kenapa Indonesia dengan demokrasi masih miskin dan melarat rakyatnya. Kita masih mengimpor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke banyak negara di dunia. Dan mencari kerja di dalam negeri juga sangat sulit.

Demokrasi liberal memang akan membawa dampak kerusakan bagi Indonesia jika tidak diatur dengan baik. Demokrasi sejatinya memberikan peluang kepada setiap individu warga negara untuk berkompetisi dalam politik dan sukses dalam menjalani kehidupan bernegara. Demokrasi juga memberi kesempatan kepada setiap orang untuk berkarya terbaik dan menjadi yang terbaik.

Namun demokrasi juga akan dimanfaatkan oleh kaum penjahat untuk merusak tatanan politik. Sistem politik kita cenderung terbuka dan cenderung liberal. Dalam sistem yang liberal, hanya orang-orang kaya lah yang akan lebih berpotensi untuk memegang kekuasaan. Jadi jabatan-jabatan politik lebih banyak akan dikuasai oleh kaum pemilik modal dan para borjuis.

Pilkada sebagai bagian dari pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah terbaik telah melahirkan kepala-kepala daerah yeng bermental busuk dan korup. Semua ini disebabkan oleh biaya politik untuk menjadi calon kepala daerah yang mahal dan berbiaya tinggi. Tingginya uang yang dikeluarkan oleh para calon kepala daerah menjadikan calon kepala daerah melakukan *kongkalingkong* dengan para pengusaha. Dan ketika terpilih nanti akan mengijonkan proyek daerah kepada para pengusaha.

Tingginya biaya politik dan perilaku elit politik yang bermental korup menjadikan Pilkada penuh dengan permainan uang dan kecurangan. Pilkada langsung telah melahirkan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pilkada telah dibajak oleh para elit untuk memburu kekuasaan dengan tanpa aturan. Dan demokrasi telah dirusak oleh aktor-aktor politik sehingga demokrasi menjadi hampa dan tak bermakna.

Demokrasi yang harusnya mencerahkan dan mensejahterakan dibajak dan dirusak oleh para kaum penjahat untuk melanggengkan kekuasaannya. Kekuasaan bagi mereka harus direbut dan dipertahankan dengan cara apapun. Demokrasi menjadi rusak ditangan elit yang rusak. Dan demokrasi akan menjadi berkah jika demokrasi diterapkan dijalankan oleh penguasa dan rakyat yang baik.

Demokrasi kaum penjahat menjadikan bangsa ini dikuasai oleh para kaum penjahat. Kaum penjahat akan menjadikan demokrasi suram. Suram karena kita akan dibawa kepada politik kekuasaan yang monolitik. Dan demokrasi hanya akan melegitimisi kaum penjahat untuk berkuasa. Demokrasi juga akan diarahkan untuk mengeruk kekayaan alam nusantara. Seolah-olah demokrasi padahal kita sedang ada pada alam otoriter.

Demokrasi jangan biarkan dikuasai oleh para kaum penjahat. Jangan biarkan demokrasi menghasilkan pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang bermental bejat, rusak, dan korup. Demokrasi harus mencerahkan, membahagiakan, dan mensejahterakan. Negara demokrasi juga rakyatnya harus "kenyang" makan roti.

Jadi sesungguhnya negara demokrasi seperti Indonesia juga bisa untuk menjadi negara kaya dan sejahtera. Jadi *ending* demokrasi haruslah bemuara kepada kesejahteraan dan kemakmuran. Buat

apa demokrasi jika tidak sejahtera. Buat apa demokrasi jika masih sengsara. Oleh karena itu, pilihan demokrasi haruslah menjadi pilihan yang nyaman dan nyaman untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia membutuhkan roti "kesejahteran". Jadi apapun pilihan kita berdemokrasi haruslah menjadikan rakyat bahagia dan sejahtera.

Menjadi demokrasi yang mensejahterakan dan membahagiakan adalah pilihan yang terbaik. Tapi kapankah demokrasi yang kita anut akan membawa kemakmuran. Indonesia raya yang kaya raya ini membutuhkan demokrasi yang berkeadilan. Demokrasi yang membawa nilai-nilai kebaikan. Bukan demokrasi yang dikuasai oleh para kaum penjahat. Jika demokrasi dikuasai dan dimainkan oleh para kaum penjahat, maka tunggulah kehancuran suatu bangsa.

Demokrasi harus menghasilkan keyakinan bahwa demokrasi berpihak pada *wong cilik.* Bukan berpihak kepada kaum pemilik modal. Demokrasi kaum penjahat harus dijauhkan dari negara tercinta kita ini. Mari kita hindari dan jauhkan demokrasi dari para kaum penjahat dan penjilat.

35

Wakil Rakyat Yang Terhormat

Menjadi anggota DPR RI merupakan dambaan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Pasca reformasi, DPR RI menjadi lembaga negara yang kuat dan kekuasaannya cenderung lebih besar dari lembaga negara lainnya. Tiga fungsi yang dimiliki DPR RI yaitu legislasi, *budgeting*, dan pengawasan menjadikan institusi DPR RI cenderung disalah gunakan oleh anggotanya yang bermental korup.

Tidak semua naggota DPR RI bermental rusak. Banyak anggota DPR RI yang bersih dan berakhlak mulia. Namun karena

kewenangannya yang terlalu besar pada jabatannya tersebut, bisa saja anggota DPR RI yang bersih dan baik bisa tergelincir kekubang korupsi.

Sepertinya yang pernah diungkapkan oleh Lord Acton: *"Power tends to currupt, and absolute power corrupps absolutely"*. Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak akan menghasilkan korup yang mutlak. Artinya jika kekuasaannya terlalu besar kecenderungan untuk korupsinya juga sangat besar. Oleh karena itu, kekuasaan besar yang dimiliki oleh para wakil rakyat tersebut sejatinya digunakan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Kewenangan legislasi DPR RI yang hari-hari ini menjadi kontoversi di mata publik. Kontoversi tersebut akibat delapan fraksi di parlemen minus Nasdem dan PPP mendukung revisi UU MD3 yang perubahan pasal-pasalnya menguntungkan dan bahkan membentengi diri dari jerat hukum para penegak hukum. Awalnya UU MD3 direvisi karena untuk mengakomodir PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 yang tidak mendapat jatah pimpinan di DPR RI.

Namun dalam perkembangannya revisi menyasar pasal-pasal lain termasuk pasal yang pernah dibatalkan MK. Para anggota DPR RI yang terhormat menghidupkan kembali pasal yang isinya bahwa anggota DPR RI yang dipanggil atau dimintai keterangan oleh penegak hukum harus terlebih dahulu meminta ijin Presiden dengan pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dalam pasal lain juga DPR RI menambahkan kewenangannya yang yaitu terkait bahwa DPR RI dapat memanggil paksa kepada siapapun melalui kepolisian. DPR RI bukanlah institusi penegak

hukum, jadi jangan sampai bertindak melampaui kewenangannya. Dan Polisi jangan sampai dijadikan alat oleh DPR RI untuk memaksa rakyat atau siapapun yang dipanggil DPR untuk datang. Hak rakyat untuk tidak datang jika dipanggil oleh DPR RI. Dan hak rakyat juga untuk menolak jika dimintai keterangan oleh DPR RI.

Alih-alih menjadikan lembaga parlemen yang lebih produktif dan inovatif dalam berkarya. Fraksi-fraksi di DPR RI malah bagi-bagi kekuasaan dengan menambah pimpinan DPR dan MPR RI, memperkuat, dan membentengi diri dari kasus-kasus hukum. Rakyat sedang menunggu karya terbaik dari para anggota DPR RI. Rakyat tidak boleh ditipu dan dibohongi dengan janji-janji manis. Rakyat sedang mendambakan institusi DPR RI yang terhormat, berwibawa, dan berintegritas.

Wakil rakyat sejatinya berjuang untuk kepentingan rakyat. Bukan berjuang untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, dan partainya. Wakil rakyat merupakan kumpulan orang-orang terhormat. Dan bukan kumpulan orang-orang laknat. Wakil rakyat merupakan kumpulan orang-orang dahsyat. Bukan kumpulan orang-orang yang sesat. Wakil rakyat merupakan kumpulan orang-orang terpilih. Bukan kumpulan orang-orang yang perih. Wakil rakyat merupakan kumpulan orang-orang hebat. Bukan kumpulan orang-orang yang bejat.

Kita sedang menyaksikan atraksi dan akrobat wakil rakyat yang sedang getol-getolnya untuk mengamankan diri dari jerat hukum. Anggota DPR RI yang tidak jujur dan korup sedang harap-harap cemas jika suatu saat nanti ditangkap KPK. Seperti kita tahu banyak anggota DPR RI yang disebut-sebut dan diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi.

Bahkan eks Ketua DPR RI, Setya Novanto menjadi pesakitan karena disangka terlibat dalam dugaan korupsi E-KTP. Wajar jika anggota DPR RI yang lainnya ketar-ketir dan sekuat tenaga untuk membentengi diri dengan merevisi pasal-pasal tertentu dalam UU MD3. Oknum anggota DPR RI juga manusia biasa, pasti ketakutan jika dijadikan tersangka oleh KPK. Selama ini hanya KPK-lah yang berani menangkap anggota DPR RI yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sedangkan institusi penegak hukum yang lain, jika berhadapan dengan kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR RI kasusnya menguap begitu saja. Hampir tidak ada anggota DPR RI yang ditangkap oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Demi untuk menjaga marwah DPR RI, Kepolisian, dan juga Kejaksaan sejatinya ketiga institusi tersebut bekerjasama untuk memberantas korupsi. Bukan untuk menutupi korupsi yang melibatkan oknum-oknum anggota DPR RI yang berkasus.

Kita bermimpi memiliki lembaga parlemen yang kuat, bersih, dan berwibawa. Entah mimpi itu akan terlaksana atau tidak. Dan entah kapan akan terlaksana. Namun impian itu tidak boleh hilang. Impian itu akan terwujud jika kita bersama-sama dan bahu-membahu menjadikan institusi DPR RI menjadi lembaga negara yang terhormat dan mulia.

Kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan anggota DPR RI yang tercela dan melakukan tindakan pidana korupsi. Mungkin kita juga yang terlalu permisif dan membiarkan sistem dan budaya korup merajalela di lingkungan kita semua. Sistem yang korup akan menghasilkan pejabat-pejabat yang korup pula. Dan sistem yang korup akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara.

Sistem pemilu yang terbuka dan berbiaya mahal telah menghasilkan pejabat-pejabat yang gelap mata, karena harus

mengembalikan biaya politiknya. Karena biaya politik yang tinggi tersebut juga menjadikan anggota DPR RI yang terpilih terjebak pada kubangan korupsi, karena harus untung dan untuk membiayai gaya hidup yang mewah. Tidak dilarang untuk bergaya hidup yang mewah, naumun kewewahan tersebut harus didapatkan dengan cara-cara yang baik dan benar (Pratiwi, 2018).

Mari berbuatlah yang terbaik untuk rakyat. Jangan khianati rakyat hanya untuk kepentingan sesaat. Rakyat mencintai anggota DPR RI yang peduli terhadap mereka. Rakyat jangan hanya dicari dan dibutuhkan hanya ketika Pemilu semata. Tetapi jadikanlah rakyat sebagai jalan untuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara.

36

Tanggapan untuk Rektor Baru UAI, Terkait Opini, Pendidikan adalah Kemanusiaan

Tulisan opini Prof Asep Saefuddin (ijinkan saya memanggilnya Kang Asep), Rektor baru Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) terkait Pendidikan adalah Kemanusiaan yang dipublish Netralnews.com merupakan tulisan yang syarat makna dan merupakan refleksi pengalaman pribadi yang bisa dijadikan ibroh bagi civitas akademika UAI dan bagi kita semua rakyat Indonesia.

Sejatinya pendidikan bukan sekadar kemanusian dan bukan hanya memanusiakan manusia. Pendidikan juga

berdimensi luas dan harus memberi ruang dalam rangka untuk pengabdian. Pengabdian untuk mengabdi kepada agama, bangsa dan negara (Christiana, 2013: 398-410).

Karena pada dasarnya kita adalah pengabdi. Disisi yang lain kita juga adalah pemimpin. Pemimpin adalah pelayan. Pelayan untuk ummat. Pelayan untuk rakyat. Dan pelayan untuk yang dipimpinnya.

Saya mengucapkan selamat atas dilantiknya Kang Asep menjadi Rektor UAI untuk masa bakti 2017-2021. Semoga amanah yang diberikan dapat ditunaikan dengan baik. Saya belum pernah bertemu dan berkenalan dengan beliau.

Tapi kenapa saya memanggil beliau dengan sapaan Akang atau Kang Asep. Karena kami terikat oleh ikatan organisasi yang sama yaitu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Persaudaraan dan kekeraban di KAHMI sangat kuat dan dibentuk sejak lama.

Karena kuatnya hubungan persaudaraan di KAHMI. Lima hari sebelum pelantikan Kang Asep sebagai Rektor UAI, saya ditelepon oleh senior KAHMI yang memberi kabar bahwa Kang Asep akan dilantik menjadi Rektor UAI yang baru.

Jadi bagi saya, KAHMI bukan hanya tempat berkumpulnya para alumni HMI seluruh Indonesia. Tetapi juga tempat bersilaturrahmi, berbagi, dan berkaya untuk memajukan Indonesia.

Sebagai junior tentu saya bangga atas dilantiknya Kang Asep menjadi Rektor UAI. Dan saya percaya dengan kemampuan manajerial dan leadership beliau. Karena jabatan Rektor bukan hanya harus mampu menjadi manajer yang bertugas "mengatur", tetapi juga harus mampu menjadi leader.

Jika Rektor hanya mampu mengatur tetapi tidak mampu jadi leader, maka sebuah kampus tidak akan berkembang

dan maju. Rektor yang berkarakter manajer hanya akan mampu mengatur dan menata internal kampus, seperti mengatur tata kelola keuangan, tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola administrasi, sarana dan prasarana, dan lain-lain. Namun tidak mampu menjadi lokomotif perubahan bagi internal kampus dan bangsa Indonesia.

Rektor yang hebat bukan hanya dituntut untuk menjadi manajer yang handal. Tetapi juga dituntut untuk menjadi leader (pemimpin). Rektor yang berjiwa pemimpin, dia memiliki kecakapan yang mumpuni dalam manajerial dan dapat menjadi daya tarik dan daya magnet bagi yang dipimpinnya.

Rektor dengan gaya leader akan mambawa perubahan positif dan mejadi lokomotif dan akan menarik gerbong-gerbong lainnya. Jika ada gerbong yang rusak, akan diperbaiki. Jika ada gerbong yang mogok, tidak akan dibiarkan. Dan jika ada gerbong yang kotor, maka akan dibersihkan.

Seorang Rektor harus membawa perubahan bagi yang dipimpinnya. Jadi jika ada ada dosen yang tidak produktif, maka diajak dan didorong untuk produktif bahkan mungkin diberi reward yang setimpal.

Jika ada karyawan yang malas bekerja, maka harus diberi motivasi sehingga lebih rajin. Jika ada dosen dan karyawan yang kritis, harus didekati dan berusaha untuk mencari akar persoalan dan menyelesaikannya secara bijaksana.

Menjadi leader yang handal memang tidak mudah. Namun bukan berarti sulit. Semua bisa dilakukan dengan pengabdian yang tulus terhadap institusi.

Dengan pengalaman beliau yang banyak, baik di pentas nasional dan internasional. Juga pernah memimpin Universitas

Trilogi. Saya berkeyakinan bahwa Kang Asep akan mampu menjadi manajer dan juga sekaligus leader yang baik dan handal untuk kemajuan UAI.

UAI sangat membutuhkan Rektor yang rendah hati, sederhana, dinamis, progressif, visioner, berwawasan luas dan berjejaring luas. Mudah-mudahan kriteria-kriteria tersebut ada pada sosok Kang Asep.

Leader yang hebat harus membangun budaya kerja berlandaskan merit system (sistem berdasarkan prestasi). Jadi bagi siapa saja dari dosen atau pun karyawan yang sudah bekerja keras, memiliki loyalitas, berdediksi tinggi, rajin, dan produktif harus diberi penghargaan yang seimbang dengan kenaikan pangkat atau yang lainnya.

Jika sistem ini menjadi budaya di kampus UAI dan kampus-kampus lainnya di Indonesia, maka Insya Allah kampus akan menjadi pusat dan tempat membangun peradaban.

Jangan sampai yang terjadi sebaliknya. Kampus jangan dan tidak boleh dijadikan tempat tumbuh suburnya kobobrokan dan kerusakan. Harus juga harus menghindari dan meninggalkan spoil system (sistem yang tidak berdasarkan prestasi) yang selama ini terjadi.

Jangan sampai kampus dijadikan tempat untuk Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Jangan juga bekerja berdasarkan like and dislike. Dan saya punya keyakinan mudah-mudahan tidak ada dan tidak terjadi KKN di UAI atau pun kampus lainnya di Indonesia. Karena jika spoil system yang tumbuh dan berkembang dalam suatu institusi, maka tunggulah kehancuran institusi tersebut.

Mari kita bangun UAI dengan kebesaran jiwa. UAI bukan milik orang-perorang. UAI bukan milik kelompok tertentu. UAI milik kita semua. Milik ummat dan milik Indonesia.

Mari kita sambut Rektor baru dengan tangan terbuka. Mari kita berjabat tangan untuk memperbaiki UAI tercinta. Dan mari kita mengabdi untuk UAI dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Membangun UAI butuh kerjasama. Dan membangun UAI harus dengan cinta. Selamat bertugas Kang Asep.

Selamat menjalankan amanah ummat. Saya, civitas akademika UAI, dan juga rakyat Indonesia menanti hasil kerja nyata Akang. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah SWT.

BAB 7

PENUTUP

37

Penutup

Masa depan bangsa sedang dipertaruhkan. Pertaruhan itu ada dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pilpres dan Pileg serentak tahun 2019. Pilkada, Pileg, dan Pilpres menjadi salah satu pintu masuk dalam pembangunan bangsa. Dan akan menentukan masa depan bangsa ke depan. Pilkada, Pileg, dan Pilpres yang beradab akan menciptakan pembangunan daerah dan pusat yang pesat, dan juga akan menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika daerahnya maju, maka pembangunan nasional pun akan melaju. Begitu juga sebaliknya, jika daerahnya terbelakang, maka pembangunan nasional akan stagnan bahkan cenderung akan mundur ke belakang.

Pilkada akan menjadi momen menentukan dalam proses perjalanan bangsa ke depan. Pilkada yang aman, damai, bersih,

jujur, dan adil akan menjadi cermin bagi dunia internasional dan menilai bahwa bangsa Indonesia sukses dalam menjalankan pesta demokrasi lokal dan akan menjadi inspirasi dunia. Pilkada yang sukses akan menjadi pembuktian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Namun jika Pilkada berlangsung chaos, terjadi intevensi oleh pemerintah, penyelenggara Pilkada –KPUD dan Panwaslu—ikut "cawe-cawe" dan diam-diam mendukung calon tertentu, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan tidak netral, Badan Intelijen Negara (BIN) memihak, terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif, konflik horizontal, saling fitnah dan adu domba, ini semua akan mengancam peradaban dan masa depan bangsa.

Masa depan daerah dan bangsa tidak mungkin bisa dibangun dengan kecurangan, kebencian, keributan, dan kegaduhan. Masa depan bangsa hanya akan bisa dibangun kedamaian, persatuan, kesatuan, cinta, dan kasih sayang. Menjadi Indonesia adalah salah satu solusi terhadap persoalan bangsa. Ketika kita sudah merasa menjadi Indonesia, maka pola pikir, ucapan, dan tindakan kita akan mencerminkan budi pekerti yang luhur demi terciptanya pembangunan bangsa.

Bangsa ini sedang mengalami defisit keteladanan. Jika zaman kemerdekaan dan pra kemerdekaan, kita memiliki pemimpin yang bisa dijadikan panutan; seperti HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Sjahril, Mohammad Roem, KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, Buya Hamka dan masih banyak lagi tokoh-tokoh bangsa yang bisa dijadikan panutan dalam beragama dan bernegara.

Di saat ini, kita sedang dihadapkan pada dilema miskinnya keteladanan dari para pemimpin daerah dan pemimpin nasional.

Fakta menunjukkan banyak dari para bupati/walikota/gubernur, dan DPRD terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Para kepala daerah yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya terjebak dalam permainan tindak pidana korupsi.

Begitu juga dalam konteks kepemimpinan nasional. Banyak tokoh nasional yang terperangkap dalam perbuatan nista dan tercela karena melakukan korupsi, baik yang dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah. Banyak Menteri, Anggota DPR RI, Ketua Umum Partai Politik yang terjerat KPK karena menggarong uang negara. Namun saat ini kita sangat prihatin, Korupsi merajalela, namun KPK yang dilemahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alvionita, Rinta. "Representasi Situasi Sosial dan Konstruksi Ideologi Dalam Pidato Pelantikan Anies Baswedan". Retorika: Jurnal Bahasa dan Sastra, 2019.

Andriansyah. *Kepemimpinan Visioner Kepala Daerah: Kajian dan Teori.* Jakarta: Penerbit Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015.

Ardiansyah, Megi. *Kampanye Pilkada Menggunakan Media Massa Elektronik Dalam pandangan Etika Politik Islam.* Lampung: UIN Lampung, 2017.

Christiana, Esther. "Pendidikan Yang Memanusiakan Manusia". Jurnal Humanora Volume 4 Nomor 1, 2013.

Fatmawati, Fadilah. *Peranan Bung Tomo Dalam Peristiwa 10 November 1945 Di Surabaya*. Jember: Universitas Jember, 2015.

Ghafur, Jamaludin dan M. Yasin Al Arif. "Suksesi Kepemimpinan Dalam Partai Politik: Studi Atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan". Jurnal Hukum Ius Quua Iustum Volume 24 Issue 4 Oktober 2017.

Hidayati, F Mia. *Kasus Setya Novanto Korupsi E-KTP Ditinjau Dari Sudut Panjang Actus Humanus dan Prinsip Reflektif Dari Hati Nurani Yang Benar.* Madiun: Universitas Katolik Widya Mandala, 2018.

Hikmawati, Puteri. *Operasi Tangkap Tangan Dalam Penangkapan Kasus Korupsi.* Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018.

Karyanti, Tri. "Sumpah Pemuda dan Nasionalisme Indonesia". Majalah Ilmiah Informatika Volume 1 Nomor 3: Fakultas Ilmu Komputer Universitas AKI, 2010.

Krishna, Anand. *Sebuah Refleksi Sejarah Indonesia Jaya, Segelimang Apapun Masa LaluMu, Masa DepanMu Lebih Cemerlang.* Jakarta: One Earth, 2015.

Kinanti, Indah A. *Wacana Korupsi Pada Berita Kasus E-KTP Setya Novanto.* Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Kementerian Dalam Negeri. *Pilkada Serentak 2018.* Jakarta: Kemendagri, 2018.

Kojoh, Fricky F. "Peran Pimpinan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan". Jurnal Acta Diurma Volume 3 Nomor 2, 2014.

Komarudin, Ujang. *Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik.* Jakarta: RM Books, 2016.

..... *Dinamika Politik Nasional: Pasang Surut Hubungan Kekuatan Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pencerah Generasi Antarbangsa, 2017.

..... *Mencintai Indonesia: Catatan dan Harapan Seorang Dosen.* Jakarta: Pencerah Generasi Antarbangsa, 2107.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Linz, Juan J dkk. *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar Dari Kekeliruan Negara-negara Lain.* Bandung: Mizan, 2001.

Moeldoko. *Lima Tahun Maju Bersama: Capaian Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.* Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan, 2019.

Mustafa. "Citra Setya Di Jagad Maya. Jurnal An-Nida": Jurnal Pemikiran Islam, 2017.

Muchtar, Tenriangke A dkk. *Kajian Kebijakan Pilkada 2018*. Jakarta: The Indonesian Institute, 2018.

Nirwati, Haslin. *Mekanisme Penunjukan Aziz Samsoeddin Sebagai Calon Ketua DPR Pasca Penetapan Status Tersangka Pada Setya Novanto Dalam Kasus E-KTP Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.* Tesis IAIN Surabaya, 2018.

Nugroho, Heru. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia.* Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE), 2017.

P. Purba, Daniel dan Sumiharti, Yati (Ed). *Pidato-Pidato Yang Mengubah Dunia: Kisah dan Petikan Pidato-Pidato Bersejarah.* Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2008.

Pidato Menteri Sosial RI Dalam Rangka Hari Pahlawan Tahun 2019.

Pratiwi, Diah A. "Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?" Jurnal Trias Politika Volume 2 Nomor 1, 2018.

Rajab, Acmadudin. *Pilkada Serentak dan Dampaknya pada Stabilitas Keamanan Jakarta.* Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2018.

Reyhansyah, Rega. *Analisis Putusan Praperadilan Dalam Perkara Setya Novanto.* Lampung: UNILA, 2018.

Perdana, Ariwan K. "Generasi Milenial dan Strategi pengelolaan SDM Era Digital". Jurnal Studi Pemuda Volume 8 No 1 Tahun 2019

Saadah, Siti F. H*ari Santri dan Respon Organisasi NU, Muhammadiyah, LDII Di Surabaya Tahun 2015-2018.* Surabaya: UIN Surabaya, 2019.

Soekarno. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta:

Media Pressindo, 2016.

Susilo, Adhi B dan Anas Sabani. *Mahar Politik Sebagai Bagian Dari Unsur Tindak Pidana.* Semarang: Seminar Nasional Hukum UNS Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018.

Siregar, Rayni W. *Peran dan Fungsi TNI dan Polri Dalam Pertahanan dan Keamanan Negara*. Jakarta: UI, 2011.

Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Historis Filosofis Sifat-sifat Islam". Jurnal Al-Bayan Volume 22 Nomor 33, 2016.

Tedjo, Pratiwi. "Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018: Tantangan dan Harapan". Jurnal Mimbar Administrasi Volume 2 Nomor 1, 2018.

Triningsih. *Menggali Spirit Sumpah Pemuda Bagi Pustakawan Muda: Refleksi Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.* IAIN Surakarta, 2019.

Zulfikar, Achmad. *Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Serentak Terhadap Aspek Sosial, Politik, dan Ekonomi.* Makalah Presentasi Dalam Seminaar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak, 2015.

Media

Airlangga Sang Nahkoda Baru Partai Beringin, Kamis, 14 Desember 2017 15:58 WIB, AKURAT.CO

Apa Kabar Pansus KPK? Jumat 24 Nopember 2017 18:57:00, MONITOR.CO.ID

Eks TNI/Polri Masuk Gelanggang Politik, Senin, 22 Januari 2018, MONITOR.CO.ID

Demokrasi Kaum Penjahat, Kamis, 8 Februari 2018, AKURAT.CO

Golkar Now, Kamis, 21 Desember 2017 16:10 WIB, AKURAT.CO

Golkar Pasca Novanto, Kamis, 16 November 2017 12:01 WIB, AKURAT.CO

Gundah Gulana Kader Beringin, Kamis, 05 Oktober 2017 12:40 WIB, AKURAT.CO

Jalan Tengah Selamatkan Golkar, Kamis, 23 November 2017 10:47 WIB, AKURAT.CO

Jangan Tinggalkan Novanto, Kamis, 07 Desember 2017 10:43 WIB

Jurus Sakit Para Koruptor, Rabu 27 September 2017 17:36:00, MONITOR.CO.ID

Kartu Kuning Untuk Jokowi, Senin, 5 Februari 2018, MONITOR.CO.ID

Kompas.com

Kursi Panas Pilkada 2018, Sabtu, 27 Januari 2018, LINTASPARLEMEN.COM

Lagi-lagi OTT, Kamis, 12 Oktober 2017 12:19 WIB, AKURAT.CO

LINTASPARLEMEN.COM

Menagih Janji Anies – Sandi, Kamis 12 Oktober 2017 08:40:00, MONITOR.CO.ID

Mencintai Pahlawan, Kamis, 09 November 2017 12:02 WIB, AKURAT.CO

Meneladani Hari Sumpah Pemuda, Kamis, 26 Oktober 2017 14:33 WIB, AKURAT.CO

Meneladani Para Pahlawan, Kamis 09 Nopember 2017 06:40:00,

MONITOR.CO.ID
Menjadikan Pilkada Penuh Makna, Selasa, 30 Januari 2018, MONITOR.CO.ID
Menjaga Netralitas Dalam Pilkada, Jum'at, 26 Januari 2018, MONITOR.CO.ID
Mungkinkah Pilkada Tanpa Money Politics, Kamis, 25 Januari 2018, AKURAT.CO.
Panik di Tahun Politik, Kamis, 04 Januari 2018 09:17 WIB, AKURAT.CO
Partai Golkar bukan Toko Kelontong
Pilih Golkar atau Novanto, Kamis 30 Nopember 2017 08:01:00, MONITOR.CO.ID
Pilkada dan Kemaslahatan Bangsa, Kamis, 11 Januari 2018 15:52 WIB, AKURAT.CO,
Pilkada dan Mahar Politik, Selasa 16 Januari 2018, MONITOR.CO.ID
Pilkada dan Pertaruhan Masa Depan Bangsa, Sabtu, 3 Februari 2018,
Pilkada Zaman Now, Kamis, 1 Februari 2018, AKURAT.CO
Plus Minus 3 Tahun Jokowi-JK, Kamis, 02 November 2017 12:24 WIB, AKURAT.CO
Republika.co
Selamat Milad Akurat.co, Kamis, 30 November 2017 09:34 WIB, AKURAT.CO
Spirit Hari Santri Nasional , Kamis, 19 Oktober 2017 13:42 WIB, AKURAT.CO
Spirit Hari Sumpah Pemuda, Kamis 26 Oktober 2017 15:33:00, MONITOR.CO.ID
Tahun Baru dan Tahun Politik, Minggu 31 Desember 2017

10:10:00, MONITOR.CO.ID

Tahun Politik Tahun Penuh Intrik, Kamis, 18 Januari 2018, AKURAT.CO.

Tanggapan untuk Rektor Baru UAI, Terkait Opini, Pendidikan adalah Kemanusiaan: Selasa, 10 Oktober 2017, NETRALNEWS.COM

Tempo.co

Wajah Baru Senayan, Jumat, 29 Desember 2017 15:01 WIB, AKURAT.CO

Wakil Rakyat Yang Terhormat, Rabu, 14 Februari 2018, MONITOR.CO.ID

TENTANG PENULIS

Dr. Ujang Komarudin, M.Si adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR). Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta. Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ke- 50.

Beliau aktif menulis di berbagai media dan sering menjadi narasumber di beberapa TV Nasional seperti TVRI, Metro TV, TV ONE, Trans 7, CNN TV Indonesia, Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Dakta dan lain-lain. Keliling Indonesia mengisi seminar dan pelatihan. Kini sedang menikmati menjadi penulis dan pengamat politik. Beberapa buku yang sudah terbit di antaranya:

1. *Dinamika Politik Nasional: Pasang Surut Hubungan Kekuatan Politik di Indonesia*
2. *Membangun Indonesia: Sebuah Ikhtiar Membangun Bangsa yang Hampir Tenggelam*
3. *Mencintai Indonesia: Catatan dan Harapan Seorang Dosen*
4. *Pertarungan Politik di Indonesia: Dinamika Pertarungan Politik dalam Pilkada dan Politik Nasional*
5. *Menjadi Indonesia: Pikiran-pikiran Politik Seorang Pengamat Indonesia*
6. *Strategi PKS Putihkan Jakarta*
7. *Ideologi Partai Politik: Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik*
8. *Perspektif Indonesia: Catatan Politik di Tahun Politik*

Beliau bisa dihubungi di alamat email: ujang81@uai.ac.id atau WhatsApp 081-33-782-6674.